



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN (BA. 022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



TAHUN ANGGARAN 2018 (Aṅḡaran 2018)

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 022
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2018
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2018 (*Audited*) ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2019



Kata Pengantar	
Daftar isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	
II. Neraca	
III. Laporan Operasional	
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	A-1
B. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	B-1
C. Penjelasan atas pos-pos Neraca	C-1
D. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional	D-1
E. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	E-1
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	F-1

	Hal	
A.1	Rincian Jumlah Satker pada Masing-Masing Eselon I	A-7
A.2	Kriteria Kualitas Piutang	A-11
A.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	A-13
A.4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	A-14
B.1.	Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Semula dan Setelah Revisi	B-1
B.2.	Uraian Pagu Anggaran Semula dan Setelah Revisi Berdasarkan Program	B-1
B.3.	Rincian estimasi dan Realisasi Pendapatan	B-3
B.4.	Rincian Estimasi dan realisasi Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan informatika per 31 Desember 2018	B-6
B.5.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum per 31 Desember 2018	B-7
B.6.	Perbandingan Realisasi PNBPNP per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-8
B.7.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018	B-8
B.8.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31 Desember 2018	B-9
B.9.	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-10
B.10.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-11
B.11.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-12
B.12.	Uraian Jenis Belanja Barang Operasional	B-12
B.13.	Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional	B-13
B.14.	Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan	B-15
B.15.	Uraian Jenis Belanja Perjalanan Dalam Negeri	B-17
B.16.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-18
B.17.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-19
B.18.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-19
B.19.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-20
B.20.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-21
B.21.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-22
B.22.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	B-22
C.1.	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-1
C.2.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	C-2
C.3.	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	C-2
C.4.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-3
C.5.	Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Satker	C-3
C.6.	Saldo Kas BLU per Satker BLU per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-4
C.7.	Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	C-5
C.8.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-6
C.9.	Mutasi Belanja Dibayar Dimuka	C-6

	Hal
C.10. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I	C-7
C.11. Mutasi Pendapatan yang masih harus diterima	C-7
C.12. Piutang Bukan Pajak Menurut Jenisnya	C-8
C.13. Piutang Bukan Pajak Per Eselon I	C-8
C.14. Rincian Piutang Lainnya Ditjen Perhubungan Darat	C-9
C.15. Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Laut Per Jenis	C-10
C.16. Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara Per Jenis	C-11
C.17. Rincian Piutang Bukan Pajak BPSDM Perhubungan	C-14
C.18. Mutasi Piutang Bukan Pajak Per Eselon I	C-15
C.19. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I	C-15
C.20. Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	C-16
C.21. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR	C-16
C.22. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU	C-17
C.23. Mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C-18
C.24. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I	C-18
C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU	C-19
C.26. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C-20
C.27. Mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C-20
C.28. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	C-21
C.29. Rincian Persediaan per Eselon I	C-21
C.30. Daftar Persediaan per Akun per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	C-22
C.31. Rincian Persediaan Pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2018	C-22
C.32. Rincian Persediaan Ditjen Perkeretaapian	C-23
C.33. Rincian Aset Tetap	C-24
C.34. Rincian Aset Tetap Per Eselon I	C-24
C.35. Rincian Tanah Per Eselon I	C-25
C.36. Rincian Mutasi Tanah	C-25
C.37. Peralatan dan Mesin Per Eselon I	C-26
C.38. Mutasi Peralatan dan Mesin	C-26
C.39. Gedung dan Bangunan Per Eselon I	C-27
C.40. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	C-27
C.41. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I	C-28
C.42. Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	C-28
C.43. Aset Tetap Lainnya Per Eselon I	C-29
C.44. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	C-29
C.45. Kontruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I	C-30
C.46. Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan	C-30
C.47. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Eselon I	C-31
C.48. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-32
C.49. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Satker	C-32
C.50. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I	C-33
C.51. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Eselon I 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	C-33
C.52. Rincian Aset Lainnya Per Eselon I	C-34
C.53. Rincian Aset Lainnya Menurut Jenisnya	C-34
C.54. Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU	C-35
C.55. Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	C-36
C.56. Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya	C-36
C.57. Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	C-36
C.58. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	C-37

	Hal
C.59. Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya per Eselon I	C-37
C.60. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C-38
C.61. Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I	C-38
C.62. Rincian Aset Lain-Lain Per Satker BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan	C-40
C.63. Rincian Aset Lain-Lain Per Satker BLU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara	C-40
C.64. Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I	C-41
C.65. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain	C-41
C.66. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Eselon I	C-42
C.67. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Menurut Jenisnya	C-42
C.68. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I	C-43
C.69. Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I	C-43
C.70. Rincian Mutasi Hibah Yang Belum Disahkan Per Eselon I	C-47
C.71. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I	C-47
C.72. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I	C-48
C.73. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Satker BLU BPSDM	C-48
C.74. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I	C-49
C.75. Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I	C-49
C.76. Rincian Ekuitas Per Eselon I	C-50
D.1. Rincian Pendapatan TA 2018	D-1
D.2. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Eselon I untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-2
D.3. Rincian per Jenis Beban Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-3
D.4. Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-3
D.5. Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 Per Eselon I	D-4
D.6. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-4
D.7. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017	D-5
D.8. Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 Per Eselon I	D-5
D.9. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-6
D.10. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-6
D.11. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-7
D.12. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-8
D.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-9
D.14. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017	D-9
D.15. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 per Eselon I	D-9
D.16. Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017	D-10
D.17. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-10
D.18. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017	D-11

	Hal
D.19. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-11
D.20. Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017	D-12
E.1. Ekuitas Awal Per Eselon I	E-1
E.2. Surplus/Defisit Per Eselon I	E-1
E.3. Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas	E-2
E.4. Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas per Eselon I	E-2
E.5. Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I	E-3
E.6. Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA. 2018	E-3
E.7. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I	E-4
E.8. Koreksi Lain-Lain per Eselon I	E-4
E.9. Rincian Lain-lain per Jenis Koreksi	E-5
E.10. Transaksi Antar Entitas per Eselon I	E-5
E.11. Transaksi Antar Entitas dari jenis transaksi	E-5
E.12. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per Eselon I	E-6
E.13. Rincian Pengesahan Hibah	E-7
E.14. Kenaikan Ekuitas	E-8
E.15. Ekuitas Akhir	E-9
F.1. Selisih LBMN dan LK Tahun 2018 (<i>Audited</i>)	F-1
F.2. Jenis-Jenis Kegiatan Jasa Kepelabuhanan Yang Dikonsesikan	F-3
F.3. Kronologis proses penyelesaian tagihan pembayaran konsesi atas pelayanan Jasa Kebandarudaraan	F-9
F.4. Posisi Aset P3D untuk Terminal Tipe A	F-16
F.5. Rincian 28 Terminal Tipe A yang Tidak Diserahkan	F-16
F.6. Posisi Aset P3D untuk UPPKB	F-18
F.7. Rincian UPPKB yang Tidak Diserahkan	F-19

	Hal	
B-1	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018	B-9

- Lampiran B.1. Perbandingan Realisasi PNBPN per Eselon I Tahun Anggaran 2018
- Lampiran B.2. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per Eselon I Tahun Anggaran 2018
- Lampiran B.3. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per Eselon I Tahun Anggaran 2018
- Lampiran B.4. Rincian Realisasi Barang Non Operasional Untuk Subsidi Tol Laut
- Lampiran B.5. Rincian Realisasi Angkutan Subsidi perintis Ditjen Perhubungan Laut
- Lampiran B.6. Rincian Belanja Barang Subsidi Perintis Angkutan Bus pada Ditjen Perhubungan Darat
- Lampiran B.7. Rincian Subsidi Angkutan Kapal Penyeberangan
- Lampiran B.8. Rincian Realisasi Belanja Barang Subsidi Perintis pada Ditjen Perkeretaapian
- Lampiran B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Eselon I Tahun Anggaran 2018
- Lampiran C.1. Rincian Saldo Kas di Bendaharan Pengeluaran
- Lampiran C.2. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
- Lampiran C.3. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
- Lampiran C.4. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum
- Lampiran C.5. Rincian Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum
- Lampiran C.6. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Kontrak
- Lampiran C.7. Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya
- Lampiran C.8. Rincian Utang Terhadap Pihak Ketiga
- Lampiran D.1. Rincian Pendapatan jasa Transportasi, komunikasi dan Informatika per Jenis Belanja per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.2. Rincian Beban Operasional per Jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.3. Rincian Beban Pegawai per Jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.4. Rincian Beban Barang Operasional per jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.5. Rincian Beban Barang Non Operasional per jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.6. Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.7. Rincian Beban Penyusutan per jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.8. Rincian Beban Penyisihan Piutang per jenis Beban per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran D.9. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional per Eselon I T.A. 2018
- Lampiran E.1. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
- Lampiran E.2. Rincian Transfer Masuk
- Lampiran E.3. Rincian Transfer Keluar
- Lampiran E.4. Rincian Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung per Jenis Hibah
- Lampiran F.1. Rincian Jumlah Aset BPYBDS per Satker



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3451657
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

2019


MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2018 (Audited)		% Terhadap Anggaran	TA 2017 (Audited)
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.011.742.415.000,00	8.213.943.878.927,00	91,15	7.300.814.746.270,00
Jumlah Pendapatan Negara & Hibah	9.011.742.415.000,00	8.213.943.878.927,00	91,15	7.300.814.746.270,00
BELANJA NEGARA				
Belanja Pegawai	4.158.278.036.000,00	3.535.208.820.295,00	85,02	3.034.278.286.490,00
Belanja Barang	16.599.668.087.000,00	14.458.084.323.975,00	87,10	11.020.238.052.613,00
Belanja Modal	32.663.465.945.000,00	27.082.448.210.488,00	82,91	27.351.001.026.526,00
Jumlah Belanja Negara	53.421.412.068.000,00	45.075.741.354.758,00	84,38	41.405.517.365.629,00



2019

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.703.397.121,00	7.929.652.381,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.381.754.969,00	1.241.057.661,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	37.072.720.984,00	27.484.286.145,00
Kas pada BLU	868.613.894.298,00	737.030.441.915,00
Investasi Jangka Pendek - BLU	9.000.000.000,00	79.000.000.000,00
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	13.232.318.730,00	12.247.000,00
Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	656.668.774,00	199.145.435.459,00
Piutang Bukan Pajak	847.089.111.102,00	274.210.888.813,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(266.148.929.509,00)	(22.455.062.296,00)
Bagian Lancar TP/TGR	-	149.580.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	-	(747.900,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	41.093.863.711,00	48.815.532.767,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(3.435.981.740,00)	(2.634.798.339,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	2.218.441.992,00	1.348.210.637,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(155.990.517,00)	(9.469.928,00)
Persediaan	8.189.041.789.589,00	7.022.058.287.675,00
JUMLAH ASET LANCAR	9.741.363.059.604,00	8.373.325.641.990,00
ASET TETAP		
Tanah	74.768.518.687.719,00	75.742.121.286.401,00
Peralatan dan Mesin	49.051.998.331.321,00	43.493.459.809.414,00
Gedung dan Bangunan	25.586.841.177.815,00	23.274.257.931.008,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	109.896.131.855.771,00	107.378.546.316.060,00
Aset Tetap Lainnya	3.303.454.098.620,00	3.207.799.393.553,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.859.398.535.213,00	32.109.534.219.729,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(80.348.123.737.960,00)	(69.722.293.405.591,00)
JUMLAH ASET TETAP	225.118.218.948.499,00	215.483.425.550.574,00
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9.894.416.883,00	9.289.750.741,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(498.436.997,00)	(306.686.998,00)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	28.766.646.208,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	(28.766.646.208,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	9.395.979.886,00	8.983.063.743,00
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	360.209.541.000,00	347.594.837.654,00
Aset Tidak Berwujud	2.488.094.406.760,00	2.226.511.102.716,00
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	44.504.716.108,00	27.384.526.240,00
Aset Lain-Lain	5.231.113.506.667,00	4.689.311.508.841,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(1.801.135.316.378,00)	(1.220.444.636.332,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	6.322.786.854.157,00	6.070.357.339.119,00
JUMLAH ASET	241.191.764.842.046,00	229.936.091.496.426,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	446.077.282.624,00	219.484.907.017,00
Hibah yang Belum Disahkan	0,00	1.751.255.806.149,00
Pendapatan Diterima di Muka	31.947.759.585,00	52.281.877.089,00
Utang Muka dari KPPN	1.703.397.121,00	7.929.652.381,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.781.300,00	271.351.355,00
JUMLAH KEWAJIBAN	479.730.220.630,00	2.031.223.693.991,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17
EKUITAS	240.712.034.621.416,00	227.904.867.901.435,00
EKUITAS	240.712.034.621.416,00	227.904.867.901.435,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	241.191.764.842.046,00	229.936.091.495.426,00

Jakarta, 2019

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan PNBP Lainnya	8.010.306.261.794,00	7.143.320.883.973,00
Pendapatan Badan Layanan Umum		
JUMLAH PENDAPATAN	8.010.306.261.794,00	7.143.320.883.973,00
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Pegawai	3.936.029.030.952,00	3.340.726.445.973,00
Beban Persediaan	671.099.508.832,00	412.917.920.786,00
Beban Barang dan Jasa	7.020.088.039.802,00	5.129.258.592.007,00
Beban Pemeliharaan	3.876.302.041.261,00	3.544.189.133.667,00
Beban Perjalanan Dinas	1.831.916.948.233,00	1.229.406.500.393,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	37.562.706.280,00	2.377.920.830,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.124.113.217.272,00	12.452.897.769.477,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	218.266.829.206,00	14.986.611.289,00
Beban Lain-lain	0,00	122.266.000,00
JUMLAH BEBAN	31.715.378.321.838,00	26.126.883.160.422,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23.705.072.060.044,00)	(18.983.562.276.449,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(65.421.999.722,00)	(132.151.058.341,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.935.884.216,00	5.791.068.971,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	74.357.883.938,00	137.942.127.312,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.048.368.953,00	(85.881.696.811,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.435.191.318.765,00	857.311.225.528,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.108.142.949.812,00	943.192.922.339,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	261.626.369.231,00	(218.032.755.152,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)

Jakarta, 2019

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
DAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Des-18	31-Des-17
EKUITAS AWAL	227.904.867.901.435,00	203.339.539.420.851,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(4.516.872.236.513,00)	8.846.624.317.059,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	0,00	238.591.012,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	25.447.343.829,00	88.374.085.667,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI LAIN-LAIN	(4.528.275.918.526,00) (14.043.661.816,00)	9.235.473.317.923,00 (477.461.677.543,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	40.767.484.647.307,00	34.920.299.195.126,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	12.807.166.719.981,00	24.565.328.480.584,00
EKUITAS AKHIR	240.712.034.621.416,00	227.904.867.901.435,00

Jakarta,

2019

MENTERI PERHUBUNGAN



BUDI KARYA SUMADI

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.

A.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015 – 2019

1. VISI DAN MISI

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah *“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui Tujuh Misi Pembangunan, yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. SASARAN

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015 - 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:
 - 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
 - 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

- b. Pelayanan Transportasi
Aspek pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
 - 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
 - 5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
 - 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
 - 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

- c. Kapasitas Transportasi
Aspek kapasitas transportasi, meliputi :
 - 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
 - 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
 - 3) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
 - 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
 - 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan linearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan sembilan agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung sembilan agenda prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A.1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai

dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi tiga aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan tujuh sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan lima sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

A.1.3. UNIT KERJA DAN JUMLAH SATKER

Kementerian Perhubungan terdiri atas sembilan Unit Eselon I, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal:
Sekretariat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Inspektorat Jenderal:
Inspektorat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan:
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.
- i. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi :
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

**Tabel A.1. Rincian Jumlah Satker
pada Masing-Masing Eselon I**

No.	Unit Eselon I	Jumlah Satuan Kerja
1.	Sekretariat Jenderal	19
2.	Inspektorat Jenderal	1
3.	Ditjen Perhubungan Darat	32
4.	Ditjen Perhubungan Laut	330
5.	Ditjen Perhubungan Udara	173
6.	Ditjen Perkeretaapian	14
7.	Badan Litbang Perhubungan	5
8.	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	32
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1
JUMLAH TOTAL		607

Termasuk di dalam jumlah Satker pada Kementerian Perhubungan di atas adalah 33 (tiga puluh tiga) satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) Satker di bawah Unit Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan 10 (sepuluh) Satker di bawah Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Udara.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Perhubungan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 2) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 4) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Tabel A.2. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100

- 5) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- 7) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 2) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel A.4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Perhubungan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1. Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Semula dan Setelah Revisi

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	
	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.576.166.117.000,00	9.011.742.415.000,00
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah Pendapatan	6.576.166.117.000,00	9.011.742.415.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	3.964.948.403.000,00	4.158.278.036.000,00
Belanja Barang	16.504.467.285.000,00	16.599.668.087.000,00
Belanja Modal	27.168.505.727.000,00	32.663.465.945.000,00
Jumlah Belanja	47.637.921.415.000,00	53.421.412.068.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program-program Kementerian Perhubungan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Uraian Pagu Anggaran Semula dan Setelah Revisi Berdasarkan Program

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN PROGRAM	31 Desember 2018	
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
01.01	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhub	580.135.964.000,00	580.135.964.000,00
01.03	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	106.110.822.000,00	106.110.822.000,00
01.04	Prog Penelitian dan Pengembangan Kemenhub	117.023.799.000,00	143.830.906.000,00
01.05	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	3.061.691.275.000,00	3.161.625.294.000,00
01.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	4.654.860.676.000,00	4.874.530.072.000,00
01.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	8.741.500.585.000,00	8.756.332.331.000,00
01.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	10.325.034.698.000,00	10.229.830.004.000,00

KODE	URAIAN PROGRAM	31 Desember 2018	
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI
01.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	7.892.647.537.000,00	7.922.850.089.000,00
01.10	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	204.744.255.000,00	204.744.255.000,00
02.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	1.542.756.195.000,00	2.042.556.195.000,00
02.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	870.656.951.000,00	3.680.943.418.000,00
04.05	Program Pengembangan SDM Perhubungan	37.063.632.000,00	37.253.132.000,00
04.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	2.400.000.000,00	81.200.195.000,00
04.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	503.218.560.000,00	500.000.000.000,00
04.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	852.277.550.000,00	852.808.819.000,00
06.05	Program Pengembangan SDM Perhubungan	1.296.033.036.000,00	1.448.198.860.000,00
06.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	386.258.643.000,00	402.039.454.000,00
09.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
11.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	0,00	6.853.541.000,00
19.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	7.000.000.000.000,00	8.377.568.717.000,00
Total Belanja		48.186.414.178.000,00	53.421.412.068.000,00

Realisasi
Pendapatan
Rp8,21 triliun

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.213.943.878.927,00 atau mencapai 91,15% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.011.742.415.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
PNBP Non BLU			
1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	362.700.414.092,00	32.492.373.952,00	8,96
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	78.563.131.000,00	101.480.009.436,00	129,17
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	94.460.609.000,00	15.386.757.113,00	16,29
4. Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	6.799.198.238.908,00	6.319.607.942.481,00	92,95
5. Pendapatan Jasa Lainnya	300.000.000,00	1.972.385.146,00	657,46
6. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	365.382.510,00	-
7. Pendapatan Denda	-	37.170.915.717,00	-
8. Pendapatan Lain-lain	-	263.687.475.537,00	-
Total PNBP Non BLU	7.335.222.393.000,00	6.772.163.241.892,00	92,32
PNBP BLU			
9. Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.586.793.184.000,00	1.217.983.107.235,00	76,76
10. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	40.083.900.000,00	112.728.067.514,00	281,23
11. Pendapatan dari Alokasi APBN	12.540.048.000,00	51.913.320.615,00	413,98
12. Pendapatan BLU Lainnya	37.102.890.000,00	59.156.141.671,00	159,44
Total PNBP BLU	1.676.520.022.000,00	1.441.780.637.035,00	86,00
JUMLAH	9.011.742.415.000,00	8.213.943.878.927,00	91,15

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai 91,15% dari estimasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pencapaian pendapatan pada Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan. Penyebab belum tercapainya target pendapatan tersebut antara lain:

1. Ditjen Perhubungan Laut
 - a. Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Kenavigasian karena dihapuskannya pemungutan PNBP Jasa Kenavigasian untuk pelayaran perintis, dan masih belum optimalnya pemungutan PNBP dari jasa *mastercable* (telegram radio).
 - b. Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Kepelabuhanan antara lain disebabkan:
 - Belum optimalnya PNBP dari Jasa Penggunaan Perairan dari Tersus/TUKS karena terkendala dalam pemungutannya (yang belum ada izin, yang sudah ada izin tetapi tidak beroperasi,

dan yang tidak beroperasi) dan tidak akuratnya data menyangkut luasan perairan pada masing-masing Tersus dan TUKS;

- PNBP dari kegiatan konsesi Jasa Kepelabuhanan masih kurang optimal karena masih lemahnya pengawasan terhadap jumlah muatan barang dan kunjungan kapal dari penyelenggaraan pelabuhan setempat; dan
 - Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengerukan pada alur pelayaran yang mengalami pendangkalan.
- c. Tidak tercapainya PNBP dari Jasa Perkapalan disebabkan karena dampak penertiban terhadap pungutan PNBP Jasa Pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen sertifikasi perkapalan.

2. Ditjen Perhubungan Udara

- a. Tidak tercapainya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP) karena penyesuaian kenaikan tarif PJNP yang sebelumnya diprediksi dapat diberlakukan pada awal tahun 2018 baru dapat terealisasi pada akhir Juni 2018 dan dilakukan Konsesi Bidang Transportasi Jasa Kebandarudaraan secara bertahap;
- b. Belum diterimanya pendapatan konsesi dari PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero). Adapun dasar perjanjian konsesi adalah sebagai berikut :
- Surat Perjanjian konsesi Ditjen Perhubungan Udara dengan PT. AP I (Persero) tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nomor: HK.201.2/8/DRJU.KUM-2015; SP.333/HK.06.03/2015/DU dengan nilai konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun;
 - Surat Perjanjian konsesi Ditjen Perhubungan Udara dengan PT. AP II (Persero) tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nomor: HK.201.2/6/DRJU.KUM-2015; PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 dengan nilai konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan per tahun.

Ditjen Perhubungan Udara sesuai dengan rekomendasi BPK RI telah melakukan penagihan atas pendapatan konsesi kepada PT. Angkasa Pura I dan II. Jumlah piutang pendapatan konsesi posisi per 31 Desember 2018 yang belum disetor oleh PT. AP I (Persero) sebesar Rp101.029.639.471,00 dan PT. AP II (Persero) sebesar Rp113.254.462.105,00. Sedangkan yang telah disetorkan ke kas Negara oleh PT. AP II (Persero) sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor Transaksi Bank (NTB): 000000190974 dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN): 1D2A17QN8NG1KIUO.

3. Ditjen Perkeretaapian
 - a. Terbatasnya jumlah SDM / Tenaga Penguji sarana perkeretaapian saat ini;
 - b. Terbatasnya fasilitas pengujian sarana perkeretaapian;
 - c. PNBP terkait pengujian dan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan usulan dari pihak penyelenggara Sarana Perkeretaapian, namun seringkali objek yang disampaikan untuk diuji tidak berada di tempat sehingga menyulitkan tenaga penguji untuk menyelesaikan tugasnya;
 - d. PNBP terkait pengujian dan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan jumlah sarana/SDM yang akan dilakukan pengujian/sertifikasi;
 - e. PNBP terkait pengujian dan sertifikasi dilaksanakan berdasarkan masa berlaku sertifikat Sarana maupun SDM Perkeretaapian;
 - f. Penyelenggara prasarana Perkeretaapian saat ini hanya 1 (satu) yaitu P.T. Kereta Api (Persero);
 - g. Penerimaan dari *Track Access Charge* (TAC) masih rendah dikarenakan harus menunggu pembayaran *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) terlebih dahulu, sedangkan sebelum melakukan pembayaran diperlukan verifikasi dari tim IMO.

4. BPSDM Perhubungan
 - a. Adanya kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dengan dibiayai pagu Rupiah Murni (RM) sehingga mengurangi penerimaan dan kapasitas ruang diklat yang dibiayai dari dana masyarakat.
 - b. Pemberlakuan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW) 1978 Amandemen 2010 telah berakhir pada bulan Juli 2017;
 - c. Kondisi ekonomi makro terutama angkutan laut yang cenderung menurun;
 - d. Adanya pembatasan biaya Diklat dari APBD bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk mengirimkan peserta diklat teknis kepada BPSDMP;
 - e. Bermunculannya lembaga diklat swasta yang menyelenggarakan pelatihan sejenis yang dilakukan BPSDMP.

Nilai realisasi Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika untuk periode 31 Desember 2018 pada Kementerian Perhubungan cukup signifikan yaitu sebesar Rp6.319.607.942.481,00 atau sebesar 92,95% dari estimasinya yaitu sebesar Rp6.799.198.238.908,00. Adapun rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel B.4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Real
1.	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	97.639.289.000,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	505.500.000.000,00	938.634.625.000,00	185,68
3.	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ Track Access	1.236.677.350.000,00	902.206.837.845,00	72,95
4.	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.928.534.509.898,00	2.235.976.554.995,00	76,35
5.	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	598.000.428.510,00	546.487.879.104,00	91,39
6.	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	276.231.315.500,00	238.189.588.176,00	86,23
7.	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	390.064.389.000,00	340.402.580.151,00	87,27
8.	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	450.000.000.000,00	521.183.633.391,00	115,82
9.	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	241.000.023.000,00	508.431.394.795,00	210,97
10.	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	75.550.934.000,00	88.094.849.024,00	116,60
TOTAL		6.799.198.238.908,00	6.319.607.942.481,00	92,95

Realisasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya perubahan kode akun pendapatan tersebut, semula 423218 menjadi 42551X (Pendapatan Jasa Transportasi). Seluruh realisasi pendapatan 423218 telah direvisi ke akun 42551X.

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan jasa yang realisasinya paling signifikan adalah pendapatan Jasa Kepelabuhanan senilai Rp2.235.976.554.995,00 dan pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp938.634.625.000,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan Jasa Kepelabuhanan meningkat disebabkan adanya kenaikan pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan.
2. Realisasi Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meningkat secara signifikan disebabkan adanya penambahan mesin cetak dan SDM untuk penerbitan SRUT (Sertifikat Register Uji Tipe) pada Ditjen Perhubungan Darat.

Selain pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika, nilai pendapatan yang cukup signifikan diantaranya adalah pendapatan jasa layanan umum. Pendapatan jasa layanan umum pada periode 31 Desember 2018 pada Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp1.217.983.107.235,00 atau sebesar 76,76% dari estimasinya yaitu sebesar Rp1.586.793.184.000,00.

Adapun rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel B.5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Real
1.	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	30.729.650.000,00	10.840.502.900,00	35,28
2.	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.181.751.839.000,00	821.897.281.428,00	69,55
3.	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan	117.269.263.000,00	81.283.627.170,00	69,31
4.	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	255.074.407.000,00	301.504.866.353,00	118,20
5.	Pendapatan Penyediaan Barang	0,00	380.044.000,00	0,00
6.	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya	886.450.000,00	1.612.322.050,00	181,89
7.	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	1.081.575.000,00	464.463.334,00	42,94
	TOTAL	1.586.793.184.000,00	1.217.983.107.235,00	76,76

Berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum yang signifikan adalah Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan senilai Rp821.897.281.428,00 yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) satker BLU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pendapatan Jasa Bandar Udara pada 10 (sepuluh) satker BLU Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Satker BLU di lingkungan BPSDM yang menghasilkan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan terbesar berada pada BP2IP Barombong senilai Rp100.683.761.350,00, PIP Semarang senilai Rp92.931.035.766,00 dan BP3IP senilai Rp71.603.974.000,00;
2. Satker BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menghasilkan Pendapatan Jasa Bandar Udara terbesar adalah Bandara Sentani Jayapura senilai Rp90.253.774.092,00 dan Bandara Radin Inten II Lampung sebesar Rp54.386.271.090,00.

Rincian perbandingan realisasi PNBPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel B.6. Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	2018	2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	32.492.373.952,00	40.716.053.049,00	(8.223.679.097,00)	(20,20)
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	101.480.009.436,00	241.924.900,00	101.238.084.536,00	41,846
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	15.386.757.113,00	11.670.029.376,00	3.716.727.737,00	31,85
4. Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	6.319.607.942.481,00	5.577.146.986.628,00	742.460.955.853,00	13,31
5. Pendapatan Jasa Lainnya	1.972.385.146,00	-	1.972.385.146,00	-
6. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan	365.382.510,00	-	365.382.510,00	-
7. Pendapatan Denda	37.170.915.717,00	42.417.419.351,00	(5.246.503.634,00)	(12,37)
8. Pendapatan Lain-lain	263.687.475.537,00	333.277.780.207,00	(69.590.304.670,00)	(20,88)
9. Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.217.983.107.235,00	1.146.566.273.463,00	71.416.833.772,00	6,23
10. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	112.728.067.514,00	113.001.759.922,00	(273.692.408,00)	(0,24)
11. Pendapatan dari Alokasi APBN	51.913.320.615,00	-	51.913.320.615,00	-
12. Pendapatan BLU Lainnya	59.156.141.671,00	35.776.519.374,00	23.379.622.297,00	65,35
Jumlah	8.213.943.878.927,00	7.300.814.746.270,00	913.129.132.657,00	12,51

Rincian perbandingan realisasi PNBPN per Eselon I per 31 Desember 2018 diuraikan dalam **Lampiran B.1**.

Realisasi
Belanja
Rp45,08 triliun

B.2 BELANJA

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp45.075.741.354.758,00 atau 84,38% dari anggaran belanja sebesar Rp53.421.412.068.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 tersaji sebagai berikut :

Tabel B.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

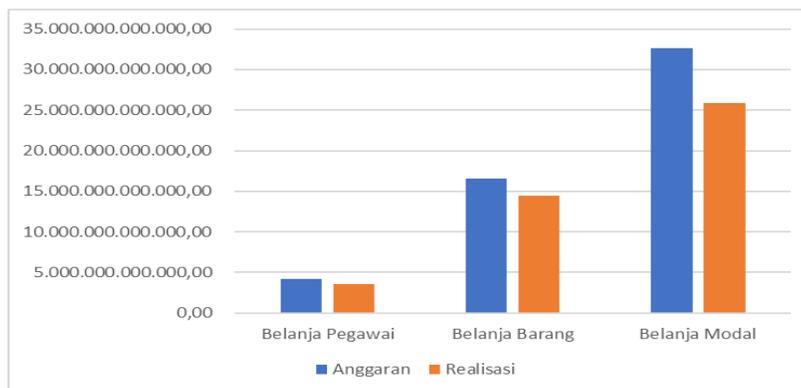
Uraian	31 Desember 2018		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.158.278.036.000,00	3.537.068.688.731,00	85,06
Belanja Barang	16.599.668.087.000,00	14.464.886.257.388,00	87,14
Belanja Modal	32.663.465.945.000,00	27.087.383.364.579,00	82,93
Total Belanja Kotor	53.421.412.068.000,00	45.089.338.310.698,00	84,40
Pengembalian Belanja	-	(13.596.955.940,00)	-
Total Belanja	53.421.412.068.000,00	45.075.741.354.758,00	84,38

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik B.1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel B.8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN PROGRAM	31 DESEMBER 2018		%
		ANGGARAN	REALISASI	
01.01	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhub	580.135.964.000,00	528.378.225.093,00	91,08
01.03	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	106.110.822.000,00	102.739.362.383,00	96,82
01.04	Prog Penelitian dan Pengembangan Kemenhub	143.830.906.000,00	131.259.025.838,00	91,26
01.05	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	3.161.625.294.000,00	2.875.640.325.443,00	90,95
01.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	4.874.530.072.000,00	4.403.762.892.426,00	90,34
01.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	8.756.332.331.000,00	8.345.449.527.012,00	95,31
01.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	10.229.830.004.000,00	8.673.163.784.335,00	84,78
01.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	7.922.850.089.000,00	7.332.966.253.707,00	92,55
01.10	Program Pengelolaan Transp. Jabodetabek	204.744.255.000,00	197.565.493.315,00	96,49
02.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	2.042.556.195.000,00	1.137.173.731.567,00	55,67
02.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	3.680.943.418.000,00	2.458.068.974.482,00	66,78
04.05	Program Pengembangan SDM Perhubungan	37.253.132.000,00	12.223.960.285,00	32,81
04.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	81.200.195.000,00	76.101.124.145,00	93,72
04.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	500.000.000.000,00	360.695.439.181,00	72,14

KODE	URAIAN PROGRAM	31 DESEMBER 2018		%
		ANGGARAN	REALISASI	
04.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	852.808.819.000,00	589.088.335.528,00	69,08
06.05	Program Pengembangan SDM Perhubungan	1.448.198.860.000,00	1.069.726.169.635,00	73,87
06.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	402.039.454.000,00	310.471.015.017,00	77,22
09.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	12.000.000.000,00	10.552.212.268,00	87,94
11.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	6.853.541.000,00	4.445.742.862,00	64,87
19.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	8.377.568.717.000,00	6.456.269.760.236,00	77,07
Total Belanja		53.421.412.068.000,00	45.075.741.354.758,00	84,38

Tabel B.9. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Pegawai	3.535.208.820.295,00	3.034.278.286.490,00	500.930.533.805,00	16,51
Belanja Barang	14.458.084.323.975,00	11.020.238.052.613,00	3.437.846.271.362,00	31,20
Belanja Modal	27.082.448.210.488,00	27.351.001.026.526,00	(268.552.816.038,00)	(0,98)
Jumlah	45.075.741.354.758,00	41.405.517.365.629,00	3.670.223.989.129,00	8,86

Prosentase realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah 84,38% dan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 86,37%. Pencapaian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp45.075.741.354.754,00 masih lebih tinggi 8,86% dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp41.405.517.365.629,00. Beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi kurang optimal antara lain :

- Terdapat kegiatan yang masih menjadi catatan halaman IV DIPA (blokir);
- Terdapat perubahan design dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang menyebabkan tertundanya pekerjaan;
- Terdapat permasalahan lahan;
- Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena lelang gagal;
- Terdapat pekerjaan yang melibatkan ijin instansi lain sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan;
- Kegiatan yang dibiayai *multi years contract* baru memperoleh persetujuan menjelang akhir tahun anggaran.

Belanja Pegawai
Rp3,54 triliun

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.535.208.820.295,00 dan Rp3.034.278.286.490,00 atau terjadi kenaikan sebesar 16,51%. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dirinci dalam tabel berikut.

**Tabel B.10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2018	REALISASI PER 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.834.227.234.589,00	2.064.330.926.521,00	(230.103.691.932,00)	(11,15)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	138.886.500,00	-	138.886.500,00	-
Belanja Honorarium	-	607.545.000,00	(607.545.000,00)	(100,00)
Belanja Lembur	82.306.930.950,00	67.651.549.286,00	14.655.381.664,00	21,66
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	1.620.395.636.692,00	911.105.119.451,00	709.290.517.241,00	77,85
Jumlah Belanja Kotor	3.537.068.688.731,00	3.043.695.140.258,00	493.373.548.473,00	16,21
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.859.868.436,00)	(9.416.853.768,00)	7.556.985.332,00	(80,25)
Jumlah Belanja	3.535.208.820.295,00	3.034.278.286.490,00	500.930.533.805,00	16,51

Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.2**.

Belanja Barang
Rp14,46 triliun

B.2.2 Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.458.084.323.975,00 dan Rp11.020.238.052.613,00. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 31,20%. Perbandingan realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel B.11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Barang Operasional	1.541.191.813.711,00	1.586.633.116.746,00	(45.441.303.035,00)	(2,86)
Belanja Barang Non Operasional	4.111.387.468.636,00	2.279.855.819.625,00	1.831.531.649.011,00	80,34
Belanja Barang Persediaan	331.117.577.958,00	211.150.488.548,00	119.967.089.410,00	56,82
Belanja Jasa	863.098.439.861,00	674.563.888.287,00	188.534.551.574,00	27,95
Belanja Pemeliharaan	3.933.390.735.837,00	3.223.761.334.733,00	709.629.401.104,00	22,01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.714.306.645.056,00	1.156.217.164.240,00	558.089.480.816,00	48,27
Belanja Perjalanan Luar Negeri	63.829.409.142,00	45.763.893.763,00	18.065.515.379,00	39,48
Belanja Barang BLU	1.154.928.674.673,00	1.034.428.725.916,00	120.499.948.757,00	11,65
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	706.586.286.572,00	811.730.256.753,00	(105.143.970.181,00)	(12,95)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	45.049.205.942,00	24.529.900.046,00	20.519.305.896,00	83,65
Jumlah Belanja Kotor	14.464.886.257.388,00	11.048.634.588.657,00	3.416.251.668.731,00	30,92
Pengembalian Belanja	(6.801.933.413,00)	(28.396.536.044,00)	21.594.602.631,00	(76,05)
Jumlah Belanja	14.458.084.323.975,00	11.020.238.052.613,00	3.437.846.271.362,00	31,20

Rincian perbandingan realisasi belanja barang per 31 Desember 2018 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.3**.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang yang nilainya signifikan adalah sebagai berikut :

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, honor yang terkait dengan operasional satker serta belanja langganan daya dan jasa, dan sebagainya.

Tabel B.12. Uraian Jenis Belanja Barang Operasional

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
Belanja Barang Operasional				
A Belanja Keperluan Perkantoran	608.585.301.416,00	497.441.328.397,00	111.143.973.019,00	22,34
B Belanja Pengadaan Bahan Makanan	73.703.123.202,00	70.802.765.588,00	2.900.357.614,00	4,10
C Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.994.635.348,00	27.742.828.514,00	16.251.806.834,00	58,58

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
D Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.274.129.097,00	6.871.170.561,00	402.958.536,00	5,86
E Belanja Honor Operasional Satker	162.322.707.112,00	158.297.563.164,00	4.025.143.948,00	2,54
F Belanja Barang Operasional Lainnya	645.010.753.809,00	825.477.460.522,00	(180.466.706.713,00)	(21,86)
G Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	301.163.727,00	-	301.163.727,00	-
Jumlah Belanja Kotor	1.541.191.813.711,00	1.586.633.116.746,00	(45.441.303.035,00)	(2,86)
Pengembalian Belanja	(311.750.018,00)	(4.548.122.193,00)	4.236.372.175,00	(93,15)
Jumlah Belanja Bersih	1.540.880.063.693,00	1.582.084.994.553,00	(41.204.930.860,00)	(2,60)

Dari rincian jenis belanja operasional pada tabel di atas, nilai belanja barang operasional lainnya merupakan nilai yang paling signifikan yaitu sebesar Rp645.010.753.809,00. Atas nilai belanja barang operasional lainnya tersebut, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp42.945.196,00 sehingga realisasi bersih belanja barang operasional lainnya adalah sebesar Rp644.967.808.613,00 (*netto*). Dari nilai tersebut yang terbesar terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp124.725.938.645,00 dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp351.905.953.064,00.

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Tabel B.13. Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
Belanja Barang Non Operasional				
A Belanja Bahan	302.677.853.155,00	143.873.950.362,00	158.803.902.793,00	110,38
B Belanja Barang Transito	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
C Belanja Honor Output Kegiatan	501.135.976.849,00	295.397.999.541,00	205.737.977.308,00	69,65
D Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	4.533.138,00	76.032.262,00	(71.499.124,00)	(94,04)
E Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.294.124.095.244,00	1.840.507.237.460,00	1.453.616.857.784,00	78,98
F Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	13.443.810.250,00	-	13.443.810.250,00	-
Jumlah Belanja Kotor	4.111.387.468.636,00	2.279.855.819.625,00	1.831.531.649.011,00	80,34
Pengembalian Belanja	(4.264.896.496,00)	(6.212.093.835,00)	1.947.197.339,00	(31,35)
Jumlah Belanja Bersih	4.107.122.572.140,00	2.273.643.725.790,00	1.833.478.846.350,00	80,64

Dari rincian jenis belanja non operasional pada tabel di atas, nilai belanja barang non operasional lainnya merupakan nilai yang paling signifikan yaitu sebesar Rp3.294.124.095.244,00. Atas nilai belanja barang non operasional lainnya tersebut, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp3.883.208.890,00 sehingga realisasi bersih belanja barang non operasional lainnya adalah sebesar Rp3.290.240.886.354,00. Adapun realisasi belanja barang non operasional lainnya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp1.506.202.519.832,00 pada 83 (delapan puluh tiga) satker. Realisasi terbesar pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat senilai Rp815.204.897.098,00 berupa belanja penyelenggaraan angkutan kapal ternak, penyelenggaraan angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut oleh PT Peln dan Swasta, Mobilisasi KM Sabuk Nusantara 46, dan penyelenggaraan mudik gratis dengan Kapal Laut.

Belanja Barang dalam rangka penyelenggaraan kewajiban publik untuk angkutan barang di Laut (Tol Laut) pada Ditjen Perhubungan Laut memiliki nilai kontrak sebesar Rp358.372.779.599,00 dan realisasi kontrak sebesar Rp297.936.999.968,00 (83,14%). Trayek subsidi Tol Laut untuk Tahun 2018 terdiri dari 18 trayek (11 trayek oleh BUMN dan 7 trayek oleh Swasta). Rincian realisasi barang non operasional untuk subsidi tol laut dapat dilihat pada **Lampiran B.4.**

Selain melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, Ditjen Perhubungan Laut juga melaksanakan kegiatan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan perintis di bidang perhubungan laut dengan nilai kontrak pada Tahun 2018 sebesar Rp1.043.311.900.648,00 dan realisasi kontrak subsidi perintis sebesar Rp872.273.942.923,00 (83,61%). Subsidi angkutan perintis Tahun 2018 dilaksanakan pada 41 (empat puluh satu) Pelabuhan Pangkal dengan trayek sebanyak 113 (seratus tiga belas) terdiri dari 46 (empat puluh enam) trayek merupakan penugasan kapal PT Peln dan 67 (enam puluh tujuh) trayek penugasan kapal swasta. Rincian realisasi angkutan subsidi perintis Ditjen Perhubungan Laut sebagaimana pada **Lampiran B.5.**

- b. Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp699.454.368.303,00 pada 31 (tiga puluh satu) satker. Realisasi terbesar pada Direktorat Angkutan dan Multimoda senilai Rp444.363.317.996,00 berupa dukungan sarana bus pelaksanaan Asian Games dan Asian Paragames 2018, pembayaran Air Time Vessel Monitoring System kapal angkutan penyeberangan perintis, pengadaan VMS kapal angkutan penyeberangan perintis, subsidi Roro Long Distance Ferry, dan menunjang kegiatan mudik gratis lebaran, natal dan tahun baru, serta dukungan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF.

Belanja Barang subsidi operasional angkutan perintis pada Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari subsidi operasional angkutan bus perintis dan pengoperasian kapal penyeberangan perintis dengan total nilai kontrak sebesar Rp535.004.846.686,00 dan total realisasi kontraknya sebesar Rp505.580.669.180,00 (94,50%).

Belanja subsidi operasional angkutan bus perintis pada Tahun 2018 terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp80.814.764.142,00 dan realisasi kontraknya senilai Rp78.057.309.671,00 (96,59%). Sedangkan subsidi pengoperasian kapal penyeberangan perintis terdiri dari 152 (seratus lima puluh dua) kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp454.190.082.544,00 dan realisasi kontraknya senilai Rp427.523.359.509,00 (94,13%). Adapun rincian belanja barang subsidi perintis angkutan bus pada Ditjen Perhubungan Darat dapat dilihat pada **Lampiran B.6** dan subsidi angkutan kapal penyeberangan pada **Lampiran B.7**.

- c. Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp226.944.641.798,00 pada 14 (empat belas) Satker. Realisasi terbesar pada Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api senilai Rp160.939.017.777,00 berupa penyelenggaraan angkutan sepeda motor dengan kereta api pada masa lebaran dan subsidi penyelenggaraan angkutan KA Perintis bidang perkeretaapian. Subsidi angkutan perintis pada Ditjen Perkeretaapian Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan). Kereta Api Perintis dengan nilai kontrak Rp176.494.328.884,00 dan realisasi sebesar Rp129.837.750.717,00 (73,56%). Rincian realisasi belanja barang subsidi perintis pada Ditjen Perkeretaapian dapat dilihat pada **Lampiran B.8**.

B.2.2.3 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel B.14. Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
Belanja Pemeliharaan				
a Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	470.206.415.186,00	314.428.163.856,00	155.778.251.330,00	49,54
b Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.399.750.075,00	6.441.524.253,00	(3.041.774.178,00)	(47,22)
c Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.518.850.031,00	7.110.877.781,00	(592.027.750,00)	(8,33)
d Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	699.704.227.740,00	684.736.828.610,00	14.967.399.130,00	2,19
e Belanja BBM dan Pelumas Khusus Non Pertamina	607.677.650.043,00	204.092.715.265,00	403.584.934.778,00	197,75

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
			Jumlah	%
f Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	352.560.061.729,00	165.145.136.544,00	187.414.925.185,00	113,48
g Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.178.927.367,00	3.154.321.924,00	2.024.605.443,00	64,19
h Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.571.862.401.238,00	1.650.322.365.141,00	(78.459.963.903,00)	(4,75)
i Belanja Pemeliharaan Ingasi	38.921.600,00	25.900.000,00	13.021.600,00	50,28
j Belanja Pemeliharaan Jaringan	173.926.290.092,00	149.834.891.879,00	24.091.398.213,00	16,08
k Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	324.065.500,00	123.905.000,00	200.160.500,00	161,54
l Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	3.994.293.250,00	3.214.772.050,00	779.521.200,00	24,25
m Belanja Pemeliharaan Lainnya	37.998.881.986,00	35.129.932.430,00	2.868.949.556,00	8,17
Jumlah Belanja Kotor	3.933.390.735.837,00	3.223.761.334.733,00	709.629.401.104,00	22,01
Pengembalian Belanja	(90.910.359,00)	(1.948.510.386,00)	1.857.600.027,00	(95,33)
Jumlah Belanja Bersih	3.933.299.825.478,00	3.221.812.824.347,00	711.487.001.131,00	22,08

Realisasi belanja pemeliharaan yang paling signifikan adalah pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp1.571.862.401.238,00 dengan realisasi terbesar pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp1.459.298.676.124,00. Belanja pemeliharaan tersebut merupakan pekerjaan Perawatan Prasarana dan Pengoperasian Perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation / IMO*) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.459.371.555.387,00 dan terealisasi sebesar Rp1.459.298.676.124,00 (99,99%).

Biaya perawatan prasarana dan pengoperasian Perkeretaapian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kontrak dengan PT. Kereta Api Indonesia (kontrak IMO) dan yang berasal dari pagu Rupiah Murni sebagai pendukung IMO. Biaya perawatan prasarana dan pengoperasian Perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.156 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Untuk pelaksanaan pekerjaan Perawatan Prasarana dan Pengoperasian Perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation / IMO*) pada Tahun 2018 yang dikontrakan dengan PT. KAI memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.325.000.000.000,00 dan terealisasi 100%. Pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.1140 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan No. HK.207/SK/144/DJKA/7/15 tentang Standard Operating Procedure (SOP) / Prosedur Operasi Baku (POB) Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO).

Selain itu, selama tahun 2018 terdapat pekerjaan untuk mendukung kegiatan IMO yang berasal dari Rupiah Murni dengan total pagu anggaran sebesar Rp134.371.555.387,00 dan realisasinya sebesar Rp134.298.676.124,00 (99,95%) yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan jasa konsultansi, pengadaan bantalan beton, dan pengadaan bantalan kayu untuk daerah Jawa dan Sumatera;
- b. Pekerjaan Perawatan Perlintasan Sebidang Metode Perkerasan Lentur di Wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Sumatera;
- c. Kegiatan Pembongkaran Perlintasan Sebidang Tidak Resmi atau Liar Divre II Sumatera Barat;
- d. Pekerjaan Perawatan Pintu Perlintasan Sebidang;
- e. Pekerjaan Perbaikan Kestabilan Lereng Jalur Kereta Api dan Perbaikan Tubuh Baan Labil beserta supervisinya;
- f. Pekerjaan Perbaikan Korektif Jalan Rel beserta supervisinya;
- g. Pekerjaan Konstruksi Jembatan Darurat Kereta Api; dan
- h. Penggantian Biaya Rintang Jalan.

B.2.2.4 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja perjalanan dalam negeri merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah. Pada Kementerian Perhubungan belanja perjalanan dalam negeri per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.712.755.083.756,00. Realisasi belanja tersebut yang signifikan terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Laut senilai Rp447.114.069.873,00 dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp349.892.802.870,00. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel B.15. Uraian Jenis Belanja Perjalanan Dalam Negeri

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja		Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri					
A	Belanja Perjalanan Biasa	1.299.268.447.138,00	899.828.058.407,00	399.440.388.731,00	44,39
B	Belanja Perjalanan Tetap	24.966.757.511,00	2.461.821.329,00	22.504.936.182,00	914,16
C	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.617.487.140,00	19.700.945.650,00	1.916.541.490,00	9,73
D	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.787.868.537,00	37.860.487.262,00	22.927.381.275,00	60,56
E	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	307.666.084.730,00	196.365.851.592,00	111.300.233.138,00	56,68
Jumlah Belanja Kotor		1.714.306.645.056,00	1.156.217.164.240,00	558.089.480.816,00	48,27
Pengembalian Belanja		(1.551.561.300,00)	(4.388.392.301,00)	2.836.831.001,00	(64,64)
Jumlah Belanja Bersih		1.712.755.083.756,00	1.151.828.771.939,00	560.926.311.817,00	48,70

Belanja Modal
Rp27,08 triliun

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.082.448.210.488,00 dan Rp27.351.001.026.526,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 0,98% dari Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Modal disajikan sebagai berikut:

**Tabel B.16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Tanah	490.494.184.026,00	795.550.776.935,00	(305.056.592.909,00)	(38,35)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.907.461.212.626,00	7.230.315.344.363,00	(3.322.854.131.737,00)	(45,96)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.440.120.124.815,00	2.099.851.382.851,00	2.340.268.741.964,00	111,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.283.495.134.252,00	16.171.317.923.494,00	1.112.177.210.758,00	6,88
Belanja Modal Lainnya	739.152.914.814,00	860.540.438.200,00	(121.387.523.386,00)	(14,11)
Belanja Modal BLU	226.659.794.046,00	215.199.107.102,00	11.460.686.944,00	5,33
Jumlah Belanja Modal Bruto	27.087.383.364.579,00	27.372.774.972.945,00	(285.391.608.366,00)	(1,04)
Pengembalian Belanja Modal	(4.935.154.091,00)	(21.773.946.419,00)	16.838.792.328,00	(77,33)
Jumlah Belanja Modal Netto	27.082.448.210.488,00	27.351.001.026.526,00	(268.552.816.038,00)	(0,98)

Rincian perbandingan realisasi belanja modal per 31 Desember 2018 per Eselon I diuraikan dalam **Lampiran B.9**.

Belanja Modal
Tanah Rp490,08
miliar

B.2.4.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp490.081.219.163,00 dan Rp795.174.518.435,00. Realisasi Belanja Modal Tanah mengalami penurunan sebesar 38,37% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut :

**Tabel B.17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Tanah	310.505.469.528,00	539.866.926.033,00	(229.361.456.505,00)	(42,48)
Belanja Modal Pembebasan Tanah	67.370.651.515,00	214.241.393.118,00	(146.870.741.603,00)	(68,55)
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	340.143.000,00	-	340.143.000,00	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	1.735.888.133,00	461.275.284,00	1.274.612.849,00	276,32
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	109.720.881.000,00	40.154.912.500,00	69.565.968.500,00	173,24
Belanja Modal Pengukuran Tanah	690.502.650,00	826.270.000,00	(135.767.350,00)	(16,43)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	130.648.200,00	-	130.648.200,00	-
Jumlah Belanja Kotor	490.494.184.026,00	795.550.776.935,00	(305.056.592.909,00)	(38,35)
Pengembalian Belanja Modal	(412.964.863,00)	(376.258.500,00)	(36.706.363,00)	9,76
Jumlah Belanja	490.081.219.163,00	795.174.518.435,00	(305.093.299.272,00)	(38,37)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp3,91 Triliun

B.2.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.907.081.133.388,00 dan Rp7.224.242.267.293,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 45,92% dibandingkan realisasi tahun 2017 antara lain karena penurunan signifikan pada Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel B.18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.881.265.564.777,00	7.193.448.601.751,00	(3.312.183.036.974,00)	(46,04)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	557.050.000,00	-	557.050.000,00	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	14.820.000,00	49.999.000,00	(35.179.000,00)	(70,36)
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	-	45.810.000,00	(45.810.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	-	1.324.542.474,00	(1.324.542.474,00)	(100,00)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	141.301.600,00	-	141.301.600,00	-
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	258.946.300,00	25.335.000,00	233.611.300,00	922,09
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	25.223.529.949,00	35.421.056.138,00	(10.197.526.189,00)	(28,79)
Belanja Modal BLU	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.907.461.212.626,00	7.230.315.344.363,00	(3.322.854.131.737,00)	(45,96)
Pengembalian	(380.079.238,00)	(6.073.077.070,00)	5.692.997.832,00	(93,74)
Jumlah Belanja	3.907.081.133.388,00	7.224.242.267.293,00	(3.317.161.133.905,00)	(45,92)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4,44 triliun

B.2.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.439.457.471.271,00 dan Rp2.098.597.789.340,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 111,54% dibandingkan TA 2017. Kenaikan realisasi belanja modal tersebut disebabkan karena naiknya pagu belanja modal Gedung dan Bangunan adanya pembangunan Gedung dan Bangunan baru serta pengembangan Gedung dan Bangunan yang sudah ada.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel B.19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.355.320.579.561,00	2.069.432.959.749,00	2.285.887.619.812,00	110,46
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	1.115.100.000,00	-	1.115.100.000,00	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	813.170.500,00	41.300.000,00	771.870.500,00	1.868,94
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	6.606.508.340,00	9.522.815.190,00	(2.916.306.850,00)	(30,62)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	740.217.100,00	311.345.000,00	428.872.100,00	137,75
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	75.524.549.314,00	20.542.962.912,00	54.981.586.402,00	267,64
Jumlah Belanja Kotor	4.440.120.124.815,00	2.099.851.382.851,00	2.340.268.741.964,00	111,45
Pengembalian Belanja Modal	(662.653.544,00)	(1.253.593.511,00)	590.939.967,00	(47,14)
Jumlah Belanja	4.439.457.471.271,00	2.098.597.789.340,00	2.340.859.681.931,00	111,54

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp17,28 triliun

B.2.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp17.283.027.934.873,00 dan Rp16.168.133.294.371,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,90% dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 terutama karena adanya kenaikan pengadaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel B.20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	13.114.404.334.459,00	12.582.612.086.678,00	531.792.247.781,00	4,23
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	1.181.616.264.920,00	677.590.926.975,00	504.025.337.945,00	74,38
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	2.013.438.600,00	62.502.000,00	1.950.936.600,00	3.121,40
Belanja Modal Irigasi	329.187.702.300,00	40.231.235.470,00	288.956.466.830,00	718,24
Belanja Modal Jaringan	2.648.463.157.973,00	2.825.950.346.371,00	(177.487.188.398,00)	(6,28)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	3.751.252.000,00	-	3.751.252.000,00	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	1.751.724.000,00	3.797.278.000,00	(2.045.554.000,00)	(53,87)
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	2.303.900.000,00	41.073.548.000,00	(38.769.648.000,00)	(94,39)
Jumlah Belanja Kotor	17.283.495.134.252,00	16.171.317.923.494,00	1.112.177.210.758,00	6,88
Pengembalian Belanja Modal	(467.199.379,00)	(3.184.629.123,00)	2.717.429.744,00	(85,33)
Jumlah Belanja	17.283.027.934.873,00	16.168.133.294.371,00	1.114.894.640.502,00	6,90

Belanja Modal
Lainnya
Rp737,26 miliar

B.2.4.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp737.259.786.814,00 dan Rp860.540.395.800,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 14,33% dibandingkan realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai realisasi Belanja Modal Lainnya. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut :

**Tabel B.21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Lainnya	738.952.928.314,00	860.540.438.200,00	(121.587.509.886,00)	(14,13)
Belanja Modal BLU	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	199.986.500,00	-	199.986.500,00	-
Jumlah Belanja Kotor	739.152.914.814,00	860.540.438.200,00	(121.387.523.386,00)	(14,11)
Pengembalian Belanja Modal	(1.893.128.000,00)	(42.400,00)	(1.893.085.600,00)	4.464.824,53
Jumlah Belanja	737.259.786.814,00	860.540.395.800,00	(123.280.608.986,00)	(14,33)

*Belanja Modal
BLU Rp225,54
miliar*

B.2.4.6 Belanja Modal Badan Layanan Umum

Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp225.540.664.979,00 dan Rp204.312.761.287,00. Belanja Modal BLU sampai dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,39% dibandingkan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2017. Secara umum peningkatan Belanja Modal Badan Layanan Umum karena adanya penambahan 2 (dua) satuan kerja Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hal ini secara otomatis meningkatkan pagu dan realisasi Belanja Badan Layanan Umum. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut :

**Tabel B.22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN)	
			JUMLAH	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	146.556.286.284,00	159.479.488.092,00	(12.923.201.808,00)	(8,10)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	42.711.447.097,00	48.452.225.390,00	(5.740.778.293,00)	(11,85)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	15.421.038.765,00	1.993.040.000,00	13.427.998.765,00	673,74
Belanja Modal Lainnya BLU	21.971.021.900,00	5.274.353.620,00	16.696.668.280,00	316,56
Belanja Modal BLU	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	226.659.794.046,00	215.199.107.102,00	11.460.686.944,00	5,33
Pengembalian Belanja Modal	(1.119.129.067,00)	(10.886.345.815,00)	9.767.216.748,00	(89,72)
Jumlah Belanja	225.540.664.979,00	204.312.761.287,00	21.227.903.692,00	10,39

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp9,74 triliun

C. 1. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp9.741.363.059.504,00 dan Rp8.373.325.541.990,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel C.1. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.703.397.121,00	7.929.652.381,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.381.754.969,00	1.241.057.661,00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	37.072.720.984,00	27.484.286.145,00
4	Kas pada BLU	868.613.894.298,00	737.030.441.915,00
5	Investasi Jangka Pendek - BLU	9.000.000.000,00	79.000.000.000,00
6	Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	13.232.318.730,00	12.247.000,00
7	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	656.668.774,00	199.145.435.459,00
8	Piutang Bukan Pajak	847.089.111.102,00	274.210.888.813,00
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	(266.148.929.509,00)	(22.455.062.296,00)
10	Bagian Lancar TP/TGR	0,00	149.580.000,00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	0,00	(747.900,00)
12	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	41.093.863.711,00	48.815.532.767,00
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(3.435.981.740,00)	(2.634.798.339,00)
14	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	2.218.441.992,00	1.348.210.637,00
15	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(155.990.517,00)	(9.469.928,00)
16	Persediaan	8.189.041.789.589,00	7.022.058.287.675,00
	TOTAL	9.741.363.059.504,00	8.373.325.541.990,00

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp1,70 miliar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.703.397.121,00 dan Rp7.929.652.381,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca dan sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel di bawah ini sedangkan rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Satker dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

Tabel C.2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	1.520.127.482,00	1.314.455.546,00	205.671.936,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	55.789.800,00	17.172.626,00	38.617.174,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	44.244.318,00	6.122.230.919,00	(6.077.986.601,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	83.190.521,00	73.800.000,00	9.390.521,00
6	Ditjen Perkeretaapian	0,00	0,00	0,00
7	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	45.000,00	401.993.290,00	(401.948.290,00)
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00
	Total	1.703.397.121,00	7.929.652.381,00	(6.226.255.260,00)

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp1,38 miliar

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) sebesar Rp1.381.754.969,00 dan Rp1.241.057.661,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo kas di Bendahara Penerimaan per Satker dapat dilihat pada **Lampiran C.2**. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.3 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I
(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Darat	15.833.700,00	29.099.650,00	(13.265.950,00)
2	Ditjen Perhubungan Laut	879.053.224,00	1.147.904.011,00	(268.850.787,00)
3	Ditjen Perhubungan Udara	486.868.045,00	56.760.000,00	430.108.045,00
4	BPSDM Perhubungan	0,00	7.294.000,00	(7.294.000,00)
	Total	1.381.754.969,00	1.241.057.661,00	140.697.308,00

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp37,02 miliar

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp37.072.720.984,00 dan Rp27.484.286.145,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut:

**Tabel C.4 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*)**

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	199.146.266,00	478.089.088,00
2	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	3.314.340.208,00	1.335.036.855,00
3	Kas Lainnya di BLU	33.559.233.810,00	25.671.160.202,00
4	Setara Kas Lainnya	700,00	0,00
	Total	37.072.720.984,00	27.484.286.145,00

Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja sebagaimana berikut:

**Tabel C.5 Rincian Saldo Kas Lainnya
di Bendahara Pengeluaran Per Satker**

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Mahkamah Pelayaran	43.662,00
2	UPP Tahuna	171.687.601,00
3	KSOP Muntok	320.250,00
4	UPP Baranusa	16.830.000,00
5	UPP Korido	9.325.000,00
6	UPBU Tojo Una-Una	936.750,00
7	UPBU Moanamani	3.000,00
8	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	2,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1,00
	Total	199.146.266,00

Saldo Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah sebesar Rp3.314.340.208,00 pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan saldo rekening hibah *Aids Navigation Fund* (ANF) untuk kegiatan bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (*maintenance and replacement of aids to navigation in the Strait of Malacca*) pada Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat.

Saldo Kas Lainnya di BLU senilai Rp33.559.233.810,00 merupakan saldo yang terdapat pada rekening Dana Kelolaan Satker BLU yang belum menjadi hak Satker BLU dan masih menjadi pendapatan diterima dimuka yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Saldo Setara Kas Lainnya sebesar Rp700,00 terdapat pada KSOP Sorong. Rincian saldo kas lainnya dan setara kas dapat dilihat pada **Lampiran C.3.**

Kas pada BLU
Rp868,61 miliar

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp868.613.894.298,00 dan Rp737.030.441.915,00. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan pada 33 (tiga puluh tiga) Satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut dan rincian per Satker dapat dilihat pada **Lampiran C.4.**

Tabel C.6 Saldo Kas BLU per Satker BLU
Per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*)
(dalam Rupiah)

No	Nama satker	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
1	STIP JAKARTA	57.247.620.055,00	21.440.155.589,00
2	BP3IP JAKARTA	102.361.955.405,00	110.766.064.936,00
3	PIP SEMARANG	65.979.688.823,00	72.859.475.411,00
4	PIP MAKASSAR	31.378.543.459,00	19.948.037.634,00
5	PKTJ TEGAL	27.936.514.248,00	19.123.537.246,00
6	ATKP SURABAYA	32.777.373.933,00	37.572.203.338,00
7	POLTEPEL SURABAYA	62.706.611.838,00	107.467.830.797,00
8	ATKP MAKASSAR	22.526.579.357,00	15.498.127.833,00
9	STPI CURUG	2.497.955.320,00	40.919.549,00
10	BP2IP BAROMBONG	49.883.588.429,00	68.558.884.715,00
11	BP2IP MAUK TANGERANG	10.462.016.984,00	9.933.699.639,00
12	API MADIUN	7.985.567.654,00	8.599.593.014,00
13	STTD BEKASI	30.290.461.716,00	14.800.591.579,00
14	ATKP MEDAN	20.306.680.634,00	14.655.835.263,00
15	BP3 JAYAPURA	3.153.123.457,00	2.093.931.624,00
16	BP2TD BALI	2.944.910.094,00	1.980.116.252,00
17	BP2IP SORONG	4.965.681.892,00	3.414.764.359,00
18	BP2TD PALEMBANG	1.110.437.100,00	761.270.595,00
19	BP2TL JAKARTA	3.239.269.502,00	1.214.241.491,00

No	Nama satker	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
20	BP2IP MALAHAYATI ACEH	11.406.845.026,00	8.336.453.659,00
21	BP3 CURUG	3.657.098.719,00	2.384.985.730,00
22	BP3 BANYUWANGI	7.820.529.460,00	7.202.961.192,00
23	BP3 PALEMBANG	3.125.715.359,00	1.293.917.379,00
24	UPBU H.A.S HANANDJOEDDIN TANJUNG PANDAN	8.624.909.100,00	27.754.766.303,00
25	UPBU RADIN INTEN LAMPUNG	37.288.596.982,00	102.235.419.869,00
26	UPBU JUWATA TARAKAN	10.621.718.483,00	18.799.517.759,00
27	UPBU JALALUDIN GORONTALO	10.746.904.644,00	4.735.552.803,00
28	UPBU MUTIARA PALU	17.155.324.069,00	6.462.098.510,00
29	UPBU SENTANI JAYAPURA	11.305.711.262,00	9.313.170.331,00
30	UPBU FATMAWATI	16.509.189.058,00	11.532.349.939,00
31	UPBU KALIMARAU TANJUNG REDEB	926.065.778,00	6.249.967.577,00
32	BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	49.139.467.568,00	-
33	BALAI KALIBRASI FASILITAS P	140.531.238.890,00	-
TOTAL		868.613.894.298,00	737.030.441.915,00

Investasi Jangka
Pendek BLU
Rp9,00 miliar

C.1.5. Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2018 (Audited) dan 31 Desember 2017 (Audited) masing-masing sebesar Rp9.000.000.000,00 dan Rp79.000.000.000,00. Investasi Jangka Pendek Satker BLU ini berjangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan dengan sifat deposito diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).

Rincian investasi jangka pendek pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut dan rincian per Satker dapat dilihat pada **Lampiran C.5**.

**Tabel C.7 Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
Per 31 Desember 2018 (Audited)**

(dalam Rupiah)

NO	SATKER	REKENING	31 Desember 2018 (Audited)
1	Balai Kesehatan Penerbangan	Bank Bukopin No Rek 2481600414 suku bunga 7%	9.000.000.000,00
Jumlah Deposito/Investasi Jangka Pendek			9.000.000.000,00

Belanja Dibayar
Dimuka Rp13,23
miliar

C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 (Audited) dan 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebesar Rp13.232.318.730,00 dan Rp12.247.000,00 merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan atau perjanjian. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) adalah sebagai berikut :

**Tabel C.8 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Per 31 Desember 2018 (Audited) dan 31 Desember 2017 (Audited)**

(dalam Rupiah)

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	Inspektorat Jenderal	760.529.000,00	0,00	760.529.000,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	11.653.651.334,00	0,00	11.653.651.334,00
3	Ditjen Perkeretaapian	561.275.000,00	0,00	561.275.000,00
4	BPSDM Perhubungan	256.863.396,00	12.247.000,00	244.616.396,00
	Total	13.232.318.730,00	12.247.000,00	13.220.071.730,00

Mutasi Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel C.9 Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Inspektorat Jenderal	0,00	760.529.000,00	0,00	760.529.000,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	0,00	11.653.651.334,00	0,00	11.653.651.334,00
3	Ditjen Perkeretaapian	0,00	561.275.000,00	0,00	561.275.000,00
4	BPSDM Perhubungan	12.247.000,00	412.238.813,00	167.622.417,00	256.863.396,00
	Total	12.247.000,00	13.387.694.147,00	167.622.417,00	13.232.318.730,00

Penjelasan atas Mutasi Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

1. Pada Inspektorat Jenderal merupakan beban sewa gedung kantor bulan Januari tahun 2019 yang sudah dibayar di tahun 2018.
2. Pada Ditjen Perhubungan Udara yaitu pada 2 (dua) Satker yakni pada Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp.1.474.742.500 yang merupakan Sewa Ruang Gedung Kantor Bagian Keuangan (Lantai 1) dan Bagian Perencanaan (Lantai 3) di Gedung Graha Elizabeth Jakarta sesuai surat Perjanjian Kontrak Sewa Nomor: KTR.50/Keu-SRK/PPK/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 antara Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara dengan PT. Cipta Artha Victory dan Direktorat Navigasi Penerbangan sebesar Rp10.178.908.834,00 yang merupakan Sewa Gedung Perkantoran beserta kelengkapannya sesuai Surat Perjanjian Kontrak Sewa Nomor: 01/SP/PL/DNP/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 antara Direktorat Navigasi Penerbangan dengan PT. Sainath Realindo Gedung Sainath Tower .
3. Pada Ditjen Perkeretaapian merupakan pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan untuk bulan Januari dan Februari 2019 senilai Rp561.275.000 pada Satker Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian.
4. Mutasi tambah pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp412.238.813,00 terdapat pada Satker Politeknik Penerbang Surabaya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3)

Banyuwangi, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp167.622.417,00 terdapat pada Politeknik Penerbang Surabaya. Belanja dibayar dimuka tersebut merupakan Asuransi kesehatan peserta diklat untuk periode 2019.

*Pendapatan
Yang Masih
Harus Diterima
Rp656,67 juta*

C.1.7. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp656.668.774,00 dan Rp199.145.435.459,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih (belum jatuh tempo).

Tabel C.10 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	27.751.500,00	0,00	27.751.500,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	378.852.756,00	199.000.313.541,00	(198.621.460.785,00)
3	BPSDM Perhubungan	250.064.518,00	145.121.918,00	104.942.600,00
	Total	656.668.774,00	199.145.435.459,00	(198.488.766.685,00)

Penjelasan atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp656.668.774,00 merupakan pengakuan atas pendapatan sewa gedung dan bangunan yang belum dilakukan penagihan/pembayaran dari bulan Juni s.d. Desember 2018 sebesar Rp27.751.500,00 pada Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal (Biro Umum).

Pendapatan yang masih harus diterima pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp378.852.756,00 yaitu pada Satker UPBU DC. Saudale Rote sebesar Rp32.581.800,00 dan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Rp346.270.956,00.

Pendapatan yang masih harus diterima pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp250.064.518,00 terdapat pada Satker BP3IP Jakarta sebesar Rp88.764.518,- yang merupakan pendapatan *fee* yang masih harus diterima dari kerjasama STMT Trisakti dan PIP Semarang sebesar Rp161.300.000,- yang merupakan bunga deposito yang belum dibayarkan sampai dengan per 31 Desember 2018.

Rincian Mutasi Pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai berikut :

Tabel C.11 Mutasi Pendapatan yang masih harus diterima

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Sekretaris Jenderal	0,00	27.751.500,00	0,00	27.751.500,00
2	BPSDM Perhubungan	145.121.918,00	261.106.988,00	156.164.388,00	250.064.518,00
3	Ditjen Perhubungan Udara	199.000.313.541,00	-	198.621.460.785,00	378.852.756,00
	Total	199.145.435.459,00	288.858.488,00	198.777.625.173,00	656.668.774,00

Piutang Bukan Pajak
Rp847,09 miliar

C.1.8. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp847.089.111.102,00 dan Rp274.210.888.813,00 yang merupakan semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan berikut :

Tabel C.12 Piutang Bukan Pajak Menurut Jenisnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)
1	Piutang PNBPN	614.286.321.082,00	229.244.375.470,00
2	Piutang Lainnya	232.802.790.020,00	44.966.513.343,00
	Jumlah	847.089.111.102,00	274.210.888.813,00

Tabel C.13 Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretaris Jenderal	366.115.941,00	0,00	366.115.941,00
2	Ditjen Perhubungan Darat	1.548.781.652,00	15.208.265.514,00	(13.659.483.862,00)
3	Ditjen Perhubungan Laut	53.228.907.851,00	25.960.157.637,00	27.268.750.214,00
4	Ditjen Perhubungan Udara	595.040.894.051,00	172.886.158.690,00	422.154.735.361,00
5	Ditjen Perkeretaapian	188.761.194.283,00	37.340.790.688,00	151.420.403.595,00
6	Badan Litbang Perhubungan	619.100.000,00	0,00	619.100.000,00
7	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	7.524.117.324,00	22.262.366.284,00	(14.738.248.960,00)
8	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	553.150.000,00	(553.150.000,00)
	Total	847.089.111.102,00	274.210.888.813,00	572.878.222.289,00

Penjelasan Piutang Bukan Pajak sebagai berikut :

- Pada Kantor Pusat Sekretariat Jenderal (Biro Umum) terdiri dari :
 - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp308.658,00 yang berasal dari Sewa Rumah Dinas di Jatiwaringin yang sampai hari ini masih dilakukan penagihan.
 - Piutang lainnya sebesar Rp365.807.283,00 yang berasal dari Satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal (Biro Umum), Pusat Teknologi Informasi & Komunikasi dan, Biro Perencanaan yang merupakan pengakuan piutang lainnya atas pengembalian belanja barang dan modal tahun 2018 yang dibayarkan pada tahun 2019.
- Pada Ditjen Perhubungan Darat merupakan Piutang Lainnya dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel C.14 Rincian Piutang Lainnya Ditjen Perhubungan Darat*(dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	-	18.134.796
Direktorat Pembinaan Keselamatan	504.000.000	-
BPTD Wil. II Provinsi Sumatera Utara	273.762.383	-
BPTD Wil. III Provinsi Sumatera Barat	200.116.134	-
BPTD Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan	262.272.864	-
BPTD Wil. IX Provinsi Jawa Barat	120.174.879	-
BPTD Wil. XVI Provinsi Kalimantan Tengah	105.761.025	-
BPTD Wil. XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	63.840.342	-
BPTD Wil. XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	18.854.025	-
Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara	-	15.190.130.718
Jumlah	1.548.781.652	15.208.265.514

- a. Terhadap saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2017 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada satuan kerja:
- 1) Direktorat Prasarana Perhubungan Darat pada tanggal 5 April 2018 dengan NTPN: EB1C641BMC1HJPIP.
 - 2) Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Januari 2018 dengan NTPN: EAB1733LRAMU4VHI, D1B0B33I9QHSA9HI, dan 620673GFHNJ3EUHI yaitu Pencairan Bank Garansi atas Pekerjaan Pembangunan Gunung Sitoli Tahap IV Tahun 2017.
- b. Terhadap saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2018, merupakan Piutang Lainnya yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada satuan kerja:
- 1) Direktorat Pembinaan Keselamatan pada tanggal 12 April 2019 dengan NTPN: DEEEE8JBA1BL262;
 - 2) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2019 dengan NTPN: C4FA2UI091K8568 dan pada tanggal 16 April 2018 dengan NTPN: E1EF36WK4H7BS88;
 - 3) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. III Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 2019 dengan NTPN: 23CAC1JBQ0S5LKRK;
 - 4) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. VII Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 26 Maret 2019 dengan NTPN: 4A3283AVFGUHTSB9, pada tanggal 26 Maret 2019 dengan NTPN: 0C8C73B0INRBRDB9, dan pada tanggal 5 April 2019 dengan NTPN: 4F96F6MT6MJKHKQO;
 - 5) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. IX Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2019 dengan NTPN: 35D1D8LT8S1L1CDO dan pada tanggal 15 April 2019 dengan NTPN: C44530B5G61K7DFP;
 - 6) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVI Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 April 2019 dengan NTPN: DC8C18J6OGKO1749 dan pada tanggal 8 April 2019 dengan NTPN: 1AB557V2VBI2A49;

- 7) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tanggal 12 April 2019 dengan NTPN: BF65871M83OMOR69, pada tanggal 15 April 2019 dengan NTPN: BF7B08IUVLQSMCFP, dan pada tanggal 15 April 2019 dengan NTPN: 200608I5QUOLR7FP;
- 8) Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada tanggal 8 April 2019 dengan NTPN: 781DD7OR9TCVNS49.
3. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat piutang bukan pajak senilai Rp53.228.907.851,00,00 yang merupakan piutang yang berasal dari jasa kepelabuhanan dan kenavigasian (tupoksi). Berikut tabel rincian Piutang Bukan Pajak per jenis :

**Tabel C.15 Rincian Piutang Bukan Pajak
Ditjen Perhubungan Laut Per Jenis**

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
115211	Piutang PNB	53.228.907.851,00
115212	Piutang Lainnya	-
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	(30.629.462.094,00)
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	-
TOTAL		22.599.445.757,00

Sebagian besar piutang PNB sebesar Rp22.154.816.144,00 termasuk kategori lancar yang merupakan piutang kontribusi jasa pandu/tunda kepada PT. Pelindo (Persero). Sedangkan Piutang Kurang Lancar ada pada UPP Amamapare sebesar Rp. 515.378.038,00 merupakan piutang dari debitur PT. Kuala Pelabuhan Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- Jasa Rambu : Rp. 325.476.750,00
- PUJK : Rp. 189.901.288,00

Untuk Piutang diragukan terdapat pada Kantor Pusat sebesar Rp33.521.596,00 yang merupakan piutang dari debitur PT. Serunting Sriwijaya. Terdapat perubahan kategori piutang, dari piutang macet menjadi piutang diragukan, karena ada tahun 2018 PT. Serunting Sriwijaya mulai mengangsur piutang tersebut.

Sedangkan Piutang yang termasuk dalam kategori macet ada di 4 (empat) satker senilai Rp30.450.389.411,00 yaitu :

- 1) Kantor Pusat.
Piutang yang termasuk dalam kategori piutang macet pada satker kantor pusat adalah piutang PNB dari debitur PT. ASDP (Persero) dan perusahaan penyeberangan lainnya senilai Rp17.861.861.589,00.
- 2) UPP Buli.
Piutang macet pada UPP Buli sebesar Rp78.042.000,00 merupakan piutang dari PT. Pelni (Persero) periode tahun 2005

s.d. 2009. Piutang ini sesuai dengan PP N0. 14 Tahun 2000. Seharusnya untuk piutang PNBP sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2000 di catat dan di tagihkan oleh kantor pusat Ditjen Hubla setelah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) antara kantor pusat, UPT dan kantor pusat PT. Pelni (Persero). Untuk piutang PT. Pelni (Persero) pada UPP Buli tidak termasuk dalam coklit tersebut sehingga piutang nya tetap tercatat di UPT yang bersangkutan.

Ditjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor UPP Buli Nomor KU. 201/1/4/DJPL-17 tanggal 2 Pebruari 2017 perihal Piutang PNBP PT. PELNI (Persero) yang meminta kepada UPP Buli untuk segera menyampaikan aksi lanjut atau langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

- 3) Piutang macet pada UPP Tarempa sebesar Rp10.820.931.830,00 untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Peralahan Arnebatara Natuna. Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang Marine Terminal Nomor KU.404/I/06/UPP-TPA-2016 Tanggal 17 Februari 2016.
- 4) Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak
Piutang macet pada OP Tanjung Perak sebesar Rp1.689.553.992,00 untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS).

Selanjutnya terdapat kesalahan perhitungan penyisihan piutang sebesar Rp74.802.662,00 pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut sehingga masuk kategori kesalahan penyisihan/tidak disisihkan.

4. Pada Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp595.040.894.051,00 terdiri dari Piutang PNBP sebesar Rp426.402.680.425,00 dan Piutang Lainnya sebesar Rp168.638.213.626,00. Berikut tabel rincian piutang Bukan Pajak per jenis :

**Tabel C.16 Rincian Piutang Bukan Pajak
Ditjen Perhubungan Udara Per Jenis**

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
115211	Piutang PNBP	426.402.680.425,00
115212	Piutang Lainnya	168.638.213.626,00
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	(223.342.450.928,00)
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(6.042.761.587,00)
TOTAL		365.655.681.536,00

Piutang PNBP sebesar Rp426.402.680.425,00 merupakan pelayanan yang telah diberikan berdasarkan PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Kementerian Perhubungan (PNBP fungsional). Nilai piutang PNBP yang signifikan terdapat pada:

- 1) Direktorat Bandar Udara sebesar Rp214.284.101.576,00 merupakan piutang dari konsesi dengan PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II dengan dasar perhitungan piutang berdasarkan:
 - a) Surat Perjanjian konsesi Ditjen Perhubungan Udara dengan PT. AP I (Persero) tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan No: HK.201.2/8/DRJU.KUM-2015; SP.333/HK.06.03/2015/DU dengan nilai konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan pertahun;
 - b) Surat Perjanjian konsesi Ditjen Perhubungan Udara dengan PT. AP II (Persero) tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nomor:HK.201.2/6/DRJU.KUM-2015; PJJ.04.04/00.02/12/2015/0025 dengan nilai konsesi sebesar 2,5% dari pendapatan pelayanan jasa kebandarudaraan pertahun;

Per 31 Desember 2018 Piutang PT. AP I (Persero) sebesar Rp101.029.639.471,00 dan PT. AP II (Persero) sebesar Rp113.254.462.105,00, atas Piutang PT.AP II (Persero) sebesar Rp10.000.000.000,00 telah disetor ke kas negara sesuai Bukti Penerimaan Negara tanggal 21 Pebruari 2019 NTB : 000000190974 NTPN : 1D2A17QN8NG1KIUO.

Terhadap proses penyelesaian pembayaran piutang konsesi, Direktorat Bandar Udara telah mengadakan rapat pembahasan tindak lanjut perjanjian konsesi kegiatan perusahaan bandar udara pada tanggal 21 Pebruari 2019.
- 2) Direktorat Navigasi Penerbangan sebesar Rp137.795.339.534,00 yang merupakan piutang Perum LPPNPI.
- 3) Bandar Udara Sentani Jayapura sebesar Rp31.972.566.725,00 merupakan piutang atas merupakan piutang atas pelayanan yang telah diberikan kepada airline.

Piutang Signifikan terdapat pada PT. Nayag Citra Baliem 26.331.108.990,00 merupakan piutang tidak tertagih atas kerjasama UPBU Sentani dan PT. Nayag Citra Baliem berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor : KU.005/01.02.I/BU.STN-2008 tentang sewa menyewa tanah UPBU Sentani untuk pembangunan gedung kargo angkutan udara yang terakhir diaddendum Nomor : KU.003/20.10.X/UPBU.STN-2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang terdiri dari pokok Piutang PNBPN sebesar Rp14.264.317.178,00.

Atas Piutang tersebut, PT. Nayag Citra Baliem mengajukan permohonan penghapusan piutang dan atas usulan tersebut Ditjen Perhubungan udara telah membuat kajian dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Permohonan PT. Nayag Citra Baliem untuk memperoleh keringanan hutang berupa keringanan denda/bunga dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Penghapusan Piutang PNBP merupakan kewenangan Presiden, mengingat denda piutang yang akan dihapuskan lebih dari Rp10.000.000.000,00 yang bisa diproses melalui pengusulan kepada Kementerian Keuangan.
- 4) Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp21.058.285.260,00. Merupakan piutang atas Rans Charges atas penggunaan ruang udara sektor A oleh Civil Aviation Authority Singapore (CAAS).
 - 5) Koreksi pada UPBU Temindung Samarinda atas nota tagihan biaya listrik yang terbit tahun 2018 terhadap pihak ketiga senilai Rp21.173.200,00 dengan rincian yaitu Centre Park untuk tagihan Agustus 2018 s.d. Desember 2018 sebesar Rp8.515.800,00 dan Koperasi Angkasa Jaya untuk tagihan November dan Desember 2018 sebesar Rp12.657.400,00.

Piutang Lainnya sebesar Rp 168.638.213.626,00 berupa Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) atas pekerjaan-pekerjaan kontraktual yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran 2018. Nilai piutang lainnya yang signifikan terdapat pada :

- 1) Bandar Udara Pongtiku Tana Toraja sebesar Rp101.937.357.256,00 merupakan Piutang atas setoran Bank Garansi pekerjaan kontraktual yang dilaksanakan oleh PT Abipraya-Passokorang, KSO dan PT. Pasimbungan Jaya.
 - 2) Bandar Udara Mozes Kilangin Timika sebesar Rp16.228.654.420,00 merupakan Piutang atas setoran Bank Garansi pekerjaan kontraktual yang dilaksanakan PT. Citra Prasasti Konsorindo.
 - 3) Bandar Udara F.L. Tobing sebesar Rp13.381.021.000,00 merupakan Piutang atas Pengembalian belanja modal dari PT. Marudut - PT. Fajar, KSO atas Kelebihan Pembayaran Kemahalan Harga Pekerjaan Pelapisan *Runway Existing*.
5. Pada Ditjen Perkeretaapian senilai Rp134.623.192.148,00 antara lain terdiri dari pencairan bank garansi atas pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 serta adanya setoran PNBP, kelebihan bayar dan kekurangan volume pekerjaan, terdiri dari Piutang PNBP sebesar Rp134.623.192.148,00 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, serta Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten, sedangkan Piutang Lainnya sebesar Rp54.138.002.135,00 terdapat pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Satker Pengembangan Lalu Lintas

dan Peningkatan Angkutan Kereta Api. Tidak dilakukan penyisihan Piutang PNPB dikarenakan Piutang dimaksud telah disetorkan ke kas Negara pada bulan Januari 2019.

6. Piutang Bukan Pajak pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan senilai Rp7.524.117.324,00 terdiri dari rincian berikut:

Tabel C.17. Rincian Piutang Bukan Pajak BPSDM Perhubungan

(dalam Rupiah)

No.	SATKER	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	ATKP MEDAN	412.708.095	2.146.594.964
2	ATKP MAKASSAR	-	459.490.671
3	PIP MAKASSAR	6.134.210.820	8.006.981.643
4	POLTEKPEL SURABAYA	-	4.519.877.531
5	ATKP SURABAYA	-	78.967.980
6	STPI CURUG	-	19.240.170
7	PKTJ TEGAL	-	127.669.757
8	BDP PADANG PARIAMAN	696.413.000	5.905.351.800
9	BP2TD BALI	81.960.750	331.607.799
10	STTD BEKASI	-	154.544.849
11	BP3 JAYAPURA	-	368.898.049
12	API MADIUN	-	88.686.069
13	BP2TL JAKARTA	-	54.455.002
14	BP3 BANYUWANGI	2.642.772	-
15	PIP SEMARANG	31.232.000	-
16	STIP JAKARTA	31.416.187	-
17	BPPTD MEMPAWAH	133.533.700	-
Jumlah		7.524.117.324	22.262.366.284

Piutang bukan pajak pada BPSDM Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. ATKP Medan merupakan piutang atas pengembalian belanja barang temuan BPK RI Tahun 2018;
- b. PIP Makassar merupakan piutang atas denda keterlambatan penyelesaian kapal latihan;
- c. BDP Padang Pariaman merupakan piutang atas pengembalian belanja TAYL pekerjaan gedung pendidikan dan gedung kesamaptaan temuan BPK RI Tahun 2018;
- d. BP2TD Bali merupakan piutang atas kelebihan pembayaran permakanan temuan BPK RI Tahun 2018;
- e. BP3 Banyuwangi merupakan sisa deposit (uang muka) pembelian avgas (BBM pesawat) ke PT. Pertamina;
- f. PIP Semarang merupakan piutang atas pengembalian kelebihan belanja kegiatan pengadaan perlengkapan peserta DPM TA. 2018 temuan BPK RI;
- g. STIP Jakarta merupakan piutang atas pengembalian kelebihan pembayaran pemeliharaan gedung temuan BPK RI Tahun 2018;
- h. BP2TD Mempawah merupakan piutang atas pengembalian atas kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan selasar penghubung, denda keterlambatan pekerjaan peralatan survey sungai, dan kelebihan belanja gedung auditorium temuan BPK RI Tahun 2018.

7. Piutang Bukan Pajak Badan Litbang Perhubungan sebesar Rp619.100.000,00 merupakan Piutang lainnya berasal dari satker Pusat Litbang Transportasi Antarmoda yaitu koreksi atas Beban

Barang Non Operasional Lainnya berupa kelebihan pembayaran Pekerjaan Kompilasi Data Seluler, Pengolahan Data Asal Tujuan Pergerakan Orngdan Pengembangan Sistem Database Transportasi sesuai kontrak No.PL.104//1/1-PTAM-2018 tanggal 31 Juli 2018.

Mutasi Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel C.18 Mutasi Piutang Bukan Pajak Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon 1	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Sekretariat Jenderal	0,00	367.546.275,00	1.430.334,00	366.115.941,00
2	Ditjen Perhubungan Darat	15.208.265.514,00	1.548.781.652,00	15.208.265.514,00	1.548.781.652,00
3	Ditjen Perhubungan Laut	25.960.157.637,00	119.761.352.184,00	92.492.601.970,00	53.228.907.851,00
4	Ditjen Perhubungan Udara	172.886.158.690,00	545.000.080.349,00	122.845.344.988,00	595.040.894.051,00
5	Ditjen Perkeretaapian	37.340.790.688,00	188.761.194.283	37.340.790.688	188.761.194.283,00
6	Badan Litbang Perhubungan	0,00	619.100.000,00	0,00	619.100.000,00
7	BPSDM Perhubungan	22.262.366.284,00	7.524.117.324,00	22.262.366.284,00	7.524.117.324,00
8	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	553.150.000,00	0,00	553.150.000,00	0,00
	Total	274.210.888.813,00	863.582.172.067,00	290.703.949.778,00	847.089.111.102,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (266,15 miliar)

C.1.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar (Rp266.148.929.509,00) dan (Rp22.455.062.296,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 0,5%. piutang kurang lancar 10%. piutang diragukan sebesar 50% dan piutang macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena telah direklasifikasi ke aset lain-lain.

Tabel C.19 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Umur Piutang (Kualitas)				Tidak disisihkan / Kesalahan Penyisihan	Saldo
		0 - 30 hari (lancar)	31 - 60 hari (kurang lancar)	61 - 90 hari (diragukan)	> 91 hari (macet)		
1	Sekretariat Jenderal	-	308.658	-	-	365.807.283	366.115.941
2	Ditjen Perhubungan Darat	-	-	-	-	1.548.781.652	1.548.781.652
3	Ditjen Perhubungan Laut	22.154.816.144	515.378.038	33.521.596	30.450.389.411	74.802.662	53.228.907.851
4	Ditjen Perhubungan Udara	165.575.749.337	29.881.894.909	5.511.929.432	222.813.179.562	171.258.140.811	595.040.894.051
5	Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	188.761.194.283	188.761.194.283
6	BPSDM Perhubungan	2.642.772	-	-	6.134.210.820	1.387.263.732	7.524.117.324
7	Badan Litbang Perhubungan	-	-	-	-	619.100.000	619.100.000
	Total Piutang	187.733.208.253	30.397.581.605	5.545.451.028	259.397.779.793	364.015.090.423	847.089.111.102
		0,5%	10%	50%	100%		
	Total Penyisihan	938.666.041	3.038.758.161	2.772.725.514	259.397.779.793	-	266.148.929.509

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BL Tagihan
TP/TGR 0,00
juta

C.1.10. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar 0,00 dan Rp149.580.000,00 yang merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dua belas bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I tersaji pada tabel berikut :

Tabel C.20 Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Laut	0,00	149.580.000,00	0,00
	Total	0,00	149.580.000,00	0,00

Penyisihan
piutang tak
tertagih –BL TP
TGR (0,00)

C.1.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar (Rp0,00) dan (Rp747.900,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut.

Tabel C.21 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR

(dalam Rupiah)

No	Satker	Umur Piutang (Kualitas)				Tidak disisihkan / Kesalahan Penyisihan	Saldo
		0 - 30 hari (lancar)	31 - 60 hari (kurang lancar)	61 - 90 hari (diragukan)	> 91 hari (macet)		
-	-						-
	Total Piutang	0,00		0,00	0,00		0,00
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%		
	Total Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

C.1.12. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp41.093.863.711,00 dan Rp48.815.532.767,00 yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara. Adapun rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.22 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

(dalam Rupiah)

No	Uraian Satker	31 Desember 2018 (Audited)		31 Desember 2017 (Audited)	
		Jumlah Debitur	Jumlah	Jumlah Debitur	Jumlah
Ditjen Perhubungan Udara					
1	Balai Kesehatan Penerbangan	2	305.719.000	2	783.785.000
2	Balai Besar Kalibrasi FP	3	3.030.029.040	6	4.818.254.980
3	UPBU Radin Inten II Lampung	8	2.663.038.822	-	-
4	UPBU Kalimantan Berau	14	1.395.493.669	-	-
5	UPBU Sentani Jayapura	1	3.604.745.279	0	-
6	UPBU Fatmawati Bengkulu	6	409.782.043	0	-
Total		34	11.408.807.853	8	5.602.039.980
BPSDM Perhubungan					
1	ATKP Surabaya	11	3.172.618.950	57	2.348.588.500
2	PIP Makassar	7	10.945.000	132	209.000.000
3	Poltekpel Surabaya	-	-	66	478.910.500
4	BP2IP Malahayati Aceh	324	1.165.460.000	112	148.928.000
5	PKTJ Tegal	597	1.337.100.000	2425	1.209.842.334
6	BP3 Curug	1	725.269.776	3	302.303.000
7	PIP Semarang	113	450.290.000	123	196.561.000
8	ATKP Medan	108	1.234.553.551	258	1.484.093.750
9	BP2IP Sorong	160	884.178.500	30	203.615.000
10	ATKP Makassar	1	653.460.000	2	71.700.000
11	STPI Curug	123	13.203.189.825	307	26.210.384.903
12	STIP Jakarta	19	536.709.000	274	537.974.000
13	BP2TD Palembang	20	44.318.000	61	90.788.000
14	API Madiun	103	4.329.911.800	398	2.971.518.800
15	STTD Bekasi	261	1.022.051.456	681	6.523.581.000
16	BP3IP Jakarta	-	-	1	1.584.000
17	BP2IP Tangerang	-	-	28	224.120.000
18	BP2IP Barombong	20	24.000.000	-	-
19	BPPTL Jakarta	1	891.000.000	-	-
Total		1.869	29.685.055.858	4.958	43.213.492.787
	JUMLAH	1.903	41.093.863.711	4.966	48.815.532.767

Mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2018 (*Audited*) adalah sebagai berikut :

Tabel C.23 Mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

(dalam Rupiah)

NO	Nama Satker	Saldo Awal 31 Desember 2017 (Audited)	Penambahan Piutang Tahun 2018	Pelunasan atas Piutang Tahun 2018	Pelunasan atas Piutang 2017	Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)
PIUTANG DARI KEG. OPERASIONAL BLU						
Ditjen Perhubungan Udara						
1	BALAI KESEHATAN P	783.785.000	14.406.098.000	14.100.379.000	783.785.000	305.719.000
2	BALAI BESAR KALIBRASI	4.818.254.980	10.197.779.308	7.167.750.268	4.818.254.980	3.030.029.040
3	UPBU RADIN INTEN II	-	2.879.080.505	216.041.683	-	2.663.038.822
4	UPBU KALIMARAU BERAU	-	2.569.048.979	1.173.555.310	-	1.395.493.669
5	UPBU SENTANI JAYAPURA	-	3.604.745.279	-	-	3.604.745.279
6	UPBU FATMAWATI BENGKULU	-	409.782.043	-	-	409.782.043
Total		5.602.039.980	34.066.534.114	22.657.726.261	5.602.039.980	11.408.807.853
BPSDM Perhubungan						
1	STIP JAKARTA	537.974.000	2.299.395.000	1.776.336.000	524.324.000	536.709.000
2	ATKP MAKASSAR	71.700.000	653.460.000	-	71.700.000	653.460.000
3	ATKP SURABAYA	2.348.588.500	2.805.022.950	-	1.980.992.500	3.172.618.950
4	POLTEKPEL SURABAYA	478.910.500	-	-	478.910.500	-
5	PIP MAKASSAR	209.000.000	394.000.000	383.055.000	209.000.000	10.945.000
6	ATKP MEDAN	1.484.093.750	2.397.279.555	1.182.096.404	1.464.723.350	1.234.553.551
7	API MADIUN	2.971.518.800	3.853.811.800	-	2.495.418.800	4.329.911.800
8	BP2IP MALAHAYATI ACEH	148.928.000	1.165.460.000	-	148.928.000	1.165.460.000
9	BP2IP TANGERANG	224.120.000	-	-	224.120.000	-
10	PIP SEMARANG	196.561.000	450.290.000	-	196.561.000	450.290.000
11	BP2IP SORONG	203.615.000	884.178.500	-	203.615.000	884.178.500
12	BP2TD PALEMBANG	90.788.000	44.318.000	-	90.788.000	44.318.000
13	BP3IP	1.584.000	-	-	1.584.000	-
14	STTD BEKASI	6.523.581.000	145.200.000	-	5.646.729.544	1.022.051.456
15	STPI CURUG	26.210.384.903	72.877.056.420	60.449.785.595	25.434.465.903	13.203.189.825
16	PKTJ TEGAL	1.209.842.334	7.373.975.991	6.378.124.991	868.593.334	1.337.100.000
17	BP3 CURUG	302.303.000	891.000.000	-	302.303.000	891.000.000
18	BPPTL	-	1.770.416.389	1.045.146.613	-	725.269.776
19	BP2IP BAROMBONG	-	24.000.000	-	-	24.000.000
Total		43.213.492.787	98.028.864.605	71.214.544.603	40.342.756.931	29.685.055.858
Total		48.815.532.767	132.095.398.719	93.872.270.864	45.944.796.911	41.093.863.711

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU sebesar
(3,43 miliar)

C.1.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2018 (Audited) dan per 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebesar (Rp3.435.981.740,00) dan (Rp2.634.798.339,00) yang terdapat pada satker BLU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan BPSDM Perhubungan.

Adapun rincian Piutang tidak tertagih dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.24 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Udara	(1.056.798.864,00)	(28.010.200,00)	(1.028.788.664,00)
2	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(2.379.182.876,00)	(2.606.788.139,00)	227.605.263,00
Total		(3.435.981.740,00)	(2.634.798.339,00)	(801.183.401,00)

**Tabel C.25 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang
Kegiatan Operasional BLU**

(dalam Rupiah)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Ditjen Perhubungan Udara				
Balai Besar Kalibrasi FP	Lancar (0-30 hari)	3.030.029.040	0,50%	15.150.145
Balai Kesehatan Penerbangan	Lancar (0-30 hari)	305.719.000	0,50%	1.528.595
UPBU Radin Inten II Lampung	Lancar (0-30 hari)	1.928.182.406	0,50%	9.640.912
	Kurang Lancar (31-60 hari)	219.447.023	10,00%	21.944.702
	Diragukan (61-90 hari)	60.296.495	50,00%	30.148.248
	Macet (>91 hari)	455.112.898	100,00%	455.112.898
UPBU Kalimantan Berau	Lancar (0-30 hari)	77.231.070	0,50%	386.154
	Kurang Lancar (31-60 hari)	1.286.554.253	10,00%	128.655.425
	Macet (>91 hari)	31.708.346	100,00%	31.708.346
UPBU Sentani Jayapura	Kurang Lancar (31-60 hari)	3.604.745.279	10,00%	360.474.528
UPBU Fatmawati Bengkulu	Lancar (0-30 hari)	409.782.043	0,50%	2.048.910
Total		11.408.807.853		1.056.798.863
BPSDM Perhubungan				
ATKP Surabaya	Lancar (0-30 hari)	2.812.618.950	0,50%	14.063.095
	Diragukan (61-90 hari)	360.000.000	50%	180.000.000
PIP Makassar	Lancar (0-30 hari)	5.970.000	0,50%	29.850
	Kurang Lancar (31-60 hari)	2.985.000	10%	298.500
	Diragukan (61-90 hari)	1.990.000	50,00%	995.000
BP2IP Malahayati Aceh	Lancar (0-30 hari)	1.074.485.000	0,50%	5.372.425
	Kurang Lancar (31-60 hari)	90.975.000	10%	9.097.500
PKTJ Tegal	Lancar (0-30 hari)	1.279.850.000	0,50%	6.399.250
	Kurang Lancar (31-60 hari)	53.250.000	10%	5.325.000
	Diragukan (61-90 hari)	4.000.000	50,00%	2.000.000
BP3 Curug	Lancar (0-30 hari)	725.269.776,00	0,50%	3.626.348
PIP Semarang	Lancar (0-30 hari)	450.290.000	0,50%	2.251.450
ATKP Medan	Lancar (0-30 hari)	587.765.551	0,50%	2.938.828
	Kurang Lancar (31-60 hari)	646.788.000	10%	64.678.800
BP2IP Sorong	Lancar (0-30 hari)	884.178.500	0,50%	4.420.893
ATKP Makassar	Lancar (0-30 hari)	653.460.000	0,50%	3.267.300
STPI Curug	Lancar (0-30 hari)	9.054.869.950	0,50%	45.274.350
	Kurang Lancar (31-60 hari)	1.639.259.000	10,00%	163.925.900
	Diragukan (61-90 hari)	1.356.164.875	50,00%	678.082.438
	Macet (>91 hari)	1.152.896.000	100,00%	1.152.896.000
STIP Jakarta	Lancar (0-30 hari)	536.709.000	0,50%	2.683.545
BP2TD Palembang	Lancar (0-30 hari)	44.318.000	0,50%	221.590
API Madiun	Lancar (0-30 hari)	4.329.911.800	0,50%	21.649.559
STTD Bekasi	Lancar (0-30 hari)	1.022.051.456	0,50%	5.110.257
BP2IP Barombong	Lancar (0-30 hari)	24.000.000	0,50%	120.000
BPPTL Jakarta	Lancar (0-30 hari)	891.000.000	0,50%	4.455.000
Total		29.685.055.858		2.379.182.876
TOTAL		41.093.863.711		3.435.981.740

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar R2,21. miliar

C.1.14. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan per 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp2.218.441.992,00 dan Rp1.348.210.637,00.

Adapun rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut :

Tabel C.26 Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

(dalam Rupiah)

No	Uraian Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
Ditjen Perhubungan Udara			
1	Balai Besar Kalibrasi FP	2	1.212.131.600
2	UPBU Mutiara Palu	4	143.137.644
Total		6	1.355.269.244
BPSDM Perhubungan			
1	BP3IP Jakarta	1	42.840.000
2	STIP Jakarta	8	26.397.791
3	ATKP Medan	3	152.354.757
4	BP2IP Malahayati Aceh	1	11.830.200
5	Poltekbang Surabaya	1	121.750.000
6	STTD Bekasi	2	508.000.000
Total		16	863.172.748
Grand Total		22	2.218.441.992

Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel C.27 Mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

(dalam Rupiah)

NO	Klasifikasi Piutang	Saldo Awal	Penambahan Piutang Tahun 2018	Pelunasan atas Piutang Tahun 2018	Pelunasan atas Piutang 2017	Saldo per 31 Desember 2018
		31 Desember 2017 Audited				
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU						
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA						
1	UPBU MUTIARA PALU	-	190.959.667	-	47.822.023	143.137.644
TOTAL		-	190.959.667	-	47.822.023	143.137.644
BPSDM PERHUBUNGAN						
1	STIP JAKARTA	137.429.597	448.053.338	421.655.547	137.429.597	26.397.791
2	ATKP MEDAN	90.725.000	152.354.757	-	90.725.000	152.354.757
3	API MADIUN	53.000.000	-	-	53.000.000	-
4	BP2IP MALAHAYATI ACEH	11.830.200	11.830.200	-	11.830.200	11.830.200
5	PIP SEMARANG	154.484.400	1.404.494.400	1.404.494.400	154.484.400	-
6	POLTEKBANG SURABAYA	-	121.750.000	-	-	121.750.000
7	STTD BEKASI	-	508.000.000	-	-	508.000.000
8	BP3IP	42.840.000	397.200.000	397.200.000	-	42.840.000
9	BALAI BESAR KALIBRASI FP	857.901.440	1.704.252.020	492.120.420	857.901.440	1.212.131.600
TOTAL		1.348.210.637	4.747.934.715	2.715.470.367	1.305.370.637	2.075.304.348
GRAND TOTAL		1.348.210.637	4.938.894.382	2.715.470.367	1.353.192.660	2.218.441.992

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih dari
Kegiatan Non
Operasional
BLU sebesar
(155,99 juta)

C.1.15. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp155.990.517,00) dan (Rp9.469.928,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut :

Tabel C.28 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Non Operasional BLU

(dalam Rupiah)

Satker	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Ditjen Perhubungan Udara				
Balai Besar Kalibrasi FP	Lancar	1.212.131.600	0,50%	6.060.658
UPBU Mutiara Palu	Macet	143.137.644	100,00%	143.137.644
Total		1.355.269.244		149.198.302
BPSDM Perhubungan				
BP3IP Jakarta	Lancar	9.340.000	0,50%	46.700
	Kurang Lancar	33.500.000	10,00%	3.350.000
STIP Jakarta	Lancar	26.397.791	0,50%	131.989
ATKP Medan	Lancar	19.125.000	0,50%	95.625
	Tidak Disisihkan	133.229.757	-	-
BP2IP Malahayati Aceh	Lancar	11.830.200	0,50%	59.151
Poltekbang Surabaya	Lancar	121.750.000	0,50%	608.750
STTD Bekasi	Lancar	500.000.000	0,50%	2.500.000
	Tidak Disisihkan	8.000.000	-	-
Total		863.172.748		6.792.215
Grand Total		2.218.441.992		155.990.517

Persediaan 8,33
triliun

C.1.16. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebesar Rp8.189.041.789.589,00 dan Rp7.022.058.287.675,00. Adapun rincian Persediaan per Eselon I tersaji pada tabel berikut :

Tabel C.29 Rincian Persediaan per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	1.856.105.875,00	1.270.529.480,00	585.576.395,00
2	Inspektorat Jenderal	7.987.100,00	2.350.700,00	5.636.400,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	5.115.159.895.922,00	4.496.694.975.978,00	618.464.919.944,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	457.403.429.841,00	230.328.539.278,00	227.074.890.563,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	134.240.111.369,00	150.824.541.190,00	(16.584.429.821,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	2.390.034.218.143,00	2.067.421.174.740,00	322.613.043.403,00
7	Badan Litbang Perhubungan	25.208.910,00	34.459.540,00	(9.250.630,00)
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	89.746.565.729,00	74.949.792.389,00	14.796.773.340,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	568.266.700,00	531.924.380,00	36.342.320,00
	Total	8.189.041.789.589,00	7.022.058.287.675,00	1.166.983.501.914,00

Sedangkan daftar persediaan per 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut :

Tabel C.30 Daftar Persediaan per Akun per 31 Desember 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	145.259.989.139,00	118.458.976.435,00
Amunisi	70.101.810,00	70.101.810,00
Bahan untuk Pemeliharaan	4.670.919.620,00	5.348.102.692,00
Suku Cadang	2.596.338.668.412,00	2.264.284.045.489,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	12.446.100,00	17.590.500,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.344.899.029.886,00	1.264.264.032.821,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.471.033.857.534,00	1.074.342.306.141,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.973.004.518.531,00	1.800.603.447.226,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	256.873.861.391,00	254.734.500.335,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.770.879.000,00	1.184.887.000,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	166.376.200,00	2.666.970.150,00
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	274.914.853.681,00	106.785.316.781,00
Bahan Baku	73.702.548.231,00	71.736.462.497,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.589.078.707,00	1.737.000.485,00
Persediaan Lainnya	44.734.661.347,00	55.824.547.313,00
Jumlah	8.189.041.789.589,00	7.022.058.287.675,00

Rincian Persediaan pada Ditjen Perhubungan Darat sebagaimana tabel berikut:

Tabel C.31 Rincian Persediaan Pada Ditjen Perhubungan Darat Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	60.055.168.622,00	35.664.412.722,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	49.285.048,00	98.425.508,00
3	Suku Cadang	271.736.810,00	132.500,00
4	Pita Cukai, Materai, dan Leges	151.800,00	840.000,00
5	Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.344.899.029.886,00	1.264.264.032.821,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.471.026.694.334,00	1.074.324.153.941,00
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	1.973.004.518.531,00	1.800.603.447.226,00
8	Aset Tetap Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	256.873.861.391,00	254.734.500.335,00
9	Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.770.879.000,00	1.184.887.000,00
10	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	157.300.000,00	2.657.874.500,00
11	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (Dalam Proses)	0,00	56.321.983.630,00
12	Bahan Baku	8.454.800,00	-
13	Persediaan Lainnya	7.042.815.700,00	6.840.285.795,00
	Jumlah	5.115.159.895.922,00	4.496.694.975.978,00

Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp2.390.034.218.143,00 merupakan persediaan dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, serta Suku cadang berupa rel, bantalan beton dan wesel. Suku Cadang dimaksud dipergunakan untuk penunjang kegiatan perkantoran dan pembangunan Infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bahan baku berupa tiang beton.

Berikut rincian Persediaan pada Ditjen Perkeretaapian:

Tabel C.32 Rincian Persediaan Ditjen Perkeretaapian

(dalam Rupiah)

Jenis	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
Barang Konsumsi	202.751.240,00	471.442.404
Barang untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	2.362.768.814.753,00	2.033.160.210.286,00
Bahan Baku	21.616.881.000,00	21.616.881.000,00
Persediaan Lainnya	5.445.771.150,00	12.172.641.050,00
Jumlah	2.390.034.218.143,00	2.067.421.174.740,00

Aset Tetap
Rp225,12 triliun

C.2. ASET TETAP

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan per 31 Desember (*Audited*) 2017 sebesar Rp225.118.218.948.499,00 dan Rp215.483.425.550.574,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel C.33 Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / Penurunan
1	Tanah	74.768.518.687.719,00	75.742.121.286.401,00	(973.602.598.682,00)
2	Peralatan dan Mesin	49.051.998.331.321,00	43.493.459.809.414,00	5.558.538.521.907,00
3	Gedung dan Bangunan	25.586.841.177.815,00	23.274.257.931.008,00	2.312.583.246.807,00
4	Jalan Irigasi Jaringan	109.896.131.855.771,00	107.378.546.316.060,00	2.517.585.539.711,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.303.454.098.620,00	3.207.799.393.553,00	95.654.705.067,00
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	42.859.398.535.213,00	32.109.534.219.729,00	10.749.864.315.484,00
7	Akumulasi Penyusutan	(80.348.123.737.960,00)	(69.722.293.405.591,00)	(10.625.830.332.369,00)
	Total	225.118.218.948.499,00	215.483.425.550.574,00	9.634.793.397.925,00

Rincian Aset Tetap Per Eselon I sebagai berikut :

Tabel C.34 Rincian Aset Tetap Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	2.843.515.460.658,00	2.795.594.220.580,00	47.921.240.078,00
2	Inspektorat Jenderal	28.200.133.881,00	26.738.078.771,00	1.462.055.110,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	19.647.630.965.592,00	17.364.781.065.756,00	2.282.849.899.836,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	62.396.329.295.455,00	57.077.675.488.010,00	5.318.653.807.445,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	183.415.197.952.098,00	136.992.200.489.295,00	46.422.997.462.803,00
6	Ditjen Perkeretaapian	268.361.922.005.900,00	134.015.896.584.084,00	134.346.025.421.816,00
7	Badan Litbang Perhubungan	55.284.782.586,00	53.438.648.853,00	1.846.133.733,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	23.523.167.382.758,00	22.292.129.226.039,00	1.231.038.156.719,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	448.829.764.005,00	51.242.817.821,00	397.586.946.184,00
	Nilai bruto	560.720.077.742.933,00	370.669.696.619.209,00	190.050.381.123.724,00
	Koreksi Revaluasi	(255.253.735.056.474,00)	(85.463.977.663.044,00)	(169.789.757.393.430,00)
	Akumulasi Penyusutan	(80.348.123.737.960,00)	(69.722.293.405.591,00)	(10.625.830.332.369,00)
	Nilai Netto	225.118.218.948.499,00	215.483.425.550.574,00	9.634.793.397.925,00

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp74,76 triliun

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2018 (*Audited*) senilai Rp74.768.518.687.719,00. Sedangkan perolehan Tanah per 31 Desember 2017 (*Audited*) sebesar Rp75.742.121.286.401,00.

Adapun rincian Tanah sebagai berikut:

Tabel C.35 Rincian Tanah Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	1.581.160.962.546,00	1.580.926.978.546,00	233.984.000,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.710.253.466.168,00	1.334.231.122.875,00	376.022.343.293,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	9.187.475.583.112,00	6.775.210.266.157,00	2.412.265.316.955,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	130.078.747.412.359,00	90.640.742.540.052,00	39.438.004.872.307,00
6	Ditjen Perkeretaapian	160.449.375.758.518,00	46.392.454.500.571,00	114.056.921.257.947,00
7	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	7.838.980.888.847,00	7.083.459.308.447,00	755.521.580.400,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	152.859.956.635,00	0,00	152.859.956.635,00
	Koreksi Revaluasi	(236.230.335.340.466,00)	(78.064.903.430.247,00)	(158.165.431.910.219,00)
	Total	74.768.518.687.719,00	75.742.121.286.401,00	(973.602.598.682,00)

Tabel C.36 Rincian Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (Audited)		75.742.121.286.401,00
Mutasi Tambah :		
	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	155.986.493.243.679,00
	Transfer Masuk	2.218.592.214.848,00
	Reklasifikasi Masuk	1.793.486.229.772,00
	Hibah (Masuk)	592.227.775.088,00
	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	295.795.848.000,00
	Pengembangan Melalui KDP	243.283.844.463,00
	Saldo Awal	162.894.043.403,00
	Pembelian	85.364.290.608,00
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	82.092.523.026,00
	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	67.852.260.528,00
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	62.024.040.356,00
	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	27.689.150.162,00
	Pengembangan Nilai Aset	5.072.544.520,00
	Koreksi Penilaian Kembali BMN	4.604.702.702,00
	Koreksi Kesalahan input IP	1.557.269.000,00
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	370.402.600,00
	Perolehan Lainnya	199.283.000,00
Mutasi Kurang :		
	Penyesuaian Saldo Awal	(592.214.000,00)
	Hibah (Keluar)	(2.780.703.000,00)
	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(8.415.263.664,00)
	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(28.670.736.782,00)
	Koreksi Pencatatan	(327.194.456.429,00)
	Reklasifikasi Keluar	(1.872.113.680.840,00)
	Transfer Keluar	(2.097.491.513.503,00)
	SAIBA	(158.265.943.696.219,00)
	Saldo Per 31 Desember 2018	74.768.518.687.719,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018		
	Nilai Buku s.d 31 Desember 2018 (Audited)	74.768.518.687.719,00

Peralatan dan Mesin Rp49,05 miliar

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp49.051.998.331.321,00. Sedangkan Nilai per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp43.493.459.809.414,00. Adapun

Rincian Peralatan Mesin Per Eselon I sebagai berikut :

Tabel C.37 Peralatan dan Mesin Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	662.987.440.807,00	621.470.311.809,00	41.517.128.998,00
2	Inspektorat Jenderal	27.674.450.496,00	26.212.395.386,00	1.462.055.110,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	7.154.534.526.451,00	6.145.831.178.138,00	1.008.703.348.313,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	15.810.791.041.780,00	12.971.102.008.852,00	2.839.689.032.928,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	11.419.327.805.079,00	10.974.738.535.528,00	444.589.269.551,00
6	Ditjen Perkeretaapian	5.063.875.088.259,00	4.645.115.212.477,00	418.759.875.782,00
7	Badan Litbang Perhubungan	51.340.069.739,00	49.493.936.006,00	1.846.133.733,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8.727.991.066.406,00	8.008.453.000.037,00	719.538.066.369,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	133.476.842.304,00	51.043.231.181,00	82.433.611.123,00
	Total	49.051.998.331.321,00	43.493.459.809.414,00	5.558.538.521.907,00

Tabel C.38 Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Awal per 31 Desember 2017 (Audited)		43.493.459.809.414,00
Mutasi Tambah :		
	Transfer Masuk	6.571.657.866.285,00
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.243.736.405.725,00
	Reklasifikasi Masuk	2.859.874.415.673,00
	Saldo Awal	826.393.740.075,00
	Pembelian	741.853.937.557,00
	Pengembangan Melalui KDP	150.444.348.008,00
	Hibah (Masuk)	66.146.866.112,00
	Pengembangan Nilai Aset	42.755.183.499,00
	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	26.976.005.509,00
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	5.423.206.400,00
	Perolehan Lainnya	4.697.445.442,00
	Reklasifikasi dari BPYBDS	4.261.561.685,00
	Penyesuaian Transaksi Berjalan	1.740.552.866,00
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	491.926.849,00
Mutasi Kurang :		
	Transaksi Normalisasi BMN	(377.064,00)
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(389.506.160,00)
	Penyesuaian Saldo Awal	(1.496.010.966,00)
	Penghapusan	(8.208.617.166,00)
	Koreksi Pencatatan	(10.264.284.937,00)
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intr	(10.808.468.593,00)
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(68.683.098.546,00)
	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(846.295.144.827,00)
	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(876.013.864.746,00)
	Reklasifikasi Keluar	(2.922.411.373.480,00)
	Transfer Keluar	(6.243.344.193.293,00)
Saldo Per 31 Desember 2018 (Audited)		49.051.998.331.321,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018		(25.733.040.571.422,00)
Nilai Buku s.d 31 Desember 2018 (Audited)		23.318.957.759.899,00

Gedung dan Bangunan
Rp25,58 triliun

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp25.586.841.177.815,00. Sedangkan 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp23.274.257.931.008,00.

Adapun rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I sebagai berikut :

Tabel C.39 Gedung dan Bangunan Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	547.467.028.837,00	541.296.901.757,00	6.170.127.080,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	4.438.631.548.030,00	3.650.844.217.034,00	787.787.330.996,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.665.468.014.687,00	4.886.454.160.675,00	779.013.854.012,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	8.143.102.750.347,00	7.643.825.398.158,00	499.277.352.189,00
6	Ditjen Perkeretaapian	1.346.002.133.117,00	1.190.168.777.106,00	155.833.356.011,00
7	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	5.631.491.050.347,00	5.754.588.218.209,00	(123.097.167.862,00)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	135.665.401.043,00	0,00	135.665.401.043,00
	Koreksi Revaluasi	(320.986.748.593,00)	(392.919.741.931,00)	71.932.993.338,00
	Total	25.586.841.177.815,00	23.274.257.931.008,00	2.312.583.246.807,00

Tabel C.40 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (Audited)		23.274.257.931.008,00
Mutasi Tambah :		
Transfer Masuk		1.835.277.118.479,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		1.749.053.945.482,00
Reklasifikasi Masuk		1.174.648.816.769,00
Hibah (Masuk)		714.576.714.481,00
Pengembangan Melalui KDP		611.508.982.880,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi		296.604.506.000,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi		188.212.747.269,00
Saldo Awal		103.788.922.601,00
Pengembangan Nilai Aset		88.607.965.636,00
Penyesuaian Transaksi Berjalan		75.336.736.898,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas		65.787.093.459,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset		41.312.999.781,00
Koreksi Kesalahan input IP		20.269.327.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung		16.913.416.148,00
Pembelian		11.564.138.879,00
Perolehan Lainnya		2.307.740.000,00
Reklasifikasi dari BPYBDS		2.080.925.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap		1.105.348.600,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya		1.105.123.824,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN		1.030.569.732,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi		212.479.290,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi		95.953.366,00
Mutasi Kurang :		
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola		(309.010.000,00)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi		(350.370.058,00)
Hibah (Keluar)		(507.276.000,00)
Penyesuaian Saldo Awal		(3.117.383.560,00)
Penghapusan		(13.570.746.242,00)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/		(19.352.403.878,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS		(22.851.274.538,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi		(197.266.410.817,00)
Koreksi Pencatatan		(312.624.197.172,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya		(326.234.401.138,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali		(945.257.367.204,00)
Reklasifikasi Keluar		(1.268.209.954.025,00)
Transfer Keluar		(1.579.167.530.135,00)
Saldo Per 31 Desember 2018		25.586.841.177.815,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018		(3.433.685.733.626,00)
Nilai Buku s.d 31 Desember 2018 (Audited)		22.153.155.444.189,00

Jalan Irigasi
dan Jaringan
Rp109,89 triliun

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp109.896.131.855.771,00. Sedangkan nilai 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp107.378.546.316.060,00. Adapun rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.41 Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	48.792.384.815,00	48.792.384.815,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	5.563.906.795.169,00	5.603.776.318.205,00	(39.869.523.036,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	19.687.532.304.464,00	21.582.861.307.724,00	(1.895.329.003.260,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	30.424.670.013.581,00	24.381.237.202.555,00	6.043.432.811.026,00
6	Ditjen Perkeretaapian	71.691.521.296.396,00	61.800.869.549.478,00	9.890.651.746.918,00
7	Badan Litbang Perhubungan	519.230.700,00	519.230.700,00	0,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.154.775.234.038,00	1.039.918.957.457,00	114.856.276.581,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	26.827.564.023,00	199.586.640,00	26.627.977.383,00
	Koreksi Revaluasi	(18.702.412.967.415,00)	(7.079.628.221.514,00)	(11.622.784.745.901,00)
	Total	109.896.131.855.771,00	107.378.546.316.060,00	2.517.585.539.711,00

Tabel C.42 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

Saldo Awal 31 Desember 2017 (Audited)	107.378.546.316.060,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	32.434.577.545.113,00
Transfer Masuk	6.669.277.376.361,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.928.278.509.190,00
Reklasifikasi Masuk	4.496.115.691.704,00
Pengembangan Melalui KDP	1.932.819.021.477,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	1.530.138.868.000,00
Reklasifikasi dari BPYBDS	449.308.302.764,00
Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	279.742.577.126,00
Hibah (Masuk)	277.365.478.203,00
Saldo Awal	197.513.310.892,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	190.770.439.448,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	184.294.786.296,00
Pengembangan Nilai Aset	75.627.084.440,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	23.312.649.068,00
Pembelian	4.446.297.150,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.414.885.500,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.440.820.000,00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(1.384.342.000,00)
Penghapusan	(2.798.108.500,00)
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	(6.388.309.666,00)
Koreksi Penilaian Kembali BMN	(10.969.810.880,00)
Penyesuaian Saldo Awal	(25.274.126.000,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(31.229.987.839,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(256.886.663.128,00)
Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap	(259.081.827.000,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(1.520.452.952.211,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(2.259.413.054.664,00)
Koreksi Pencatatan	(3.215.620.291.822,00)
Reklasifikasi Keluar	(4.255.001.528.905,00)
Transfer Keluar	(4.532.947.546.806,00)
Penyesuaian Transaksi Berjalan	(11.597.510.619.901,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(23.184.898.933.699,00)
Saldo Per 31 Desember 2018 (Audited)	109.896.131.855.771,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(51.100.510.033.793,00)
Nilai Buku s.d 31 Desember 2018 (Audited)	58.795.621.821.978,00

Aset Tetap
Lainnya Rp3,30
triliun

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) sebesar Rp3.303.454.098.620,00. Sedangkan nilai per 31 Desember 2017 (*Audited*) sebesar Rp3.207.799.393.553,00. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.43 Aset Tetap Lainnya Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	3.107.643.653,00	3.107.643.653,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	525.683.385,00	525.683.385,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	392.740.756.147,00	349.089.345.689,00	43.651.410.458,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	43.146.966.759,00	42.560.491.836,00	586.474.923,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	2.511.654.644.066,00	2.462.346.471.228,00	49.308.172.838,00
6	Ditjen Perkeretaapian	203.534.988.742,00	203.224.424.742,00	310.564.000,00
7	Badan Litbang Perhubungan	3.425.482.147,00	3.425.482.147,00	0,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	145.317.933.721,00	143.519.850.873,00	1.798.082.848,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
	Total	3.303.454.098.620,00	3.207.799.393.553,00	95.654.705.067,00

Tabel C.44 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)		3.207.799.393.553,00
Mutasi Tambah		
	Transfer Masuk	312.642.176.196,00
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	189.084.814.331,00
	Reklasifikasi Masuk	133.950.332.599,00
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	58.980.620.039,00
	Pengembangan Melalui KDP	41.084.970.860,00
	Pembelian	14.906.996.180,00
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	9.517.275.693,00
	Penyelesaian Pembangunan Langsung	4.489.230.038,00
	Pengembangan Nilai Aset	226.702.000,00
	Hibah (Masuk)	3.424.000,00
Mutasi Kurang		
	Penghapusan	(20.140.000,00)
	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS	(195.000.000,00)
	Koreksi Pencatatan	(14.265.608.503,00)
	Transaksi Normalisasi BMN	(58.980.620.039,00)
	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(104.261.240.635,00)
	Reklasifikasi Keluar	(210.251.794.322,00)
	Transfer Keluar	(281.257.433.370,00)
Saldo Per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)		3.303.454.098.620,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018		(80.887.399.119,00)
Nilai Buku s.d 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)		3.222.566.699.501,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) sebesar Rp42.859.398.535.213,00 dan sebesar Rp32.109.534.219.729,00. Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.45 Kontruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan / Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	0,00	0,00	0,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	387.563.873.627,00	281.008.883.815,00	106.554.989.812,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	12.001.915.384.653,00	10.819.487.252.766,00	1.182.428.131.887,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	837.695.326.666,00	889.310.341.774,00	(51.615.015.108,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	29.607.612.740.868,00	19.784.064.119.710,00	9.823.548.621.158,00
7	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	24.611.209.399,00	262.189.891.016,00	(237.578.681.617,00)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
Konsolidasi Kementerian Perhubungan		0,00	73.473.730.648,00	(73.473.730.648,00)
Total		42.859.398.535.213,00	32.109.534.219.729,00	10.749.864.315.484,00

Tabel C.46 Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)		32.109.534.219.729,00
Mutasi Tambah		
	Pengembangan KDP	22.567.424.802.304,00
	Perolehan/Penambahan KDP	2.977.866.165.877,00
	Koreksi Nilai KDP	533.300.163.388,00
	Saldo Awal KDP	533.170.941.800,00
	Transfer Masuk KDP	448.969.522.090,00
Mutasi Kurang		
	Penghapusan/ Penghentian KDP	(1.905.869.000,00)
	SAIBA	(71.131.883.351,00)
	Transfer Keluar KDP	(1.086.510.644.852,00)
	Pengembangan Melalui KDP	(2.979.141.167.688,00)
	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(12.172.177.715.084,00)
Saldo Per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)		42.859.398.535.213,00

Rekap dan rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran C.6**.

Akumulasi
Penyusutan
(Rp80,35 triliun)

C.2.13. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) masing-masing (Rp80.348.123.737.960,00) dan (Rp69.722.293.405.591,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 (*Audited*) sebagai berikut:

Tabel C.47 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	(569.123.130.903,00)	(500.951.660.536,00)	(68.171.470.367,00)
2	Inspektorat Jenderal	(18.298.818.063,00)	(16.493.744.931,00)	(1.805.073.132,00)
3	Ditjen Perhubungan Darat	(3.506.064.956.015,00)	(2.787.850.248.891,00)	(718.214.707.124,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	(9.541.212.265.179,00)	(9.221.459.329.225,00)	(319.752.935.954,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	(16.816.337.482.731,00)	(17.105.238.314.079,00)	288.900.831.348,00
6	Ditjen Perkeretaapian	(23.616.864.162.162,00)	(28.403.909.420.463,00)	4.787.045.258.301,00
7	Badan Litbang Perhubungan	(36.811.642.447,00)	(32.894.934.452,00)	(3.916.707.995,00)
8	BPSDM Perhubungan	(5.202.372.488.847,00)	(4.473.241.077.815,00)	(729.131.411.032,00)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(44.772.942.206,00)	(7.257.176.024,00)	(37.515.766.182,00)
	Koreksi Revaluasi	(20.996.265.849.407,00)	(7.172.997.499.175,00)	(13.823.268.350.232,00)
	Total	(80.348.123.737.960,00)	(69.722.293.405.591,00)	(10.625.830.332.369,00)

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang
TP/TGR
Rp 9,89
miliar

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp9.894.416.883,00 dan Rp9.289.750.741,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya. Terdapat pada tiga unit Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel C.48. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I
31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*)**

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	9.698.076.883,00	9.289.750.741,00	408.326.142,00
2	Ditjen Perhubungan Udara	12.340.000,00	0,00	12.340.000,00
3	BPSDM Perhubungan	184.000.000,00	0,00	184.000.000,00
Total		9.894.416.883,00	9.289.750.741,00	604.666.142,00

Sedangkan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 (*Audited*) senilai Rp9.698.076.883,00 terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut dengan rincian Satker sebagai berikut:

Tabel C.49. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Satker

(dalam Rupiah)

No	Satker	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Palembang	7.510.475.295,00
2	Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai	150.000.000,00
3	Unit Penyelenggara Pelabuhan Amamapare	180.754.100,00
4	Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara	1.465.216.137,00
5	Unit Penyelenggara Pelabuhan Saunek	41.305.209,00
6	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kepulauan Seribu	350.326.142,00
Total		9.698.076.883,00

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih
TP/TGR
(Rp498,44)
juta

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan per 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai (Rp498.436.997,00) dan (Rp306.686.998,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) berdasarkan umur piutang (kualitas) sebagai berikut:

Tabel C.50. Rincian Mutasi Penyisihan Piutang TP/TGR per Eselon I

(dalam Rupiah)

Eselon I	Umur Piutang						Saldo
	0-30 Hari (Lancar)	31-60 Hari (Kurang Lancar)	61-90 Hari (Diragukan)	> 91 Hari (Macet)	Tidak disisihkan	salah Penyisihan	
Ditjen Hub. Laut	7.510.475.295	41.305.209	252.000.000	330.754.100	0	1.563.542.279	9.698.076.883
Ditjen Hub. Udara	0	0	0	0	12.340.000	0	12.340.000
BPSDM	0	0	0	0	184.000.000	0	184.000.000
Total Piutang	7.510.475.295	41.305.209,00	252.000.000	330.754.100	196.340.000	1.563.542.279	9.894.416.883
% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	0%	50%	
Total Penyisihan	37.552.376	4.130.521,00	126.000.000	330.754.100,00	0	781.771.140	498.436.997

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp0,00

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp0,00 dan Rp28.766.646.208,00. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya sebagai berikut:

Tabel C.51. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya Per Eselon I 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017(*Audited*)

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	0,00	28.747.918.735,00	(28.747.918.735,00)
2	Ditjen Perhubungan Udara	0,00	18.727.473,00	(18.727.473,00)
Total		0,00	28.766.646.208,00	(28.766.646.208,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR Rp0,00

C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp0,00 dan (Rp28.766.646.208,00).

Aset Lainnya Rp6,32 triliun

C.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017(*Audited*) senilai Rp6.322.786.854.157,00 dan Rp6.070.357.339.119,00 dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.52. Rincian Aset Lainnya Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	266.125.566.648,00	256.407.267.092,00	9.718.299.556,00
2	Inspektorat Jenderal	3.731.614.300,00	2.866.774.300,00	864.840.000,00
3	Ditjen Perhub. Darat	4.365.900.816.890,00	4.370.283.845.028,00	(4.383.028.138,00)
4	Ditjen Perhub. Laut	1.112.973.343.022,00	885.416.810.829,00	227.556.532.193,00
5	Ditjen Perhub. Udara	881.397.081.754,00	346.803.740.021,00	534.593.341.733,00
6	Ditjen Perkeretaapian	570.059.110.596,00	551.179.137.276,00	18.879.973.320,00
7	Badan Litbanghub	465.430.441.753,00	469.689.059.918,00	(4.258.618.165,00)
8	Badan PSDMP	432.285.315.090,00	389.749.962.937,00	42.535.352.153,00
9	BPTJ	34.381.445.700,00	18.416.306.700,00	15.965.139.000,00
Nilai Bruto		8.132.284.735.753,00	7.290.812.904.101,00	841.471.831.652,00
Koreksi Revaluasi		(8.362.565.218,00)	(10.928.650,00)	(8.351.636.568,00)
Akumulasi/Amortisasi Penyusutan		(1.801.135.316.378,00)	(1.220.444.636.332,00)	(580.690.680.046,00)
Total		6.322.786.854.157,00	6.070.357.339.119,00	252.429.515.038,00

Tabel C.53. Rincian Aset Lainnya Menurut Jenisnya

(dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (Audited)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	347.594.837.654,00	360.209.541.000,00	347.594.837.654,00	360.209.541.000,00
2	Aset Tak Berwujud	2.226.511.102.716,00	626.746.069.748,00	365.162.765.704,00	2.488.094.406.760,00
3	Aset Tak Berwujud - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	27.384.526.240,00	337.756.448.233,00	320.636.258.365,00	44.504.716.108,00
5	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan -BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aset Lain-Lain	4.689.311.508.841,00	3.910.890.383.687,00	3.369.088.385.861,00	5.231.113.506.667,00
7	Aset Lain-lain Belum diregister	0,00	773.380.698.572,00	773.380.698.572,00	0,00
8	Aset Lain-Lain - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Akumulasi/Amortisasi Aset Lainnya	(1.220.444.636.332,00)	703.998.876.823,00	1.284.689.556.869,00	(1.801.135.316.378,00)
Nilai Buku		6.070.357.339.119,00	6.712.982.018.063,00	6.460.552.503.025,00	6.322.786.854.157,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp360,21 miliar

C.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp360.209.541.000,00 dan Rp347.594.837.654,00 merupakan aset Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berupa Tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak Ketiga melalui Kerjasama Pemanfaatan Tahun 2017 dengan reklasifikasi aset menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah KSOP Probolinggo provinsi Jawa Timur.

Dasar Perjanjian KSP antara KSOP Probolinggo dan Badan Usaha Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara adalah perjanjian kerjasama Nomor: PP.002/1/13/KSOP.Pbl-17 tanggal 20 Agustus 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah Hasil Reklamasi dan

Bangunan Dermaga pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo.

Perjanjian KSP tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian KSP ditandatangani. Dalam KSP fasilitas Pelabuhan Probolinggo, KSOP Probolinggo menerima kontribusi tetap, pembagian keuntungan, dan bangunan berupa fasilitas yang dibangun oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam satu kesatuan perencanaan investasi awal.

Pihak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berkewajiban untuk mengembalikan aset Pelabuhan Probolinggo yang dikerjasamakan dan menyerahkan peningkatan atau penggantian investasi awal kepada KSOP Probolinggo, setelah berakhirnya perjanjian KSP yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Aset dalam kondisi siap operasi.

Aset Tak Berwujud Rp2,49 triliun

C.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp2.488.094.406.760,00 dan Rp2.226.511.102.716,00 merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Pencatatan dan pengklasifikasian Aset Tak Berwujud telah menerapkan amortisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Rincian atas Aset Tak Berwujud per Eselon I, sebagai berikut:

Tabel C.54. Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	217.782.332.825,00	218.800.924.681,00	(1.018.591.856,00)
2	Inspektorat Jenderal	1.484.493.200,00	2.866.774.300,00	(1.382.281.100,00)
3	Ditjen Perhubungan Darat	971.107.422.889,00	844.310.175.671,00	126.797.247.218,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	404.178.569.970,00	357.245.166.620,00	46.933.403.350,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	276.888.992.160,00	238.356.329.214,00	38.532.662.946,00
6	Ditjen Perkerataapian	119.207.686.099,00	114.249.271.099,00	4.958.415.000,00
7	Badan Litbang Perhubungan	145.989.497.585,00	145.793.747.585,00	195.750.000,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	317.073.966.332,00	286.472.406.846,00	30.601.559.486,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	34.381.445.700,00	18.416.306.700,00	15.965.139.000,00
Nilai Neto		2.488.094.406.760,00	2.226.511.102.716,00	261.583.304.044,00

Berdasarkan jenisnya, Aset Tak Berwujud dirinci sebagai berikut:

Tabel C.55. Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)
Hak Cipta	181.447.000,00	181.447.000,00	0,00
Paten	23.167.000,00	23.167.000,00	0,00
Software	545.260.872.013,00	482.624.967.913,00	62.635.904.100,00
Lisensi	29.878.523.058,00	24.729.327.314,00	5.149.195.744,00
Hasil Kajian	1.001.255.376.639,00	793.574.802.889,00	207.680.573.750,00
ATB Lainnya	911.495.021.050,00	925.377.390.600,00	(13.882.369.550,00)
Nilai Buku	2.488.094.406.760,00	2.226.511.102.716,00	261.583.304.044,00

Tabel C.56. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (Audited)
Hak Cipta	181.447.000,00	0,00	0,00	181.447.000,00
Paten	23.167.000,00	0,00	0,00	23.167.000,00
Software	482.624.967.913,00	76.607.552.434,00	13.971.648.334,00	545.260.872.013,00
Lisensi	24.729.327.314,00	5.149.195.744,00	0,00	29.878.523.058,00
Hasil Kajian	793.574.802.889,00	335.040.764.180,00	127.360.190.430,00	1.001.255.376.639,00
ATB Lainnya	925.377.390.600,00	209.948.557.390,00	223.830.926.940,00	911.495.021.050,00
Nilai Buku	2.226.511.102.716,00	626.746.069.748,00	365.162.765.704,00	2.488.094.406.760,00

Aset Tak Berwujud satker BLU per 31 Desember 2018 (Audited) senilai Rp281.745.732.435,00 terdiri atas Aset Tak Berwujud pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan senilai Rp269.319.137.279,00 dan pada Ditjen Perhubungan Udara senilai Rp12.426.595.156,00, dirinci pada tabel-tabel berikut:

Tabel C.57. Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (Audited)
1	Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar	4.807.027.000,00
2	Balai Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	4.646.531.900,00
3	Balai Diklat Transportasi Darat Bali	3.295.810.200,00
4	Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	14.247.232.210,00
5	Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun	5.918.772.045,00
6	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	30.806.928.556,00
7	Balai Diklat Penerbangan (BP3) Curug	2.057.862.000,00
8	Balai Diklat Penerbangan Jayapura	4.886.945.906,00
9	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	44.469.717.192,00
10	Balai Diklat Ilmu Pelayaran Mauk Tangerang	2.886.258.825,00
11	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan	17.188.585.525,00
12	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	12.856.101.500,00
13	Politeknik Pelayaran Surabaya	4.810.311.857,00
14	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	2.552.722.666,00
15	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	766.795.000,00
16	Balai Diklat Penerbang Banyuwangi	902.000.000,00
17	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	90.858.850.017,00

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (Audited)
18	Balai Diklat Transportasi Laut	4.894.450.000,00
19	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	2.912.585.550,00
20	Sekolah Tinggi Transportasi Darat	11.547.111.330,00
21	Balai Diklat Penerbangan (BP3) Palembang	2.006.538.000,00
TOTAL		269.319.137.279,00

**Tabel C.58. Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU
di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara**

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (Audited)
1	Balai Kesehatan Penerbangan	3.119.291.082,00
2	Bandar Udara Sentani Di Jayapura	100.000.000,00
3	Bandar Udara Radin Inten Di Lampung	4.844.915.000,00
4	Bandar Udara Fatmawati	374.457.368,00
5	Bandar Udara Kalimantan Di Tanjung Redeb	196.350.000,00
6	Bandar Udara Mutiara Di Palu	604.664.772,00
7	Bandar Udara Jalaludin Di Gorontalo	1.910.229.434,00
8	Bandar Udara Juwata Di Tarakan	1.128.187.500,00
9	Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	148.500.000,00
Total		12.426.595.156,00

Aset Tak Berwujud lainnya terdapat pada beberapa Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.59. Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)
1	Sekretariat Jenderal	0,00	28.109.132.053,00
2	Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	549.616.513.541,00	535.027.211.201,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	203.147.453.168,00	201.753.177.568,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	56.902.579.174,00	63.446.264.174,00
6	Ditjen Perkeretaapian	21.427.255.055,00	21.427.255.055,00
7	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00
8	BPSDM Perhubungan	80.401.220.112,00	75.614.350.549,00
9	BPTJ	0,00	0,00
Total		911.495.021.050,00	925.377.390.600,00

Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp911.495.021.050,00 dan Rp925.377.390.600,00. Aset Tak Berwujud Lainnya senilai Rp911.495.021.050,00 dijelaskan secara rinci pada **Lampiran C.7.2. s.d. C.7.5.**

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp44,50 miliar

C.4.3. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp44.504.716.108,00 dan Rp27.384.526.240,00.

Tabel C.60. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	27.384.526.240,00	337.756.448.233,00	320.636.258.365,00	44.504.716.108,00

Tabel C.61. Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	16.902.415.850,00	13.413.438.250,00	3.488.977.600,00
2	Ditjen Perkerataapian	27.602.300.258,00	13.971.087.990,00	13.631.212.268,00
Total		44.504.716.108,00	27.384.526.240,00	17.120.189.868,00

Penjelasan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan senilai Rp16.902.415.850,00 tersebar di 4 (empat) Satker Ditjen Perhubungan Laut sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut senilai Rp7.260.888.250,00 berupa Kontrak pekerjaan Survei investigasi dan Desain (SID) pada 10 (sepuluh) wilayah yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan SID Dermaga kapal patroli di Cikoneng atau Anyer Banten senilai Rp731.401.000,00;
 - b. Pekerjaan SID Dermaga kapal patroli di Balikpapan, Kalimantan Timur Rp766.799.000,00;
 - c. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Kuala Tanjung, Sumatera Utara Rp759.038.500,00;
 - d. Pekerjaan SID Dermaga kapal patroli di Wonorelli, Maluku Barat Daya Rp777.711.000,00;
 - e. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Merauke Rp779.509.500,00;
 - f. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Bau-bau Rp740.404.500,00;
 - g. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Bansering, Banyuwangi Rp415.211.500,00;
 - h. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Sampit, Kalimantan Tengah Rp762.572.250,00;
 - i. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Waisai, Sorong Rp773.245.000,00;
 - j. Pekerjaan SID Dermaga kapal patrol di Teluk Bayur, Sumatera Barat Rp754.996.000,00.

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bitung senilai Rp5.247.750.000,00 berupa pekerjaan studi Detail engineering Desain (DED) pengembangan pelabuhan Raha, Malanganu, Poso, Bunta, Ampana, Kotabunan, dan Palopo;
3. Peningkatan fungsi Pelabuhan dan Pengerukan Pusat senilai Rp3.488.977.600,00 berupa pekerjaan *Detail Engineering Desain* (DED). Fasilitas pelabuhan Tabiloka sebesar Rp770.158.400,00; Pekerjaan *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Geser dan Pelabuhan Gorom Rp1.013.120.000,00 *Detail Engineering Desain* (DED) Fasilitas Pelabuhan Ampana sebesar Rp764.359.200,00; dan *Detail Engineering Desain* (DED) Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Bau-bau dan Wanci sebesar Rp941.340.000,00;
4. Unit Penyelenggara Pelabuhan Laiwui senilai Rp904.800.000,00 berupa pekerjaan studi lingkungan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pada UPP Laiwui sesuai dengan nomor kontrak HK 107/1/10/UPP.LWI.2015.

Selain itu, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Direktrat Jenderal Perkeretaapian senilai Rp27.602.300.258,00 terdapat pada 3 (empat) Satker Ditjen Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten senilai Rp5.295.665.000,00 berupa pekerjaan DED Pembangunan DDT antara Bekasi s/d Cikarang, pekerjaan Penyusunan AMDAL Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Antara Rengasbitung-Merak dan pekerjaan Penyusunan AMDAL Reaktivitas Jalur KA Rengasbitung-Saketi-Labuan;
2. Satker Pengembangan, Perawatan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian senilai Rp2.417.600.000,00 berupa pekerjaan Proyek Manajemen Unit dan pekerjaan Perencanaan Sistem Informasi;
3. Satker Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api Rp19.889.035.258,00 berupa pekerjaan Engineering Services of Surabaya Regional Railway Line, pekerjaan Pemetaan Foto Udara Trase Jalur KA Akses Bandar Udara Adi Soemarmo Solo, pekerjaan Pemetaan Foto Udara Trase Jalur KA Akses Bandar Udara Yogyakarta Baru (Kulonprogo), pekerjaan Studi *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) Angkutan Kereta Api Antarkota di Pulau Jawa.

Aset Lain-Lain Rp5,23 triliun

C.4.6. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah senilai Rp5.231.113.506.667,00 dan Rp4.689.311.508.841,00.

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN serta persediaan yang akan diserahkan kepada Pemda/masyarakat yang telah diajukan usulan hibahnya kepada Menteri Keuangan.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 (*Audited*) juga termasuk Aset Lain-Lain senilai Rp73.833.822.466,00 yang terdapat pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara senilai masing-masing Rp58.632.737.763,00 dan Rp15.201.084.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.62. Rincian Aset Lain-Lain Per Satker BLU di Lingkungan BPSDM Perhubungan

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (Audited)
1	Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar	463.748.500,00
2	Balai Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Palembang	3.838.129.176,00
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali	1.750.000,00
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	6.463.188.503,00
5	Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong	2.106.312.100,00
6	Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan Jayapura	28.285.000,00
7	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	8.397.564.500,00
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Mauk Tangerang	515.700.000,00
9	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan	200.054.000,00
10	Politeknik Pelayaran Surabaya	2.441.737.800,00
11	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	22.026.074.000,00
12	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	516.269.000,00
13	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi	423.043.494,00
14	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	3.602.888.110,00
15	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	3.527.743.580,00
16	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	4.080.250.000,00
TOTAL		58.632.737.763,00

Tabel C.63. Rincian Aset Lain-Lain Per Satker BLU di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	31 Desember 2018 (Audited)
1	Balai Kesehatan Penerbangan	3.818.615.362,00
2	Bandar Udara Sentani di Jayapura	203.685.000,00
3	Bandar Udara Radin Inten di Lampung	32.460.000,00
4	Bandar Udara Fatmawati	879.953.350,00
5	Bandar Udara Mutiara di Palu	9.780.108.491,00
6	Bandar Udara Juwata di Tarakan	486.262.500,00
Total		15.201.084.703,00

Tabel C.64. Rincian Aset Lain-Lain Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	48.343.233.823,00	37.606.342.411,00	10.736.891.412,00
2	Inspektorat Jenderal	2.247.121.100,00	-	2.247.121.100,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	3.394.793.394.001,00	3.525.973.669.357,00	(131.180.275.356,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	331.682.816.202,00	167.163.368.305,00	164.519.447.897,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	604.508.089.594,00	108.447.410.807,00	496.060.678.787,00
6	Ditjen Perkerataapian	423.249.124.239,00	422.958.778.187,00	290.346.052,00
7	Badan Litbang Perhubungan	319.440.944.168,00	323.895.312.333,00	(4.454.368.165,00)
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	115.211.348.758,00	103.277.556.091,00	11.933.792.667,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
Nilai Bruto		5.239.476.071.885,00	4.689.322.437.491,00	550.153.634.394,00
Koreksi Revaluasi		(8.362.565.218,00)	(10.928.650,00)	(8.351.636.568,00)
Total Neto		5.231.113.506.667,00	4.689.311.508.841,00	541.801.997.826,00

Tabel C.65. Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (Audited)
Aset Lain-Lain	967.597.895,00	179.751.000,00	1.147.348.895,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Gunakan dalam Operasional Pemerintah	3.824.978.039.865,00	3.556.097.097.909,00	3.259.894.748.086,00	4.121.180.389.688,00
Aset Tak Berwujud yang Tidak Gunakan dalam Operasional Pemerintah	863.365.871.081,00	354.613.534.778,00	108.046.288.880,00	1.109.933.116.979,00
Total	4.689.311.508.841,00	3.910.890.383.687,00	3.369.088.385.861,00	5.231.113.506.667,00

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Rp1,80) triliun

C.4.8. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 (Audited) dan 31 Desember 2017 (Audited) senilai (Rp1.801.135.316.378,00) dan (Rp1.220.444.636.332,00) merupakan penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya karena berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Sedangkan amortisasi aset tak berwujud merupakan penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Eselon I sebagai berikut :

**Tabel C.66. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya Per Eselon I**

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	(98.998.599.593,00)	(90.708.109.833,00)	(8.290.489.760,00)
2	Inspektorat Jenderal	(3.274.784.913,00)	(2.621.358.108,00)	(653.426.805,00)
3	Ditjen Perhubungan Darat	(824.764.095.579,00)	(623.540.554.865,00)	(201.223.540.714,00)
4	Ditjen Perhubungan Laut	(246.570.835.984,00)	(202.218.032.154,00)	(44.352.803.830,00)
5	Ditjen Perhubungan Udara	(426.742.215.419,00)	(122.974.853.930,00)	(303.767.361.489,00)
6	Ditjen Perkeretaapian	(5.080.066.881,00)	(3.796.415.092,00)	(1.283.651.789,00)
7	Badan Litbang Perhubungan	(9.212.720.141,00)	(13.096.545.730,00)	3.883.825.589,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	(182.574.796.909,00)	(160.852.317.616,00)	(21.722.479.293,00)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(850.889.001,00)	(312.612.438,00)	(538.276.563,00)
	Koreksi Revaluasi	(3.066.311.958,00)	(323.836.566,00)	(2.742.475.392,00)
	Total	(1.801.135.316.378,00)	(1.220.444.636.332,00)	(580.690.680.046,00)

Sedangkan rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Jenis ATB adalah sebagai berikut :

Tabel C.67 . Rincian Akumulasi Penyusutan/AMortisasi Menurut Jenisnya

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(6.096.042.988,00)	(41.961.386.569,00)	35.865.343.581,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(0,00)	(29.900.000,00)	29.900.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(1.382.199.721.916,00)	(827.308.608.141,00)	(554.891.113.775,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan BLU	(0,00)	(917.877.895,00)	917.877.895,00
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(15.816.475,00)	(13.208.105,00)	(2.608.370,00)
Akumulasi Amortisasi Paten	(17.375.250,00)	(15.058.550,00)	(2.316.700,00)
Akumulasi Amortisasi Software	(384.844.281.967,00)	(330.990.143.475,00)	(53.854.138.492,00)
Akumulasi Amortisasi Lisensi	(11.751.295.483,00)	(9.243.383.752,00)	(2.507.911.731,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(25.987.500,00)	(0,00)	(25.987.500,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	(16.184.794.799,00)	(9.965.069.845,00)	(6.219.724.954,00)
Total	(1.801.135.316.378,00)	(1.220.444.636.332,00)	(580.690.680.046,00)

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang
kepada
Pihak
Ketiga
Rp451,87
miliar

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp446.077.282.624,00 dan Rp219.484.907.017,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.68. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Jumlah Utang
1	Sekretariat Jenderal	123.348.639,00
2	Inspektorat Jenderal	32.056.789,00
3	Ditjen Perhubungan Darat	7.209.762.607,00
4	Ditjen Perhubungan Laut	48.659.390.889,00
5	Ditjen Perhubungan Udara	32.544.549.846,00
6	Ditjen Perkeretaapian	321.725.902.559,00
7	Badan Litbang Perhubungan	41.277.959,00
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	35.740.993.336,00
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00
Koreksi Utang Pada Satker Konsolidasi		0,00
Total		446.077.282.624,00

Tabel C.69. Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Saldo 31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Sekretariat Jenderal	11.000.707,00	123.348.639,00	11.000.707,00	123.348.639,00
2	Inspektorat Jenderal	28.662.600,00	36.262.746,00	32.868.557,00	32.056.789,00
3	Ditjen Hub. Darat	485.014.663,00	6.837.551.372,00	112.803.428,00	7.209.762.607,00
4	Ditjen Hub. Laut	7.992.706.285,00	48.406.156.867,00	7.739.472.263,00	48.659.390.889,00
5	Ditjen Hub. Udara	25.657.217.367,00	32.958.688.620,00	26.071.356.141,00	32.544.549.846,00
6	Ditjen Perkerataapian	90.942.569.712,00	395.199.633.207,00	164.416.300.360,00	321.725.902.559,00
7	Badan Litbanghub	62.331.737,00	41.277.959,00	62.331.737,00	41.277.959,00
8	Badan PSDMP	20.831.673.298,00	163.706.937.853,00	148.797.617.815,00	35.740.993.336,00
9	BPTJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Koreksi Utang pada Satker Konsolidasi	73.473.730.648,00	0,00	73.473.730.648,00	0,00
Total		219.484.907.017,00	647.309.857.263,00	420.717.481.656,00	446.077.282.624,00

Sedangkan rincian Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Lampiran C.8**.

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga yang paling tinggi adalah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu senilai Rp321.725.902.559,00. Nilai tersebut merupakan tagihan dari utang atas Tagihan Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) yang belum dibayar dengan kronologi sebagai berikut:

Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016, melalui skema pendanaan APBN *Multi Years Contract* 2017-2018 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 21 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2018. Untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/KNT/LRTSS/VI/2017-01/WK-Kemenhub.LRT/D.II/2017 tanggal 30 Juni 2017 senilai sebesar Rp12.593.084.000.000,00.

- Nilai Kontrak telah di addendum dengan Addendum Nomor 1 tanggal 14 Februari 2018 menjadi sebesar Rp10.943.791.000.000,00. Pembayaran termin dilakukan berdasarkan surat tagihan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kemudian dilakukan reviu pengukuran atau perhitungan Bersama di lapangan oleh konsultan pengawas dan pihak Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pada amanat Perpres 55 tahun 2016 Pasal 8, usulan penagihan pekerjaan yang telah disepakati tersebut dilakukan reviu oleh BPKP terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.
- Tanggal 21 Desember 2018 Menteri Perhubungan melakukan usul perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Nomor: KU.003/12/16 Phb 2018 tentang Tambahan Penjelasan Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang semula 3 tahun (2016-2018) menjadi 5 tahun (2016-2020) dengan total anggaran berubah dari semula sebesar Rp12.593.084.000.000,00. menjadi sebesar Rp12.314.359.000.000,00. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan Nomor S-224/MK.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
- Rincian Kronologis Pembayaran Tahun 2017
Termin I
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin I berdasarkan Surat Nomor 566/WK/D.I/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp2.999.155.743.213,00. Terhadap total yang diajukan PT. Waskita Karya

tersebut dilakukan reviu oleh konsultan pengawas bersama-sama tim PPK Pembangunan LRT Sumsel dan PT. Waskita Karya dengan hasil reviu total yang dapat ditagihkan pada termin I menjadi Rp1.219.283.980.671,00. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran tagihan termin 1 berdasarkan surat 1807/WK/D.I/2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp1.219.283.980.671,00. Sebelum dilakukan pembayaran usulan penagihan pekerjaan dilakukan reviu oleh BPKP terlebih dahulu, dimana dari hasil reviu BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-298/PW07/2/2017 tanggal 19 Juni 2017. Berdasarkan hasil audit tersebut nilai tagihan pembayaran termin I adalah sebesar Rp997.298.576.584,00. Berdasarkan hasil audit dari BPKP, pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran tagihan termin I dengan Surat Nomor 1581/WK/D.I/2017 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp997.298.576.584,00 lengkap dengan kuitansi pembayaran, faktur pajak dan Surat Setoran Pajak. Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin 1 dari pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 00340/SPM/LS/LRTSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp997.298.576.584,00 kepada KPPN Jakarta IV dan diterbitkan SP2D Nomor 171331303016471 tanggal 22 Juni 2017.

Termin II

Berdasarkan tambahan anggaran (APBNP TA. 2017) yang bersumber dari realokasi anggaran LRT Jabodebek sebesar Rp891.568.720.416,00, pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin II berdasarkan surat Nomor: 2760/WK/D.I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp2.633.405.271.597,10 (termasuk PPN). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Volume Pembangunan LRT Sumatera Selatan Termin II yang ditandatangani oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, konsultan pengawas dan pihak Satker Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian nilai tagihan yang dapat diajukan sebesar Rp1.380.699.691.820,04 (termasuk PPN). Selanjutnya pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin II berdasarkan Surat Nomor 2997/WK/D.I/2017 tanggal 9 November 2017 sebesar Rp1.380.699.691.820,04 (termasuk PPN). Atas usulan penagihan pembayaran termin II dilakukan reviu oleh BPKP dengan hasil reviu BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-617/PW07/2/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan nilai tagihan yang dapat dibayarkan sebesar Rp965.042.451.064,27 (termasuk PPN). Berdasarkan hasil audit dari BPKP pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran termin II dengan Surat Nomor 3375/WK/D.I/2018 tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp891.568.720.416,00. Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin II dari pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor

01024/SPM/LS/LRTSS/XII/2018 tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp891.568.720.416,00 kepada KPPN Jakarta IV dan diterbitkan SP2D Nomor 171331303045656 tanggal 20 Desember 2017.

Dengan demikian terdapat tagihan termin II yang belum dibayarkan sebesar Rp73.473.730.648,27 pada TA.2017 yang ditagihan pada termin berikutnya.

Rincian Kronologis Pembayaran Tahun 2018

Termin III

Bahwa terdapat Tagihan II yang belum dibayarkan berdasarkan hasil audit BPKP Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp73.473.730.648,27 telah dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan Bulan Januari TA. 2018. PPK LRT Sumatera Selatan mengeluarkan surat kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 220/SRT/PPPP.KA/LRT-SS/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 tentang Persiapan Pembayaran Termin III Pembangunan Prasarana KA Ringan/ LRT di Provinsi Sumatera Selatan. Pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin III berdasarkan surat Nomor 1171/WK/D.I/2018 Juni 2018 sebesar Rp73.473.730.648,27 (termasuk PPN) lengkap dengan kuitansi pembayaran, faktur pajak dan Surat Setoran Pajak. Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin III dari pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 181331303017807 tanggal 07 Juni 2018.

Termin IV

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin IV berdasarkan Surat Nomor 1580/WK/D.I/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp6.842.979.060.138,38,00. Terhadap tagihan termin I, II dan III telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.962.341.027.648,59 sehingga tagihan pembayaran atas termin IV sebesar Rp4.880.638.032.489,79. Atas usulan penagihan pembayaran termin IV dilakukan reviu oleh BPKP dengan hasil reviu BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-483/D103/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nilai tagihan yang dapat dibayarkan sebesar Rp4.222.881.475.559,25 (termasuk PPN). Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin III dari pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 181331303028134 tanggal 27 September 2018.

Dengan demikian terdapat tagihan termin IV yang belum dibayarkan sebesar Rp296.355.206.207,52 pada TA.2018 yang akan ditagihan pada termin berikutnya.

Rincian Kronologis Pembayaran Tahun 2019

Termin V

Bahwa terdapat Tagihan IV yang belum dibayarkan karena tidak tersedianya anggaran di Tahun 2018 dan telah dibayarkan pada Tahun 2019. Berdasarkan hasil audit BPKP Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp296.355.206.207,52 telah dilakukan pencatatan pada Laporan Keuangan bulan Desember TA. 2018 sebagai Utang kepada Pihak Ketiga. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin V berdasarkan Surat Nomor 78/WK/D.I/2019 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp296.355.206.207,00. Atas dasar laporan hasil audit BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-483/D103/2018 tanggal 24 September 2018 dan Surat Permohonan pembayaran termin V dari pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 191331303000271 tanggal 25 Januari 2019.

Hibah yang
Belum
Disahkan
Rp0,00

C.5.2. Hibah yang Belum Disahkan

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan Rp1.751.255.806.149,00.

Tabel C.70. Rincian Mutasi Hibah Yang Belum Disahkan Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Ditjen Hub. Darat	0,00	1.053.077.300.687,00	1.053.077.300.687,00	0,00
2	Ditjen Hub. Laut	2.393.957.370,00	11.160.427.165,00	13.554.384.535,00	0,00
3	Ditjen Hub. Udara	1.730.790.404.449,00	258.876.218.550,00	1.989.666.622.999,00	0,00
4	Ditjen KA	0,00	26.757.508.783,00	26.757.508.783,00	0,00
5	BPSDMP	18.071.444.330,00	0,00	18.071.444.330,00	0,00
6	BPTJ	0,00	307.719.905.192,00	307.719.905.192,00	0,00
	Jumlah	1.751.255.806.149,00	1.657.591.360.377,00	3.408.847.166.526,00	0,00

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp31,95
miliar

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah senilai Rp31.947.759.585,00 dan Rp52.281.877.089,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.71. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	1.124.530.202,00	833.713.400,00	290.816.802
2	Ditjen Perhubungan Laut	0,00	12.550.000,00	(12.550.000)
3	Ditjen Perhubungan Udara	2.617.109.608,00	12.407.651.577,00	(9.790.541.969)
4	Ditjen Perkerataapian	201.741.378,00	221.725.013,00	(19.983.635)
5	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	28.004.378.397,00	38.806.237.099,00	(10.801.858.702)
	Total	31.947.759.585,00	52.281.877.089,00	(20.334.117.504)

Sedangkan mutasi Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel C.72. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima di Muka per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2017 (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (Audited)
1	Sekretariat Jenderal	833.713.400,00	557.675.000,00	266.858.198,00	1.124.530.202,00
2	Ditjen Hub. Laut	12.550.000,00	1.500.000,00	14.050.000,00	-
3	Ditjen Hub. Udara	12.407.651.577,00	1.833.625.626,00	11.624.167.595,00	2.617.109.608,00
4	Ditjen Pengeretaan	221.725.013,00	74.841.969,00	94.825.604,00	201.741.378,00
5	BPSDM Perhubungan	38.806.237.099,00	105.479.076.755,00	116.280.935.457,00	28.004.378.397,00
	Jumlah	52.281.877.089,00	107.946.719.350,00	128.280.836.854,00	31.947.759.585,00

Pendapatan Diterima Dimuka dengan nilai yang signifikan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan senilai Rp 28.004.378.397,00 tersebar pada 12 (dua belas) Satker BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.73. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Satker BLU BPSDM

(dalam Rupiah)

No	Satker	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)
1	BP2IP Malahayati Aceh Besar	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	129.473.766,00
2	BP2IP Sorong	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	2.052.209.950,00
3	BP3IP Jakarta	Pendapatan sewa diterima dimuka	551.108.000,00
4	BP2IP Barombong	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	6.738.088.062,00
5	STPI Curug	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	968.656.500,00
6	Poltekpel Surabaya	Pendapatan layanan pendidikan & Sewa diterima dimuka	4.072.798.000,00
7	PIP Semarang	Pendapatan sewa ruang Bank & sewa Balai Mas Pardi	234.735.000,00
8	ATKP Surabaya	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	3.397.656.000,00
9	BP3 Banyuwangi	Pendapatan sewa diterima dimuka untuk lahan ATM	17.726.027,00
10	STIP Jakarta	Pendapatan jasa Layanan Pendidikan	2.899.325.119,00
11	BP2TL Jakarta	Pendapatan jasa layanan pendidikan dan sewa ruang ATM	433.288.034,00
12	PIP Makassar	Pendapatan Diklat/short course	6.509.313.939,00
	TOTAL		28.004.378.397,00

Uang Muka
dari KPPN
Rp1,70
miliar

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) senilai Rp 1.703.397.121,00 dan Rp7.929.652.381,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Utang
jangka
pendek
Lainnya
Rp1,78 juta

C.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 (*Audited*) dan 31 Desember 2017 (*Audited*) adalah senilai Rp1.781.300,00 dan Rp271.351.355,00. Akun ini digunakan untuk mencatat belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga termasuk potongan pajak yang belum disetorkan ke kas Negara. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.74. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Kenaikan/ Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Laut	0,00	31.513.423,00	(31.513.423,00)
2	BPSDM Perhubungan	1.781.300,00	239.837.932,00	(238.056.632,00)
Total		1.781.300,00	271.351.355,00	(269.570.055,00)

Tabel C.75. Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)
1	Ditjen Hub. Laut	31.513.423,00	0,00	31.513.423,00	0,00
2	Ditjen Hub. Udara	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00
3	BPSDM Perhubungan	239.837.932,00	1.781.300,00	239.837.932,00	1.781.300,00
Total		271.351.355,00	1.898.900,00	271.468.955,00	1.781.300,00

Utang jangka pendek lainnya pada BPSDM Perhubungan merupakan utang pajak Bendahara Pengeluaran Satker BLU BP2IP Sorong yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2018.

Ekuitas
Rp238,92
triliun

C.6 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp240.712.034.621.416,00 dan Rp227.904.867.901.435,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian Ekuitas per Eselon I sebagai berikut:

Tabel C.76. Rincian Ekuitas Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
1	Sekretaris Jenderal	2.442.521.404.081,00	2.460.767.532.676,00	(18.246.128.595,00)
2	Inspektorat Jenderal	11.094.604.516,00	10.463.438.132,00	631.166.384,00
3	Ditjen Hub. Darat	24.792.217.479.555,00	22.835.121.491.560,00	1.957.095.987.995,00
4	Ditjen Hub. Laut	54.166.454.218.892,00	48.796.773.418.165,00	5.369.680.800.727,00
5	Ditjen Hub. Udara	167.854.218.914.454,00	119.045.154.695.538,00	48.809.064.218.916,00
6	Ditjen Perkeretaapian	247.567.465.930.944,00	108.172.970.482.008,00	139.394.495.448.936,00
7	Balitbang Perhubungan	475.293.892.702,00	477.108.356.392,00	(1.814.463.690,00)
8	BPSDM Perhubungan	19.226.042.314.130,00	18.754.118.760.556,00	471.923.553.574,00
9	BPTJ	438.155.645.199,00	63.173.384.491,00	374.982.260.708,00
Koreksi Revaluasi		(276.261.429.783.057,00)	(92.710.783.658.083,00)	(184.077.299.549.151,00)
Total		240.712.034.621.416,00	227.904.867.901.435,00	12.280.513.295.804,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp8,01 triliun

D.1.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp8.010.306.261.794,00 dan Rp7.143.320.883.973,00. Pendapatan Operasional TA 2018 tersebut terdiri dari:

Tabel D.1. Rincian Pendapatan TA 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2018 (Audited)
Pendapatan PNBP Lainnya	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	31.174.933.411,00
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	7.000,00
Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.900.130.333,00
Jumlah Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	35.075.070.744,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	101.468.919.436,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	
Pendapatan Pendidikan	5.177.930.200,00
Pendapatan Pengembangan SDM	10.208.826.913,00
Jumlah Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	15.386.757.113,00
Jumlah Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika	6.398.009.015.712,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.972.385.146,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	3.414.045,00
Pendapatan Denda	69.035.125.093,00
Pendapatan Lain-lain	785.859.165,00
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	6.621.736.546.454,00
Pendapatan BLU	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.210.277.331.850,00
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	379.800.000,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	105.256.632.244,00
Pendapatan Alokasi APBN	13.160.149.846,00
Pendapatan BLU Lainnya	59.495.801.400,00
Jumlah Pendapatan BLU	1.388.569.715.340,00
Jumlah	8.010.306.261.794,00

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum terbentuk dari satu akun yaitu pendapatan pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi di bidang perhubungan (425287) senilai Rp101.468.919.436,00. Pendapatan pengujian, sertifikasi, dan kalibrasi terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Udara, dan Ditjen Perkeretaapian.

1. Pada Ditjen Perhubungan Darat pendapatan 425287 sebesar Rp7.142.650.000,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Jasa Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (ASDP) sebesar Rp6.237.500.000,00; dan
 - b. Pendapatan Sertifikasi Penguji untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTPKB sebesar Rp905.150.000,00.
2. Pada Ditjen Perkeretaapian pendapatan 425287 sebesar Rp36.967.851.000,00 merupakan pendapatan pengujian berkala dari sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian.
3. Pada Ditjen Perhubungan Udara pendapatan 425287 sebesar Rp57.358.418.436,00 merupakan pendapatan penerbitan lisensi dan sertifikasi dan pendapatan kalibrasi peralatan penerbangan.

Pendapatan yang memiliki nilai signifikan (di atas 1 triliun rupiah) adalah Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika sebesar Rp6.398.009.015.712,00. Rincian Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika per jenis pendapatan per eselon I tersaji pada **Lampiran D.1**.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2018 Per Eselon I tersaji pada tabel berikut :

Tabel D.2. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Eselon I untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-18 (Audited)	31-Des-17 (Audited)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	2.788.736.035,00	2.527.159.574,00	10,35
Inspektorat Jenderal	160.800,00	402.460,00	(60,05)
Ditjen Perhubungan Darat	963.840.029.331,00	481.294.569.342,00	100,26
Ditjen Perhubungan Laut	3.592.470.265.789,00	3.259.897.342.156,00	10,20
Ditjen Perhubungan Udara	1.507.627.404.971,00	1.491.944.169.726,00	1,05
Ditjen Perkeretaapian	958.378.044.451,00	870.725.631.815,00	10,07
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	55.666.211,00	(100,00)
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	1.034.474.809.208,00	1.039.445.256.526,00	(0,48)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	2.361.373.337,00	3.776.488.098,00	(37,47)
Konsolidasi Kementerian Perhubungan	(51.634.562.128,00)	(6.345.801.935,00)	713,68
Jumlah	8.010.306.261.794,00	7.143.320.883.973,00	12,14

Beban Operasional Rp31,72 triliun

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp31.715.378.321.838,00 dan Rp26.126.883.160.422,00.

Rincian per Jenis Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut terdiri dari:

Tabel D.3. Rincian per Jenis Beban Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Pegawai	3.936.029.030.952,00	3.340.726.445.973,00	17,82
Beban Persediaan	671.099.508.832,00	412.917.920.786,00	62,53
Beban Barang dan Jasa	7.020.088.039.802,00	5.129.384.425.097,00	36,86
Beban Pemeliharaan	3.876.302.041.261,00	3.544.063.300.577,00	9,37
Beban Perjalanan Dinas	1.831.916.948.233,00	1.229.406.500.393,00	49,01
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	37.562.706.280,00	2.377.920.830,00	1.479,64
Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.124.113.217.272,00	12.452.897.769.477,00	13,42
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	218.266.829.206,00	14.986.611.289,00	1.356,41
Beban Lain-Lain	0	122.266.000,00	(100,00)
Jumlah	31.715.378.321.838,00	26.126.883.160.422,00	21,39

Terdapat perbedaan pada Beban Pemeliharaan dan Beban Barang dan Jasa tahun 2017 (*Audited*) dengan data pada e-rekon & LK tahun 2017 dikarenakan adanya penyesuaian *mapping* Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan yang semula disajikan sebagai bagian dari Beban Barang dan Jasa disesuaikan menjadi Beban Pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Petunjuk *Update* Aplikasi dan Referensi SAIBA Versi 5.4 tanggal 19 Februari 2019.

Rincian Beban Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada **Lampiran D.2.**

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp3,94 triliun

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.936.029.030.952,00 dan Rp3.340.726.445.973,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel D.4. Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Gaji	1.237.662.067.909,00	1.235.994.511.312,00	0,13
Beban Tunjangan	595.799.373.987,00	825.304.411.713,00	(27,81)
Beban Tunjangan Khusus	1.673.235.806.991,00	905.129.139.617,00	84,86
Beban Honorarium	0,00	607.545.000	(100,00)
Beban Lembur	82.305.555.450,00	67.650.998.086,00	21,66
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	347.026.226.615,00	306.039.840.245,00	13,39
Jumlah	3.936.029.030.952,00	3.340.726.445.973,00	17,82

Rincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada **Lampiran D.3.**

Beban
Persediaan
Rp671,10
miliar

D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp671.099.508.832,00 dan Rp412.917.920.786,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 Per Eselon I tersaji pada tabel berikut :

Tabel D.5. Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 Per Eselon I

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-18 (Audited)	31-Des-17 (Audited)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	11.705.221.744,00	11.425.258.583,00	2,45
Inspektorat Jenderal	1.098.928.755,00	636.527.725,00	72,64
Ditjen Perhubungan Darat	41.319.470.717,00	14.323.652.258,00	188,47
Ditjen Perhubungan Laut	346.043.862.984,00	201.604.501.255,00	71,64
Ditjen Perhubungan Udara	112.753.947.619,00	73.570.490.237,00	53,26
Ditjen Perkeretaapian	20.867.627.122,00	10.933.453.983,00	90,86
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.251.204.690,00	2.622.839.840,00	(14,17)
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	131.083.050.821,00	95.810.118.102,00	36,82
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	3.976.194.380,00	2.546.828.803,00	56,12
Konsolidasi Kementerian Perhubungan	0	-555.750.000,00	(100,00)
Jumlah	671.099.508.832,00	412.917.920.786,00	62,53

Beban
Barang dan
Jasa Rp7,02
triliun

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.020.088.039.802,00 dan Rp5.129.384.425.097,00. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Barang Operasional	1.507.478.903.482,00	1.569.317.670.439,00	(3,94)
Beban Barang Non Operasional	4.028.934.617.459,00	2.270.362.880.490,00	77,46
Beban Barang dan Jasa BLU	506.756.886.548,00	514.180.891.419,00	(1,44)
Beban Langganan Daya dan Jasa	246.941.596.125,00	216.195.774.685,00	14,22
Beban Jasa Pos dan Giro	216.447.690,00	169.611.988,00	27,61
Beban Jasa Konsultan	253.006.131.798,00	204.784.505.115,00	23,55
Beban Sewa	122.805.732.275,00	54.407.376.903,00	125,72
Beban Jasa Profesi	68.001.718.890,00	43.217.252.749,00	57,35
Beban Jasa Lainnya	158.895.042.968,00	153.504.155.082,00	3,51
Beban Aset Ekstrakomptabel	7.832.151.761,00	57.385.268.260,00	(86,35)
Beban Aset Ekstrakomptabel BLU	251.352.910,00	0,00	-
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	118.525.726.896,00	45.859.037.967,00	158,46
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	441.731.000,00	0,00	-
Jumlah	7.020.088.039.802,00	5.129.384.425.097,00	36,86

Rincian beban barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan (di atas 1 triliun rupiah) yakni beban barang operasional dan beban barang non operasional per jenis beban per eselon I tersaji pada **Lampiran D.4** dan **Lampiran D.5**.

Sesuai petunjuk teknis update dan referensi SAIBA 5.4 yang dirilis tanggal 19 Februari 2019 antara lain terdapat penyesuaian mapping akun Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan (akun 595113) dalam Laporan Operasional, yang semula disajikan sebagai bagian dari Beban Barang dan Jasa disesuaikan menjadi Beban Pemeliharaan. Sehingga pada *Face* Laporan Operasional eRekon&LK per 31 Desember 2017 terjadi perbedaan dengan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017 (*Audited*).

Beban
Pemeliharaan
Rp3,88 triliun

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.876.302.041.261,00 dan Rp3.544.063.300.577,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jembatan, Beban Pemeliharaan Lainnya dan Beban Persediaan Suku Cadang untuk Pemeliharaan.

Tabel D.7. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31-Des-18 (<i>Audited</i>)	31-Des-17 (<i>Audited</i>)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	452.789.902.489,00	317.346.541.367,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.273.526.675.317,00	866.446.022.846,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.745.802.127.040,00	1.798.686.917.070,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	37.998.881.986,00	35.129.932.430,00
Beban Badan Layanan Umum	78.583.195.818,00	78.863.250.391,00
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	286.966.668.460,00	447.590.636.473,00
Beban Aset Ekstrakomptabel	634.590.151,00	0,00
Jumlah	3.876.302.041.261,00	3.544.063.300.577,00

Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 tersaji pada tabel berikut :

Tabel D.8. Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 Per Eselon I

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-18 (<i>Audited</i>)	31-Des-17 (<i>Audited</i>)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	45.366.340.432,00	35.730.342.457,00	26,97
Inspektorat Jenderal	1.639.050.696,00	2.070.197.653,00	(20,83)
Ditjen Perhubungan Darat	208.935.792.232,00	87.340.842.298,00	139,22
Ditjen Perhubungan Laut	1.191.461.926.187,00	1.122.861.493.809,00	6,11
Ditjen Perhubungan Udara	492.768.482.017,00	416.350.555.663,00	18,35
Ditjen Perkeretaapian	1.659.378.668.678,00	1.686.917.510.595,00	(1,63)
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.085.378.139,00	1.854.166.870,00	12,47
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	264.269.472.806,00	187.887.170.681,00	40,65
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	10.396.930.074,00	3.051.020.551,00	240,77
Jumlah	3.876.302.041.261,00	3.544.063.300.577,00	9,37

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp1,83
triliun

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.831.916.948.233,00 dan Rp1.229.406.500.393,00. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.9. Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	1.298.091.614.870,00	895.989.814.811,00	44,88
Beban Perjalanan Tetap	24.966.757.511,00	2.461.821.329,00	914,16
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.606.243.748,00	19.617.365.650,00	10,14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.782.228.537,00	37.857.477.262,00	60,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	307.338.202.954,00	196.024.593.492,00	56,79
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	50.051.495.357,00	35.746.333.001,00	40,02
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	13.715.713.297,00	9.278.948.638,00	47,82
Beban Perjalanan BLU	55.364.691.959,00	32.430.146.210,00	70,72
Jumlah	1.831.916.948.233,00	1.229.406.500.393,00	49,01

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji dalam Lampiran D.6.

Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp37,56
Miliar

D.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp37.562.706.280,00 dan Rp2.377.920.830,00.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.10. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 17 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.442.138.500,00	65.790.680,00	2.092,01
Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	36.112.769.000,00	0,00	-
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	7.798.780,00	2.312.130.150,00	(99,66)
Jumlah	37.562.706.280,00	2.377.920.830,00	1.479,64

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp14,12
triliun

D.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.124.113.217.272,00 dan Rp12.452.897.769.477,00. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Lainnya. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah:

**Tabel D.11. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.736.942.966.603,00	4.240.373.194.649,00	35,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	560.307.887.325,00	541.022.797.771,00	3,56
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.662.500.551.238,00	6.728.968.673.073,00	(0,99)
Beban Penyusutan Irigasi	587.757.880.405,00	528.506.971.405,00	11,21
Beban Penyusutan Jaringan	239.961.842.205,00	232.700.556.068,00	3,12
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.373.342.129,00	3.027.301.167,00	374,79
Beban Penyusutan Aset Lainnya	254.991.096.970,00	107.686.550.061,00	136,79
Jumlah Penyusutan	14.056.835.566.875,00	12.382.286.044.194,00	13,52
Beban Amortisasi	67.159.744.643,00	70.394.467.508,00	(4,60)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	117.905.754,00	217.257.775,00	(45,73)
Jumlah Amortisasi	67.277.650.397,00	70.611.725.283,00	(4,72)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	14.124.113.217.272,00	12.452.897.769.477,00	13,42

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada **Lampiran D.7.**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat bahwa penerapan atas amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp218,27
miliar

D.1.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp218.266.829.206,00 dan Rp14.986.611.289,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel D.12. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	210.579.037.849,00	3.610.829.294,00	5.731,87
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	6.470.367.502,00	564.328.329,00	1.046,56
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR BLU	(747.900,00)	(19.393.351,00)	(96,14)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(891.707.419,00)	1.506.969.029,00	(159,17)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	509.214.305,00	449.274.659,00	13,34
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(11.331.460,00)	(35.964.340,00)	(68,49)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU	0,00	(77.875,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU	0,00	(222.750,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU	222.913.702,00	(223.730,00)	(99.735,14)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	2.148.308,00	265.000,00	710,68
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	1.292.870,00	4.257.129,00	(69,63)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR	191.749.999,00	(706.471.620,00)	(127,14)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.193.891.450,00	9.613.041.515,00	(87,58)
Jumlah	218.266.829.206,00	14.986.611.289,00	1.356,41

Rincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada **Lampiran D.8.**

D.1.2.9 Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain Rp0*

Beban Lain-lain merupakan beban untuk mencatat pengeluaran lain-lain yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis beban di atas. Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp122.266.000,00.

D.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

*Surplus/
Defisit Dari
Kegiatan
Operasional
(Rp23,70)
triliun*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp23.705.072.060.044,00) dan (Rp18.983.562.276.449,00). Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional sebagai adalah sebagai berikut:

**Tabel D.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-18 (Audited)	31-Des-17 (Audited)	% Naik (Turun)
Pendapatan Operasional	8.010.306.261.794,00	7.143.320.883.973,00	12,14
Pendapatan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	8.010.306.261.794,00	7.143.320.883.973,00	12,14
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Beban Operasional	31.715.378.321.838,00	26.126.883.160.422,00	21,39
Surplus Defisit dari Kegiatan Operasional	(23.705.072.060.044,00)	(18.983.562.276.449,00)	24,87

Surplus/
Defisit
Pelepasan
Aset Non
Lancar
(Rp65,42)
miliar

D.2.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp65.421.999.722,00) dan (Rp132.151.058.341,00). Rincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar adalah sebagai berikut:

**Tabel D.14. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.935.884.216,00	5.791.068.971,00	54,30
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	74.357.883.938,00	137.942.127.312,00	(46,09)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(65.421.999.722,00)	(132.151.058.341,00)	(50,49)

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp8.935.884.216,00 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel D.15. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 per Eselon I**

(dalam Rupiah)

Unit Eselon 1	Pendapatan Dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN lainnya	Jumlah
Sekretariat Jenderal	-	-	1.258.010.767,00	1.258.010.767,00
Inspektorat Jenderal	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00
Ditjen Perhubungan Darat	-	225.555.000,00	290.421.900,00	515.976.900,00
Ditjen Perhubungan Laut	24.910.000,00	648.126.680,00	1.357.764.688,00	2.030.801.368,00
Ditjen Perhubungan Udara	18.900.000,00	686.819.998,00	468.006.580,00	1.173.726.578,00
Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-
Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	24.500.000,00	24.500.000,00
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	-	94.547.222,00	3.837.171.381,00	3.931.718.603,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	-	-	-	-
Jumlah	43.810.000,00	1.655.048.900,00	7.237.025.316,00	8.935.884.216,00

Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp74.357.883.938,00 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel D.16. Beban Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017**

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	31 Des 18 (Audited)	31 Des 17 (Audited)	% Naik (Turun)
Sekretariat Jenderal	110.045.671,00	15.956.725,00	589,65
Inspektorat Jenderal	1.212.174,00	1.100.582.000,00	(99,89)
Ditjen Perhubungan Darat	39.236.103.855,00	1.119.997.146,00	3.403,23
Ditjen Perhubungan Laut	22.032.037.776,00	113.534.761.715,00	(80,59)
Ditjen Perhubungan Udara	13.179.211.145,00	3.745.539.565,00	251,86
Ditjen Perkeretaapian	0,00	0,00	-
Badan Penelitian dan Pengembangan	389.237.254,00	0,00	-
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	2.697.207.596,00	18.425.290.161,00	(85,36)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	-
Konsolidasi Kementerian Perhubungan	(3.287.171.533,00)	0,00	-
Jumlah	74.357.883.938,00	137.942.127.312,00	(46,09)

Beban pelepasan aset non lancar terbentuk dari satu akun yaitu beban kerugian pelepasan aset (596111) senilai Rp74.357.883.938,00 dimana nilai terbesar terdapat di Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp39.236.103.855,00. Beban ini antara lain terbentuk karena adanya hibah keluar aset tetap/aset lainnya serta terbentuk saat adanya pengusulan penghapusan atas aset tetap/aset lainnya yang hilang.

D.2.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/
Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp327,05
miliar

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp327.048.368.953,00 dan (Rp85.881.696.811,00). Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebagai berikut:

**Tabel D.17. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.435.191.318.765,00	857.311.225.528,00	67,41
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.108.142.949.812,00	943.192.922.339,00	17,49
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.048.368.953,00	(85.881.696.811,00)	(480,81)

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.435.191.318.765,00 tersaji pada **Lampiran D.9**.

Sedangkan untuk Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp1.108.142.949.812,00 disajikan pada tabel berikut :

Tabel D.18. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir pada TA 2018 dan TA 2017

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	31-Des-18 (Audited)	31-Des-17 (Audited)
Sekretariat Jenderal	57.701.860,00	212.990.552,00
Inspektorat Jenderal	696.630,00	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	971.194.682.461,00	916.509.044.763,00
Ditjen Perhubungan Laut	80.646.007.920,00	8.976.744.273,00
Ditjen Perhubungan Udara	49.273.806.031,00	13.194.699.913,00
Ditjen Perkeretaapian	195.916.976,00	164.372.852,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	38.516.884,00	10.584.320,00
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	6.653.306.784,00	4.109.995.968,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	82.314.266,00	14.489.698,00
Jumlah	1.108.142.949.812,00	943.192.922.339,00

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terbentuk dari akun beban rugi selisih kurs UP satker perwakilan RI/atase (521214) sebesar Rp4.533.138,00, beban penyesuaian nilai persediaan (593311) sebesar Rp1.102.754.841.642,00, dan beban kerugian persediaan rusak/usang sebesar Rp5.383.575.032,00.

D.3.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus
/Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp261,63
miliar

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp261.626.369.231,00 dan (Rp218.032.755.152,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.19. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2018 (Audited)	31 Des 2017 (Audited)	% Naik (Turun)
Surplus Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(65.421.999.722,00)	(132.151.058.341,00)	(50,49)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.935.884.216,00	5.791.068.971,00	54,30
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	74.357.883.938,00	137.942.127.312,00	(46,09)
Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	327.048.368.953,00	(85.881.696.811,00)	(480,81)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.435.191.318.765,00	857.311.225.528,00	67,41
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.108.142.949.812,00	943.192.922.339,00	17,49
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	261.626.369.231,00	(218.032.755.152,00)	(219,99)

Surplus/
Defisit – LO
(Rp23,44)
triliun

D.4 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp23.443.445.690.813,00) dan (Rp19.201.595.031.601,00) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel D.20. Surplus/Defisit Laporan Operasional
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Des-18 (Audited)	31-Des-17 (Audited)	% Naik (Turun)
Surplus Defisit dari Kegiatan Operasional	(23.705.072.060.044,00)	(18.983.562.276.449,00)	24,87
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	261.626.369.231,00	(218.032.755.152,00)	(219,99)
Surplus Defisit Laporan Operasional	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)	22,09

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp227,90 triliun

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing sebesar Rp227.904.867.901.435,00 dan Rp 203.339.539.420.851,00.

Tabel E.1. Ekuitas Awal Per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	2.460.767.532.676,00
Inspektorat Jenderal	10.463.438.132,00
Ditjen Perhubungan Darat	22.835.121.491.560,00
Ditjen Perhubungan Laut	48.796.773.418.165,00
Ditjen Perhubungan Udara	119.045.154.695.538,00
Ditjen Perkeretaapian	108.172.970.482.008,00
Badan Litbang Perhubungan	477.108.356.392,00
Badan PSDM Perhubungan	18.754.118.760.556,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	63.173.384.491,00
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(92.710.783.658.083,00)
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017	227.904.867.901.435,00

Surplus/Defisit
LO (Rp23,44
triliun)

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp23.443.445.690.813,00) dan (Rp19.201.595.031.601,00). Surplus/DefisitLO merupakan penjumlahan selisih lebih antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Tabel E.2. Surplus/Defisit Per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	(546.521.898.773,00)
Inspektorat Jenderal	(98.994.449.979,00)
Ditjen Perhubungan Darat	(2.396.230.201.314,00)
Ditjen Perhubungan Laut	(6.221.772.932.527,00)
Ditjen Perhubungan Udara	(10.102.059.342.096,00)
Ditjen Perkeretaapian	(10.847.283.691.335,00)
Badan Litbang Perhubungan	(132.278.807.135,00)
Badan PSDM Perhubungan	(2.961.216.242.463,00)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(109.897.635.467,00)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	9.972.809.510.276,00
Surplus/Defisit per 31 Desember 2018	(Rp23.443.445.690.813,00)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp4,52 triliun

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp4.516.872.236.513,00) dan Rp 8.846.624.317.059,00 .

Tabel E.3. Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	238.591.012,00	(100,00)
Koreksi Nilai Persediaan	25.447.343.829,00	88.374.085.667,00	(71,20)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(4.528.275.918.526,00)	9.235.473.317.923,00	(149,03)
Lain-Lain	(14.043.661.816,00)	(477.461.677.543,00)	(97,059)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	(4.516.872.236.513,00)	8.846.624.317.059,00	(151,058)

Tabel E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	2.792.810.174,00
Inspektorat Jenderal	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(180.520.951.111,00)
Ditjen Perhubungan Laut	3.746.000.381.813,00
Ditjen Perhubungan Udara	49.909.847.368.072,00
Ditjen Perkeretaapian	135.269.808.593.920,00
Badan Litbang	0,00
Badan PSDM Perhubungan	575.352.898.265,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(17.489.042.988,00)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(193.822.664.294.658)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2018	(4.516.872.236.513,00)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 238.591.012,00. Pada tahun 2017 penyesuaian nilai aset merupakan hasil jurnal saldo awal Satker BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp25,45 miliar

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp25.447.343.829,00 dan Rp 88.374.085.667,00 .

Tabel E.5. Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	490.406.194,00
Ditjen Perhubungan Laut	152.128.840,00
Ditjen Perhubungan Udara	10.598.965.418,00
Ditjen Perkeretaapian	13.827.528.000,00
Badan Litbang	0,00
Badan PSDM Perhubungan	378.315.377,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00
Koreksi Revaluasi	0,00
Nilai Koreksi Nilai Persediaan	25.447.343.829,00

Tabel E.6. Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA. 2018

(dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
Suku Cadang	24.173.187.518,00
Bahan Baku	164.570.000,00
Persediaan Lainnya	376.305.577,00
Barang Konsumsi	242.874.540,00
Piutang Lainnya	490.406.194,00
Nilai Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017	25.447.343.829,00

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp4,53 triliun

Koreksi Aset merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi penilaian aset untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp4.528.275.918.526,00) dan Rp9.235.473.317.923,00. Koreksi tersebut antara lain karena pengembalian Belanja Modal yang mempengaruhi nilai Aset, proporsi supervisi ke Aset Kontruksinya, serta reklasifikasi akun menjadi Aset yang sebenarnya.

Tabel E.7. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	(433.332.409,00)
Inspektorat Jenderal	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	9.659.790.021,00
Ditjen Perhubungan Laut	1.152.528.070.450,00
Ditjen Perhubungan Udara	(1.392.440.594.495,00)
Ditjen Perkeretaapian	1.057.348.508.697,00
Badan Litbang Perhubungan	0,00
Badan PSDM Perhubungan	9.270.921.239,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	(17.489.042.988,00)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	(5.346.720.239.041,00)
Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018	(4.528.275.918.526,00)

Dari Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2018 tersebut terdapat nilai yang cukup signifikan yaitu pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar (Rp1.392.440.594.495,00) dan Koreksi Revaluasi Aset Tetap sebesar (Rp5.346.720.239.041,00).

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2018 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran E.1**.

E.4.5. Lain-Lain

Lain-Lain (Rp14,04) miliar

Lain-Lain untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp.14.043.661.816,00) dan (Rp477.461.677.543,00). Koreksi lainnya merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel E.8. Koreksi Lain-Lain per Eselon I

(dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00
Ditjen Perhubungan Darat	(42.970,00)
Ditjen Perhubungan Laut	6.212.591.675,00
Ditjen Perhubungan Udara	(10.974.051.775,00)
Ditjen Perkeretaapian	332.333.721,00
Badan Litbang Perhubungan	0,00
Badan PSDM Perhubungan	(9.614.492.467,00)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00
Nilai Koreksi Lain lain per 31 Desember 2018	(14.043.661.816,00)

Tabel E.9. Rincian Lain lain per Jenis Koreksi*(dalam Rupiah)*

Uraian	Nilai
Koreksi Piutang	(74.841.969,00)
Koreksi Kewajiban	7.151.355.958,00
Koreksi Aset	(20.966.241.282,00)
Koreksi Pendapatan	(153.934.523,00)
Jumlah	(14.043.661.816,00)

Transaksi Antar Entitas Rp40,77 triliun

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp40.767.484.647.307,00 dan Rp34.920.299.195.126,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN.

Tabel E.10. Transaksi Antar Entitas per Eselon I*(dalam Rupiah)*

Unit Eselon I	Nilai
Sekretariat Jenderal	525.482.960.004,00
Inspektorat Jenderal	99.625.616.363,00
Ditjen Perhubungan Darat	4.533.847.140.420,00
Ditjen Perhubungan Laut	7.845.453.351.441,00
Ditjen Perhubungan Udara	9.001.276.192.940,00
Ditjen Perkeretaapian	14.971.970.546.351,00
Badan Litbang Perhubungan	130.464.343.445,00
Badan PSDM Perhubungan	2.857.786.897.772,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	502.368.939.163,00
Koreksi TAE pada Satker Konsolidasi	299.208.659.408,00
Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018	40.767.484.647.307,00

Tabel E.11. Transaksi Antar Entitas dari jenis transaksi*(dalam Rupiah)*

Transaksi	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	43.691.098.427.244,00
Diterima dari Entitas Lain	(6.772.163.241.892,00)
Transfer Masuk	19.665.458.385.093,00
Transfer Keluar	(19.225.756.089.663,00)
Pengesahan Hibah Langsung	3.408.847.166.525,00
Jumlah	40.767.484.647.307,00

*Diterima dari Entitas Lain Rp6,77 triliun
Ditagihkan ke Entitas Lain Rp43,70 triliun*

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018. DDEL sebesar Rp6.772.163.241.892,00 sedangkan DKEL sebesar Rp43.691.098.427.244,00.

Transfer Masuk
Rp19,67 triliun
Transfer Keluar
Rp19,23 triliun

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp19.665.458.385.093,00 dan Transfer Keluar dengan total sebesar Rp19.225.756.089.663,00.

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk per Eselon I sebagai berikut:

Tabel E.12. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per Eselon I

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon 1	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
1.	Sekretariat Jenderal	0,00	3.345.491.109,00	(3.345.491.109,00)
2.	Inspektorat Jenderal	3.110.585.220,00	0,00	3.110.585.220,00
3.	Ditjen Perhubungan Darat	12.830.392.466.601,00	12.836.083.584.313,00	(5.691.117.712,00)
4.	Ditjen Perhubungan Laut	2.035.419.598.327,00	2.035.007.648.327,00	411.950.000,00
5.	Ditjen Perhubungan Udara	3.751.880.461.490,00	3.873.347.489.477,00	(121.467.027.987,00)
6.	Ditjen Perkeretaapian	940.426.030.689,00	953.526.615.123,00	(13.100.584.434,00)
7.	Badan Litbang Perhubungan	0,00	0,00	0,00
8.	Badan PSDM Perhubungan	679.771.255.508,00	680.183.205.508,00	(411.950.000,00)
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	0,00	0,00
10.	Koreksi TK TM pada Satker Konsolidasi	(1.015.244.308.172,00)	(716.035.648.764,00)	(299.208.659.408,00)
Jumlah		19.225.756.089.663,00	19.665.458.385.093,00	(439.702.295.430,00)

Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar dapat dilihat pada **Lampiran E.2 dan Lampiran E.3.**

Selisih transfer keluar dan transfer masuk sebesar (Rp439.702.295.430,00) terdiri dari selisih Jurnal *Take Out Reval* sebesar Rp290.885.620.025,00, selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari Luar KL sebesar (Rp140.493.636.022,00), dan selisih jurnal serah terima Tanah Hasil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar (Rp590.094.279.433,00) yaitu Transfer masuk (Rp120.450.425.905) kepada Ditjen Perhubungan Laut dan (Rp469.643.853.528,00) kepada Ditjen Perkeretaapian.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp3,41 triliun

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.408.847.166.525,00 yang terdiri dari Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp1.632.447.197.710,00 dan Pengesahan Hibah Langsung atas Hibah Tahun 2018 sebesar Rp1.776.399.968.815,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0,00.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel E.13. Rincian Pengesahan Hibah

(dalam Rupiah)

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
391131 Pengesahan Hibah Langsung			
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Barang	1.053.077.300.687,00
2	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Manokwari	Barang	250.270.000,00
3	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kuala Pembuang	Barang	72.000.000,00
4	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Uban	Barang	64.585.950,00
5	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Palembang	Barang	62.937.000,00
6	Pengembangan Kenavigasian Pusat	Uang	6.425.046.215,00
7	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sebuku	Barang	65.000.000,00
8	Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Lumpur	Barang	20.000.000,00
9	Kantor UPBU Douw Aturure	Barang	149.867.445.220,00
10	Bandar Udara H. Asan Di Sampit	Barang	24.741.113.200,00
11	Bandar Udara Naha Di Tahuna	Barang	13.000.000.000,00
12	Kantor UPBU Matahora	Barang	4.811.376.600,00
13	Bandar Udara Rembele - Takengon	Barang	212.047.258.661,00
14	Bandar Udara Dewadaru Di Karimun Jawa	Barang	4.175.730.090,00
15	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Barang	307.719.905.192,00
Total			1.776.399.968.815,00
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL			
15	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Redep	Barang	540.000.000,00
16	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api	Barang	3.161.060.000,00
17	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muntok	Barang	499.528.000,00

Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
18	Unit Penyelenggara Pelabuhan B A D E	Barang	200.000.000,00
19	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta	Barang	2.193.957.370,00
20	Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara	Barang	1.457.073.324.286,00
21	Bandar Udara Halu Oleo-Kendari	Barang	98.950.762.941,00
22	Bandar Udara Muko-Muko Di Muko-Muko	Barang	24.999.612.000,00
23	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	Barang	26.757.508.783,00
24	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman	Barang	18.071.444.330,00
Total			1.632.447.197.710,00
Total Pengesahan (391131 + 391133)			3.408.847.166.525,00
Pengesahan Pengembalian Hibah			0,00
Jumlah			3.408.847.166.525,00

Rincian Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung per jenis hibah pada Kementerian Perhubungan Tahun 2018 dan Tahun Anggaran Yang Lalu sebagaimana dirinci dalam **Lampiran E.4**.

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas Rp12,81 triliun

Kenaikan Ekuitas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.807.166.719.981,00 dan Rp24.565.328.480.584,00.

Tabel E.14. Kenaikan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit - LO	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)	22,09
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas	(4.516.872.236.513,00)	8.846.624.317.059,00	(151,05)
Transaksi Antar Entitas	40.767.484.647.307,00	34.920.299.195.126,00	16,74
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	12.807.166.719.981,00	24.565.328.480.584,00	(47,86)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Ekuitas Akhir
Rp240,71 triliun

E.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp240.712.034.621.416,00 dan Rp227.904.867.901.435,00.

Tabel E.15. Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (turun)
Ekuitas Awal	227.904.867.901.435,00	203.339.539.420.851,00	12,081
Surplus/Defisit - LO	(23.443.445.690.813,00)	(19.201.595.031.601,00)	22,091
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00
Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas	(4.516.872.236.513,00)	8.846.624.317.059,00	(151,058)
Transaksi Antar Entitas	40.767.484.647.307,00	34.920.299.195.126,00	16,744
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	12.807.166.719.981,00	24.565.328.480.584,00	(47,865)
Ekuitas Akhir	240.712.034.621.416,00	227.904.867.901.435,00	5,62

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Koreksi *Take Out* Nilai Revaluasi Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, hasil revaluasi seharusnya disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : S-35/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN), maka hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2018. Hasil Penilaian Kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.

Atas kebijakan tersebut, terdapat perbedaan penyajian nilai aset tetap objek revaluasi pada Laporan BMN dan Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.1. Selisih LBMN dan LK Tahun 2018 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo Menurut LK	Saldo Menurut LBMN	Selisih
1	Tanah	74.257.970.775.393,00	310.998.854.028.185,00	(236.740.883.252.792,00)
2	Gedung dan Bangunan	25.586.841.177.815,00	25.907.827.926.408,00	(320.986.748.593,00)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	109.896.131.855.771,00	128.598.544.823.186,00	(18.702.412.967.415,00)
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.433.685.733.626,00)	(1.506.590.319.271,00)	(1.927.095.414.355,00)
5	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(51.100.510.033.793,00)	(32.031.339.598.741,00)	(19.069.170.435.052,00)
J U M L A H		155.206.748.041.560,00	431.967.296.859.767,00	(276.760.548.818.207,00)

2. Konsesi

Pendapatan dari konsesi bidang transportasi merupakan pendapatan konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Pelaksanaan konsesi di Kementerian Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Dasar Hukum

- PP Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-16 tentang tata cara penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Pengertian

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan, disebutkan bahwa :

- Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
- Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

3) Mekanisme pelaksanaan konsesi

- Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi;
- Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
- Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;
- Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
- Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015;
- Pada tahun 2015 Ditjen Hubla melalui Penyelenggara Pelabuhan telah mengadakan perjanjian konsesi dengan PT. Pelindo (Persero) I s.d. IV, dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
 - a) Konsesi dengan BUP BUMN :
 - (1) Konsesi perusahaan pelabuhan eksisting;
 - (2) Konsesi perusahaan pelabuhan non eksisting.
 - b) Konsesi dengan BUP Non BUMN.

- Besaran konsesi minimal 2,5% dari pendapatan kotor BUP;
- Jangka waktu pelaksanaan konsesi antara 30 (tiga puluh) s.d. 70 (tujuh puluh) tahun;

Tabel F.2 Jenis-Jenis Kegiatan Jasa Kepelabuhanan Yang Dikonsesikan

No	Jasa Kepelabuhanan	Segmen	Objek Konsesi
1	Kapal	a Tambat	Pendapatan Bruto
		b Air kapal	Pendapatan Bruto setelah dikurangi biaya pembelian air jika sumber air bukan berasal dari PT. Pelindo
		c <i>Bunker</i> BBM	Pendapatan <i>bunker fee</i> setelah dikurangi harga BBM ke Pertamina/ <i>supplier</i> .
2	Barang	Dermaga, gudang, lapangan penumpukan.	Pendapatan Bruto
3	Terminal Peti kemas	Paket, penumpukan, operasi lapangan, operasi CFS, dermaga, <i>reefer</i> , jasa lainnya.	Pendapatan bruto
4	Terminal kendaraan	Seluruh segmen	Pendapatan bruto
5	Terminal	Curah kering, curah cair, gas, Ro-ro	Dari pendapatan setelah dikurangi upah/biaya TKBM
6	PBM/Bongkar muat konvensional (petikemas dan <i>general cargo</i>)	a. <i>Stevedoring, cargodoring, receiving/delivery.</i>	a. Dari pendapatan setelah dikurangi upah/biaya TKBM.
		b. Kerjasama PBM	b. Dari pendapatan <i>sharing</i> atau berdasarkan nota tagihan
7	Rupa-rupa usaha	a. Pas penumpang	a. pendapatan bruto
		b. Pas masuk pelabuhan	b. pendapatan bruto
		c. Kerjasama alat	c. dari pendapatan <i>sharing/retribusi</i> atau nota tagihan
		d. Pengusahaan alat	d. pendapatan bruto

- Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi yaitu:
 - a) Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
 - b) Jasa pemanduan dan penundaan kapal karena sudah menjadi komponen PNBK di dalam PP No. 15 Tahun 2016 sebagai pungutan kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada BUP/Pengelola Tersus sebesar 5%.

- Kepala Otoritas Pelabuhan Utama melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
- Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) dilakukan tiap bulan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagian Hukum dan KSLN. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
- Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Bagian Keuangan serta Bagian Hukum dan KSLN;
- Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (*addendum*) yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
- Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi adalah 1 (satu) tahun takwim anggaran;
- Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim, maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode ini akan dilaksanakan perubahan perjanjian (*addendum*) Perjanjian Konsesi yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
- Pembayaran PNBP hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya;

- Perhitungan PNBP hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
 - Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada pembayaran triwulan berikutnya;
- 4) Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
- a) Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BUMN (PT. Pelindo I s.d. IV) , terdiri dari:
- (1) **Konsesi pada pelabuhan eksisting**, dilakukan berdasarkan perjanjian :
- Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dengan PT. Pelindo I :
 Nomor Perjanjian HK.107/1/2/OP.BLW-2015 dan US.12/2/9/PI-15.TU tanggal 9 Nopember 2015.
 - Addendum I Nomor : HK.107/1/4/OP.BLW-2016 dan UM.58/22/8/PI-16.TU tanggal 16 Juni 2016.
 - Addendum II Nomor : HK.107/1/2/OP.BLW-2017 dan UM.58/33/9/PI-17.TU tanggal 12 Juli 2017.
 - Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan PT. Pelindo II :
 - Nomor Perjanjian HK.107/1/7/OP.TPK-15 dan HK.566/11/11/1/PI.II-15 tanggal 11 Nopember 2015.
 - Addendum Nomor: HK.107/1/1/OP.TPK-16 dan HK.566/15/7/3/PI.II-16 tanggal 15 Juli 2016.
 - Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III:
 - Nomor Perjanjian HK.107/01/12/OP.TP-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
 - Addendum Nomor: HK.107/01/12/OP.TP-16 dan HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016.
 - Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar dengan PT. Pelindo IV:
 - Nomor Perjanjian HK. 107/07/01/OP.MKS-15 dan 1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
 - Addendum Nomor: HK. 107/13/02/OP.MKS-17 dan 5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Pebruari 2017.

- (2) **Konsesi non eksisting** , dilakukan berdasarkan perjanjian :
- Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Pelabuhan Utama Belawan (PT. Pelindo I) :
 - Nomor perjanjian HK. 107/1/2/OP.BLW-2015 dan US.12/2/9/PI-15.TU tanggal 9 Nopember 2015.
 - Konsesi Pengusahaan Dermaga Terminal Curah Cair Pelabuhan Kuala Tanjung (PT. Pelindo I) :
 - Nomor Perjanjian HK. 107/1/1/KSOP.KTG-15 dan US.15/1/7/PI-15.JU tanggal 23 Januari 2015.
 - Konsesi Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok (PT. Pelindo II) :
 - Nomor perjanjian Addendum kedua HK.107/1/10/OP.TPK-15 dan HK.566/29/12/2/PI.II/15 tanggal 29 Desember 2015.
 - Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) (PT. Pelindo III) :
 - Nomor Perjanjian HK.107/01/05/OP.TPR-14 dan HK.0501/75/P.III-2014 tanggal 8 Mei 2014.
 - Konsesi Pengusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Surabaya (PT. Pelindo III) :
 - Nomor perjanjian HK.107/01/06/OP.TPR-15 dan HK.0501/95/P.III-2015 tanggal 19 Mei 2015.
 - Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar *New Port* Tahap I di Makassar (PT. Pelindo IV) :
 - Nomor perjanjian HK. .107/07/12/OP.TPR-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
- b) Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Non BUMN terdiri dari :
- (1) PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan KSOP Marunda :
 - Nomor Perjanjian HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 dan 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
 - (2) PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan KSOP Banten :
 - Nomor Perjanjian HK.107/2/2/KSOP.Bln-16 dan HK.02.01/052.01/DU/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
 - (3) PT. Wahyu Samudera Indah (WSI) dengan KSOP Talang Dukuah Jambi :
 - Nomor perjanjian WSI/KPS/KEMENHUB/HUBLA/66/150976/2016 dan PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016 tanggal 27 Oktober 2016.

- (4) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI) dengan KSOP Marunda:
- Nomor perjanjian HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 dan 008/PTI-DIR/KSOP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
- 5) Konsesi pada PT. Pelindo I s.d. IV sudah dilakukan sejak periode dimulainya perjanjian dan sudah dilakukan pembayaran setiap 3 bulan sekali.
- 6) Sesuai hasil rekonsiliasi konsesi, realisasi pendapatan Konsesi Ditjen Hubla sebagai berikut:
- a) Realisasi penyetoran PNBK Konsesi pada pelabuhan umum yang eksisting dan non eksisting yang dikelola PT. Pelindo I sd IV TA. 2018 (Triwulan IV TA. 2017 s.d. Triwulan III TA. 2018) dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Eksisting Rp435,766,323,138,00.
- Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 110,678,716,258,00
 - Triwulan I TA. 2018 : Rp. 100.401.302.368,00
 - Triwulan II TA. 2018 : Rp. 102.762.394.028,00
 - Triwulan IV TA. 2018 : Rp. 121.923.910.484,00
- (2) Non Eksisting Rp39.297.248.181,00.
- Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 8.381.299.380,00
 - Triwulan I TA. 2018 : Rp. 10.276.645.595,00
 - Triwulan II TA. 2018 : Rp. 9.498.645.610,00
 - Triwulan III TA. 2018 : Rp. 11.140.657.596,00
- b) Realisasi Konsesi PNBK Kepelabuhanan non eksisting BUP Non BUMN Semester II TA. 2018 sebagai berikut :
- (1) PT. Karya Citra Nusantara (KCN)
- Perjanjian konsesi dengan KSOP Marunda
- Pembayaran Konsesi sebesar Rp4.370.653.801,00 dengan rincian:
- Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 470.272.550,00
 - Triwulan I TA. 2018 : Rp. 1.377.205.950,00
 - Triwulan II TA. 2018 : Rp. 1.223.136.200,00
 - Triwulan III TA. 2018 : Rp. 1.300.039.101,00
- Ada pembayaran denda pada triwulan III di bulan Agustus sebesar Rp9.912.466,00 dan September sebesar Rp8.251.185,00.
- (2) PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)
- Perjanjian konsesi dengan KSOP Banten
- Pembayaran konsesi dilakukan setahun sekali sesuai perjanjian. pembayaran konsesi untuk TA. 2017 dibayarkan pada bulan April 2018. Pembayaran untuk TA. 2017 dilakukan pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp10.152.655.451,00.

(3) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)

Perjanjian konsesi dengan KSOP Marunda

Pembayaran Konsesi sebesar Rp3.281.915.534,00 dengan rincian :

- Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 811.226.793,00
- Triwulan I TA. 2018 : Rp. 750.126.696,00
- Triwulan II TA. 2018 : Rp. 783.412.998,00
- Triwulan III TA. 2018 : Rp. 937.149.047,00

(4) PT. Wahyu Samudera Indah (WSI)

Perjanjian konsesi dengan KSOP Jambi

Belum ada realisasi pembayaran konsesi karena masih dalam tahap pembangunan.

7) Penerimaan dan penyetoran konsesi BUP pada pelabuhan umum yang eksisting dan yang dikelola PT. Pelindo I sd IV TA. 2018 periode Triwulan IV TA. 2017 s.d. Triwulan III TA. 2018:

a) Triwulan IV TA. 2017 :

Penerimaan : Rp. 110.678.716.230,00

Penyetoran : Rp. 110.678.716.230,00

- Ada pembayaran denda keterlambatan pembayaran konsesi Triwulan I TA. 2017 pada KSOP Dumai, baru dibayarkan Pelindo pada bulan Januari 2018.
- Ada kelebihan pembayaran Rp28,00 pada KSOP Panarukan.

b) Triwulan I TA. 2018:

Penerimaan : Rp. 100.401.302.368,00

Penyetoran : Rp. 100.401.302.368,00

c) Triwulan II TA. 2018:

Penerimaan : Rp. 102.804.628.889,00

Penyetoran : Rp. 102.762.394.028,00

Ada kompensasi pembayaran konsesi atas kelebihan bayar pada BJTI OP Tg.Perak sebesar Rp42.234.862,00 sehingga total penyetoran menjadi lebih kecil daripada jumlah penerimaan.

d) Triwulan III TA. 2018:

Penerimaan : Rp. 121.923.910.484,00

Penyetoran : Rp. 121.923.910.484,00

b. Konsesi dari Direktorat Jenderal Pehubungan Udara

Kronologis proses penyelesaian tagihan pembayaran konsesi atas pelayanan Jasa Kebandarudaraan antara Direktorat Bandar Udara dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sebagai berikut :

**Tabel F.3 Kronologis Proses Penyelesaian Tagihan Pembayaran
Konsesi atas Pelayanan Jasa Kebandarudaraan**

No	Tanggal	Uraian	Keterangan
1	28 Juni 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 2200/DBU/VI/2018 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero)	Surat Tagihan pertama
2	28 Juni 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 2201/DBU/VI/2018 kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	Surat Tagihan pertama
3	13 Agustus 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 2668/DBU/VIII/2018 kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	Surat Tagihan kedua
4	13 Agustus 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 2669/DBU/VIII/2018 kepada PT. Angkasa Pura I (Persero)	Surat Tagihan kedua
5	3 Oktober 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 3615/DBU/X/2018 kepada direktur PT. Angkasa Pura II (Persero)	Surat Tagihan ketiga
6	3 Oktober 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 3616/DBU/X/2018 kepada direktur PT. Angkasa Pura I (Persero)	Surat Tagihan ketiga
7	2 November 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 4095/DBU/XI/2018 kepada PT. Angkasa Pura II	Surat Tagihan keempat
8	2 November 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 4096/DBU/XI/2018 kepada PT. Angkasa Pura I	Surat Tagihan keempat
9	11 Desember 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 4623/DBU/XII/2018 kepada direktur PT. Angkasa Pura I (Persero)	Surat Tagihan kelima
10	11 Desember 2018	Surat Direktur Bandar Udara Nomor 4624/DBU/XII/2018 kepada direktur PT. Angkasa Pura II (Persero)	Surat Tagihan kelima

3. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama Pemanfaatan BMN di Kementerian Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan;
- 5) Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete.

b. Mekanisme Pelaksanaan KSP

- 1) Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
- 2) Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Kerjasama Pemanfaatan BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
 - a) Klasifikasi 1 Berupa:
 - (1) Tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ; dan/ atau
 - (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b) Klasifikasi 2 berupa:
- (1) Tanah dan/ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan/atau;
 - (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c) Klasifikasi 3 berupa:
- (1) Tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d) Klasifikasi 4 berupa:
- (1) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan/atau
 - (2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Persetujuan/penolakan usulan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi (Klasifikasi II); Kakanwil DJKN (Klasifikasi III) dan Kepala KPKNL (Klasifikasi IV).
 - b) Kepala Kantor / UPT/ Satker/ KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen (Klasifikasi I) ; tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi II - IV);
 - c) Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada

- Kepala Kantor/UPT/Satker/ KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
- d) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen (Klasifikasi I&II), Kakanwil DJKN (Klasifikasi III), KPKNL terkait (Klasifikasi IV);
 - e) Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama (Klasifikasi III);
 - f) Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Klasifikasi IV);
 - g) Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait (Klasifikasi I dan II);
 - h) Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Klasifikasi I); Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Klasifikasi II);
 - i) Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi I);
 - j) Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Klasifikasi II).
- 4) Kerjasama pemanfaatan BMN ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan BMN yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - b) Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal pengadaannya;
 - c) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang;
 - d) Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
 - (1) kontribusi tetap; dan
 - (2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.

- e) Kewenangan Pengelola Barang (Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara) dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan, yaitu:
 - (1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
 - (2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
- 5) Kerjasama pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah dilaksanakan pada KSOP Probolinggo dan KSOP Sintete, sedangkan yang sedang dalam proses pengusulan adalah KSOP Sorong, KSOP Ternate, KSOP Kendari, KSOP Biak, KSOP Lembar, KSOP Kupang, KSOP Tanjung Wangi, KSOP Pantoloan, KSOP Pare Pare, KSOP Manokwari, KSOP Merauke, KSOP Waingapu, KSOP Kalabahi, KSOP Badas, KSOP Ende, KSOP Fak Fak, KSOP Bitung dan KSOP Bima.
- 6) Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Probolinggo dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan
 - a) Obyek KSP BMN berupa tanah hasil reklamasi seluas 89.000 m2 dan dermaga seluas 24.161,5 m2 yang terletak di Pelabuhan Tembaga Baru, Jalan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Mayangan, Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp446.583.876.000,00 (empat ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - b) Mitra KSP adalah PT Delta Artha Bahari Nusantara sebagaimana ditetapkan Pengguna Barang yang merupakan operator Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
 - d) Kontribusi kepada negara berupa:
 - (1) kontribusi tetap per tahun sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,55% pertahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnya; dan Kontribusi Tetap untuk tahun pertama adalah sebesar Rp 2.232.919.380,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang telah di bayarkan ke kas umum negara pada tanggal 18-Aug-2017 dengan Nomor NTPN FA1CB1GP30T4MFFE.
 - (2) pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (*revenue*) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp42.300.000.000,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah). Penjualan (*revenue*) tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit.

- e) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - f) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
 - g) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.
- 7) Dasar persetujuan kerjasama pemanfaatan BMN pada KSOP Sintete dari Kementerian Keuangan adalah Surat Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-06/MK.6/WKN.11/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga Pada Kementerian Perhubungan RI cq. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sintete;
- a) Obyek KSP BMN berupa bangunan dermaga seluas 280 m² terletak di Jl. Pelabuhan No.1 Ds. Sintete, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai wajar sebesar Rp.8.115.306.000,00 (Delapan miliar seratus lima belas juta tiga ratus enam ribu rupiah).
 - b) Mitra KSP adalah PT. Pelindo II Cabang Pontianak.
 - c) Jangka waktu KSP Barang Milik Negara selama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
 - d) Kontribusi kepada negara berupa:
 - (1) Kontribusi tetap per tahun sebesar 0,7% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP dengan kenaikan sebesar 4,81% per tahun dari kontribusi tetap tahun pertama dan Kontribusi Tetap untuk tahun pertama adalah sebesar Rp 56,807,142 (lima puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang telah di bayarkan ke kas umum negara pada tanggal 18-Aug-2017 dengan Nomor NTPN 7CDCA1UKBU71ONH8;
 - (2) Pembagian keuntungan KSP sebesar 43,94% untuk pemerintah dan 56,06% untuk mitra KSP dari net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp1.120.020.000 (Satu milyar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah). Net *cash flow* dari kegiatan operasi dan investasi tersebut didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah di audit.
 - e) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

- f) Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah masa operasi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
- g) Dalam hal mitra KSP terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan KSP pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, mitra KSP wajib membayar denda paling sedikit 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Mitra KSP.

4. Pengalihan Personil Peralatan Pendanaan dan Dokumen (P3D)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 404 menyatakan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. P3D di Kementerian Perhubungan terdapat pada unit Eselon I yaitu Ditjen Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

a. Ditjen Perhubungan Darat

Berkaitan dengan Pencatatan Aset untuk Aset-Aset Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang sesuai hasil rapat tanggal 15 Desember 2016 tentang Pencatatan Aset Terminal Tipe A dan UPPKB (jembatan timbang) ke dalam Aset Ditjen Perhubungan Darat, berikut langkah-langkah yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait (Setditjen Hubdat, Kabag Keuangan Setditjen Hubdat, Direktorat BMN DJKN Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenhub, Biro Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub, Direktorat Prasarana), Pencatatan Aset Pengalihan Terminal Tipe A dan UPPKB sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Pencatatan Aset dilakukan apabila terjadi perpindahan hak kepemilikan yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima. Sesuai dengan PM No 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pencatatan Aset dilakukan apabila telah mendapatkan Nomor Registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.
- 2) Berkaitan dengan hal tersebut pada poin 1, disepakati pencatatan aset terkait dengan P3D ke dalam Neraca Laporan Keuangan Ditjen Hubdat dapat dilakukan setelah mendapatkan Nomor Registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Paling lambat pencatatan tersebut dilakukan pada Semester I Tahun 2017.
- 3) Pencatatan atas aset Barang Milik Negara tersebut dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar.
- 4) Data dukung bukti kepemilikan untuk Tanah berupa Sertifikat, Gedung dan Bangunan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila terdapat kekurangan dan atau bukti kepemilikan tidak dapat dilengkapi maka dapat

digantikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan/ Kecamatan/ Pemilik atau Instansi terkait (Pihak Pemberi).

- 5) Terkait Berita Acara Serah Terima yang belum selesai ditandatangani, maka pencatatan belum dapat dilakukan sampai proses administrasi selesai.
- 6) Apabila belum terdapat nilai perolehan atau nilai wajar maka Ditjen Hubdat agar berkoordinasi dengan Direktorat Penilaian DJKN untuk dilakukan penilaian atas asset dimaksud.

Sampai dengan 31 Desember 2018, posisi aset P3D untuk Terminal Tipe A dan UPPKB dapat dirinci sebagai berikut:

1) Terminal Tipe A

F.4 Posisi Aset P3D untuk Terminal Tipe A

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total Terminal Tipe A
66	16	23	11	28	144

Dari 144 Terminal Tipe A, terdapat 66 Terminal Tipe A yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan rincian 16 Terminal Tipe A dalam proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 23 Terminal Tipe A masih pada tahap Inventarisasi Akhir (Proses penyusunan BAST), 11 Terminal Tipe A yang sedang pada proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 28 Terminal Tipe A tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

F.5 Rincian 28 Terminal Tipe A yang Tidak Diserahkan

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
1	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Kp. Rambutan	Terminal Tipe A yang Termasuk dalam wilayah kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Aset Diserahkan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Terminal Pulo Gebang	
3	Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	Terminal Kalideres	
4	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	Terminal Baragnangsiang	
5	Provinsi Jawa Barat	Kota Bekasi	Terminal Induk Bekasi	
6	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	Terminal Kalijaya Cikarang	
7	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	Terminal Jatijajar	
8	Provinsi Banten	Kota Tangerang	Terminal Poris Plawad	
9	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	Terminal Pondok Cabe	

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
10	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	Terminal Majene	Tidak termasuk dalam simpul Terminal Tipe A sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tahun 2003 dan tidak termasuk dalam rencana penetapan lokasi Terminal Tipe A
11	Provinsi Bali	Kabupaten Gianyar	Terminal Gianyar	
12	Provinsi Bali	Kabupaten Buleleng	Terminal Banyuasri	
13	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	Terminal Kota Bangun	
14	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	Terminal Arga Makmur	
15	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	Terminal Penyabungan	
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar	Terminal Ubung	Terminal beralih fungsi menjadi Terminal Tipe C
17	Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh	Terminal Sungai Penuh	Terminal beralih fungsi menjadi kantor Pemerintah Kota Sungai Penuh
18	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	Terminal Sapen	Terminal beralih fungsi menjadi SPBU
19	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Terboyo	Terminal beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan barang
20	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	Terminal Banjarnegara	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
21	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	Terminal Situbondo	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
22	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	Terminal Ronggosukowati	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B dan sudah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
23	Provinsi NTB	Kabupaten Lombok Barat	Terminal Sweta	Terminal beralih fungsi menjadi lahan kosong
24	Provinsi NTT	Kabupaten Belu	Terminal Motoain	Terminal beralih fungsi menjadi kantor PLBN
25	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	Terminal Malalayang	Terminal beralih fungsi menjadi terminal tipe B. Sudah digantikan oleh terminal Liwas
26	Provinsi Bali	Kabupaten Karangasem	Terminal Karangasem	Merupakan Terminal Tipe C

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal	Permasalahan
27	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	Terminal Muara Enim	Setelah dilakukan evaluasi teknis oleh tim teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Terminal Regional Muara Enim dinyatakan tidak layak sebagai Terminal Tipe A. saat ini terminal hanya digunakan sebagai lahan parkir
28	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	Terminal Padang Bulan	Berdasarkan Surat No 550/5/28/Dishub/2018 Pemkab Labuhan Batu akan menggunakan terminal tersebut sebagai perkantoran organisasi perangkat daerah Kab Labuhan Batu serta menyarankan kemenhub untuk mencari lahan pengganti guna dibangun Terminal Tipe A

2) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Jumlah UPPKB yang sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan sejumlah 131 UPPKB. Dari 131 UPPKB tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

F.6 Posisi Aset P3D untuk UPPKB

Sudah Register	Proses BAST	Inventarisasi Akhir	Inventarisasi Awal	Tidak Diserahkan	Total UPPKB
102	16	16	1	6	141

Dari total jumlah 141 UPPKB, terdapat 102 UPPKB yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan telah tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terdapat 16 UPPKB yang sedang proses Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), 16 UPPKB yang masih dalam proses Inventarisasi Akhir (Proses Penyusunan BAST), 1 UPPKB masih dalam proses inventarisasi awal dimana Pemerintah Daerah masih belum memastikan rincian aset yang akan diserahkan dan 6 tidak diserahkan dengan penjelasan sebagai berikut:

F.7 Rincian UPPKB yang Tidak Diserahkan

No	Provinsi	Nama UPPKB	Justifikasi
1	Riau	Tarantang Manuk	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Palalawan, akan beralih fungsi.
2	Jawa Tengah	Butuh	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo, Sudah Tidak Beroperasi.
3	Jawa Tengah	Tugu	Lahan Milik Pemerintah Kota Semarang, akan beralih fungsi.
4	Jawa Tengah	Katon Sari	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Demak, Sudah Tidak Beroperasi.
5	Bengkulu	Air Sebakul	Lahan Milik Pemerintah Kota Bengkulu. Lokasinya tidak strategis sehingga tidak efektif untuk dioperasikan. UPPKB akan beralih fungsi.
6	Sulawesi Utara	Amurang	Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, akan beralih fungsi.

b. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan penandatanganan berita acara serah terima personal, pendanaan, prasarana dan sarana, dan dokumen (P3D) pada terminal Tipe A Baranangsiang Kota Bogor, Poris Plawad Kota Tangerang dan Jatijajar Kota Depok. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pemda Kota (Bupati/Walikota) tersebut dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub.

- Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Baranangsiang Kota Bogor dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor BA. 78 Tahun 2018 dan/atau 550/BA.108-BPKAD/2018.
- Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Poris Plawad Kota Tangerang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor BA.77 Tahun 2018 dan/atau 645/452-Dishub.
- Berita Acara Serah Terima P3D Terminal Tipe A Jatijajar Kota Depok dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor BA.138 Tahun 2018 dan/atau BA/04/BKD/2018.

Berdasarkan berita acara P3D tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melakukan registrasi hibah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI untuk memperoleh nomor registrasi hibah. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek memperoleh hibah langsung barang dari Pemerintah Kota Tangerang dengan nilai hibah Rp32.543.685.393,00 dan nomor register hibah 2MP29R5A, hibah langsung barang dari Pemerintah Kota Bogor dengan nilai hibah Rp57.388.740.507,00 dan nomor register hibah 2KQQL4AA, hibah langsung barang dari Pemerintah Kota Depok dengan nilai hibah Rp.139.488.373.445,00 dan nomor register hibah 2F6LRTVA dan hibah langsung barang dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan nilai hibah Rp78.299.105.847,00 dan nomor register hibah 24Y3R97A.

6. Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ Daftar Isian Proyek Kementerian/Lembaga) yang telah dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Total aset BPYBDS per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp12.297.377.154.982,00. Adapun rincian total aset BPYBDS per Eselon I adalah sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Darat	Rp. 745.010.352.803,00
b. Ditjen Perhubungan Laut	Rp. 1.071.769.075.504,00
c. Ditjen Perhubungan Udara	Rp. 10.480.597.726.675,00
Total	Rp. 12.297.377.154.982,00

Rincian jumlah aset BPYBDS per satker dapat dilihat pada **Lampiran F.1**.

7. Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT)

- a. Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016, dengan pendanaan APBN *Multi Years Contract* 2017-2018 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 21 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2018. Untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 01/KNT/LRTSS/VI/2017-01/WK-Kemenhub.LRT/D.II/2017 tanggal 30 Juni 2017 senilai sebesar Rp12.593.084.000.000,00.

- Nilai Kontrak telah di addendum dengan Addendum Nomor 1 tanggal 14 Februari 2018 menjadi sebesar Rp10.943.791.000.000,00. Pembayaran termin dilakukan berdasarkan surat tagihan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kemudian dilakukan reuiu pengukuran 77 atau perhitungan bersama di lapangan oleh konsultan pengawas dan pihak Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pada amanat Perpres 55 tahun 2016 Pasal 8, usulan penagihan pekerjaan yang telah disepakati tersebut dilakukan reuiu oleh BPKP terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.

- Tanggal 21 Desember 2018 Menteri Perhubungan melakukan usul perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Nomor: KU.003/12/16 Phb 2018 tentang Tambahan Penjelasan Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang semula 3 tahun (2016-2018) menjadi 5 tahun (2016-2020) dengan total anggaran berubah dari semula sebesar Rp12.593.084.000.000,00 menjadi sebesar Rp12.314.359.000.000,00. Usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan Nomor S-224/MK.2/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
- Rincian Kronologis Pembayaran Tahun 2017
 - Termin I PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin I berdasarkan Surat Nomor 566/WK/D.I/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp2.999.155.743.213,00. Terhadap total yang diajukan PT Waskita Karya tersebut dilakukan reviu oleh konsultan pengawas bersama-sama tim PPK Pembangunan LRT Sumsel dan PT. Waskita Karya dengan hasil reviu total yang dapat ditagihkan pada termin I menjadi Rp1.219.283.980.671,00. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran tagihan termin 1 berdasarkan surat 1807/WK/D.I/2017 tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp1.219.283.980.671,00. Sebelum dilakukan pembayaran usulan penagihan pekerjaan dilakukan reviu oleh 78 BPKP terlebih dahulu, dimana dari hasil reviu BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-298/PW07/2/2017 tanggal 19 Juni 2017. Berdasarkan hasil audit tersebut nilai tagihan pembayaran termin I adalah sebesar Rp997.298.576.584,00. Berdasarkan hasil audit dari BPKP, pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran tagihan termin I dengan Surat Nomor 1581/WK/D.I/2017 tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp997.298.576.584,00 lengkap dengan kuitansi pembayaran, faktur pajak dan Surat Setoran Pajak. Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin 1 dari pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 00340/SPM/LS/LRTSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp997.298.576.584,00 kepada KPPN Jakarta IV dan diterbitkan SP2D Nomor 171331303016471 tanggal 22 Juni 2017.

dengan kuitansi pembayaran, faktur pajak dan Surat Setoran Pajak. Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin III dari pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 181331303017807 tanggal 07 Juni 2018.

- Termin IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin IV berdasarkan Surat Nomor 1580/WK/D.I/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp6.842.979.060.138,38. Terhadap tagihan termin I, II dan III telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.962.341.027.648,59 sehingga tagihan pembayaran atas termin IV sebesar Rp4.880.638.032.489,79. Atas usulan penagihan pembayaran termin IV dilakukan revidi oleh BPKP dengan hasil revidi BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-483/D103/2018 tanggal 24 September 2018 dengan nilai tagihan yang dapat dibayarkan sebesar Rp4.222.881.475.559,25 (termasuk PPN). Atas dasar laporan hasil audit BPKP dan Surat Permohonan pembayaran termin III dari pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 181331303028134 tanggal 27 September 2018 sebesar Rp3.926.521.269.352,00. Dengan demikian terdapat tagihan termin IV yang belum dibayarkan sebesar Rp296.355.206.207,52 pada TA.2018 yang akan ditagihkan pada termin berikutnya.

- Rincian Kronologis Pembayaran Tahun 2019

- Termin V Bahwa terdapat Tagihan IV yang belum dibayarkan berdasarkan hasil audit BPKP Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp296.355.206.207,52 telah diakui sebagai utang pihak ketiga pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin V berdasarkan Surat Nomor 78/WK/D.I/2019 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp296.355.206.207,00. Atas dasar laporan hasil audit BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Nomor: LATT-483/D103/2018 tanggal 24 September 2018 dan Surat Permohonan pembayaran termin V dari pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, KPPN Jakarta IV menerbitkan SP2D Nomor 191331303000271 tanggal 25 Januari 2019.

b. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

Pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian terdapat Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dengan Surat Perjanjian

Kontrak Nomor : 1/K/PPPP.KA/LRTJ/3/17 dan nilai kontrak Tahun Jamak senilai Rp.269.816.854.100,00. Pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar Rp.51.133.602.224,00 dan pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.106.776.097.549,00 pembayaran berupa Jasa Konsultansi dilakukan menggunakan akun belanja barang.

8. Likuidasi Satker Inaktif

a. Satker Inaktif pada Kantor Pusat Ditjen Hubla

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki nilai likuidasi yang ditempatkan pada UAKPA Kantor Pusat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Perubahan Identitas Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan untuk 22 Satuan Kerja Sementara sebesar Rp2.079.695.173.514,00.

Kondisi saat ini masih tersisa 14 Satuan Kerja Sementara yang tercatat pada UAKPA Kantor Pusat sebesar Rp. 1.689.720.665.319,00 terdiri atas:

- 1) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rp. 72.849.106.000,00
- 2) Jalan Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan Rp. 1.616.871.559.319,00

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan segera melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Apabila keberadaan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut masih dilanjutkan oleh UPT Penerima segera dilakukan serah terima kepada UPT Penerima;
- 2) Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut akan dilanjutkan agar disiapkan anggaran penyelesaiannya;
- 3) Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan keberadaannya tidak ditemukan agar dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Lain Lain dan segera diusukan penghapusannya;
- 4) Apabila Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Kondisi Rusak Berat agar dilakukan Reklasifikasi menjadi Aset Lain Lain dan segera diusukan penghapusannya.

b. Satker Inaktif pada Ditjen Hubud

Ditjen Perhubungan Udara memiliki Satker Inaktif yang disebabkan karena :

- 1) Tidak lagi beroperasi disebabkan misi, fungsi, program kegiatan dan/atau tugas telah berakhir;
- 2) Perubahan identitas Kantor/Satker yang disebabkan karena penggabungan Kantor/Satker;
- 3) Tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun berikutnya

Dalam rangka proses likuidasi, telah diterbitkan SK Penanggung Jawab Likuidasi Nomor : KP 209 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2018. Berikut disampaikan proses likudasi yang akan dilakukan di setiap satuan kerja, sebagaimana terlampir.

- 1) Satuan Kerja yang sudah diusulkan proses likudasi ke KPPN, yaitu Satuan Kerja Bandar Udara Banyuwangi yang telah dialihkan ke PT. Angkasa Pura II melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
- 2) Satuan kerja Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya dialihkan ke PT. Angkasa Pura II melalui skema Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP).
- 3) Satuan kerja Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo dialihkan ke PT. Angkasa Pura II melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- 4) Terdapat tiga satuan kerja yang dilakukan likuidasi karena perubahan kode satker yaitu:
 - Bandar Udara Tanjung Harapan di Selor
Perubahan kode satker dari 539007 menjadi 417708
 - Bandar Udara Long Apung di Malinau
Perubahan kode satker dari 662841 menjadi 417720
 - Bandar Udara Seluing di Malinau
Perubahan kode satker dari 499547 menjadi 417706

9. Belanja Pemeliharaan berupa Pekerjaan Perawatan Prasarana dan Pengoperasian Perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation* / IMO)

Belanja Pemeliharaan berupa Pekerjaan Perawatan Prasarana dan Pengoperasian Perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation* / IMO) dilaksanakan oleh Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian dengan nilai kontrak sebesar Rp1.459.371.555.387,00 dan terealisasi sebesar Rp1.459.298.676.124,00 (99,99%).

Biaya perawatan prasarana dan pengoperasian Perkeretaapian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kontrak dengan PT. Kereta Api Indonesia (kontrak IMO) dan yang berasal dari pagu Rupiah Murni sebagai pendukung IMO.

Biaya perawatan prasarana dan pengoperasian Perkeretaapian sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.156 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

Untuk pelaksanaan pekerjaan Perawatan Prasarana dan Pengoperasian Perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation / IMO*) pada Tahun 2018 yang dikontrakan dengan PT. KAI memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.325.000.000.000,00 dan terealisasi 100%. Pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.1140 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018 dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan No. HK.207/SK/144/DJKA/7/15 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) /Prosedur Operasi Baku (POB)* Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO).

Selain itu, selama tahun 2018 terdapat pekerjaan untuk mendukung kegiatan IMO yang berasal dari Rupiah Murni dengan total pagu anggaran sebesar Rp134.371.555.387,00 dan realisasinya sebesar Rp134.298.676.124,00 (99,95%) yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk daerah Jawa dan Sumatera sebesar Rp18.798.490.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.798.490.000,00
- b. Pekerjaan Pengadaan Bantalan Beton untuk daerah Jawa dan Sumatera sebesar Rp16.329.123.875,00 dengan realisasi sebesar Rp16.284.074.612,00
- c. Pekerjaan Pengadaan Bantalan Kayu untuk daerah Jawa dan Sumatera sebesar Rp24.270.491.457,00 dengan realisasi sebesar Rp24.242.661.457,00
- d. Pekerjaan Perawatan Perlintasan Sebidang Metode Perkerasan Lentur di Wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Sumatera sebesar Rp21.629.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.629.810.000,00
- e. Kegiatan Pembongkaran Perlintasan Sebidang Tidak Resmi atau Liar Divre II Sumatera Barat sebesar Rp336.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp336.158.000,00
- f. Pekerjaan Perawatan Pintu Perlintasan Sebidang sebesar Rp2.633.474.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.633.474.000,00
- g. Pekerjaan Perbaikan Kestabilan Lereng Jalur Kereta Api dan Perbaikan Tubuh Baan Labil beserta supervisi sebesar Rp31.982.432.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.982.432.000,00
- h. Pekerjaan Perbaikan Korektif Jalan Rel beserta supervisi sebesar Rp3.407.796.700,00 dengan realisasi sebesar Rp3.407.796.700,00

- i. Pekerjaan Konstruksi Jembatan Darurat Kereta Api sebesar Rp4.298.819.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.298.819.000,00
- j. Penggantian Biaya Rintang Jalan sebesar Rp10.684.960.355,00 dengan realisasi sebesar Rp10.684.960.355,00

10. Pekerjaan *Overhaul* (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Udara Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP)

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Tuntutan Hukum terhadap Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) dari pihak swasta atas pekerjaan *Overhaul* (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 (Satu) Paket Tahun Anggaran 2018. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

- a. PPK dan PT. SUN menandatangani kontrak perjanjian tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor Kontrak: 15/KTR.523121/BBKFP/2018;
- b. Kontrak Pekerjaan dilakukan Addendum dikarenakan bahwa terjadi rembesan oli pada ke empat *engine* demi keselamatan pada angkutan penerbangan dan peraturan pengangkutan berbahaya (*Dangerous Goods Regulation*) pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor: 322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018;
- c. Pembayaran Uang Muka Sesuai dengan Kontrak Perjanjian Sebesar 20% x Rp24.744.951.000,00 = Rp4.948.990.200,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- d. PT SUN mengajukan tuntutan hukum meminta ganti rugi sebesar Rp41.425.534.710,00 (empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) kepada BBKFP, yang merupakan penjumlahan dari tagihan prestasi pemeliharaan besar (*over haul*) mesin PT6A-52 sebesar Rp24.744.951.000,00 dan pekerjaan tambahan sebesar Rp13.970.502.000,00 dan ganti rugi keterlambatan sebesar 7% setiap bulannya atau sebesar Rp2.710.081.710,00.
- e. Per tanggal 22 Pebruari 2019 dua Engine yang ada di Bea Cukai dengan Seri PCE RX-0318 dan PCE RX-0319 sudah sampai di BBKFP dan sudah dilakukan pemasangan serta *test flight* pada pesawat PK-CAN. Sedangkan 2 engine lagi masih berada di Euravia Inggris dengan Seri PCE RX-0308 dan PCE RX-0309.
- f. Kondisi yang sedang berlangsung dalam Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :
 - 1) Sidang pertama, kedua, ketiga, ke empat dimulai dari tanggal 20 Pebruari 2019, 27 Pebruari 2019, 6 Maret 2019, 13 Maret 2019 dilakukan mediasi antara BBKFP dan PT.SUN oleh perintah dari Pengadilan Negeri Tangerang. Sampai dengan sidang ke empat tidak ada hasil mediasi dan hakim mediasi memerintahkan kedua belah pihak sidang.

- 2) Sidang ke lima pihak PT.SUN menyampaikan Replik (jawaban PT.SUN terhadap jawaban PPK BBKFP atas gugatannya) ke Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2019
- 3) Sidang ke enam tanggal 27 Maret 2019 pihak BBKFP tidak hadir sidang dikarenakan belum siap menyampaikan Duplik Ke Pengadilan Negeri Tangerang.
- 4) Sidang ke tujuh pihak BBKFP menyampaikan Duplik (jawaban PPK BBKFP terhadap replik yang diajukan PT.SUN) ke Pengadilan negeri tangerang tanggal 4 April 2019;
- 5) Sidang ke delapan tanggal 9 April 2019 pihak PT.SUN menyampaikan daftar alat bukti ke Pengadilan Negeri Tangerang;
- 6) Sidang Ke sembilan tanggal 22 April 2019 pihak BBKFP menyampaikan daftar alat bukti ke Pengadilan Negeri Tangerang.

11. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Tahun 2017 yang Belum Terealisasi pada Direktorat Sarana Perhubungan Darat

Terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Tahun 2017 yang belum terealisasi pada Direktorat Sarana Perhubungan Darat, hal ini disebabkan faktor sarana, prasarana, sumber daya manusia (SDM), regulasi, serta pengembangan teknologi yang masih belum memadai, seperti:

- a. jumlah printer yang masih kurang
- b. belum adanya sistem khusus dalam rangka pelayanan SRUT
- c. tempat/ruangan penerbitan SRUT yang cukup sempit
- d. SDM yang secara khusus untuk menangani SRUT masih belum tersedia
- e. regulasi terkait SRUT belum sempurna jadi secara keseluruhan pelayanan terhadap penerbitan SRUT masih belum optimal,

Terhadap potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Direktorat Sarana Perhubungan Darat tersebut Tahun 2017, akan dilakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan melibatkan pihak Agen Pemegang Merek (APM) pada Tahun 2019.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat peningkatan signifikan realisasi PNBP dari Jasa Penerbitan SRUT sebesar Rp857.097.400.000,00 dari target PNBP Tahun 2018 sebesar Rp499.500.000.000,00 dengan

upaya-upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan layanan PNBP SRUT berupa:

- a. Pengadaan *printer printonix* sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit printer, dimana 1 (satu) unit *printer* dapat menghasilkan 1.500 lembar per hari per jam kerja;
- b. Telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operasional penerbitan SRUT sebanyak 40 orang (Pegawai Non-PNS atau PPNPN);
- c. Menambah ruangan untuk kegiatan pencetakan SRUT di ruang lantai dasar Gedung Cipta;
- d. Dilakukan validasi data SRUT kepada Agen Pemegang Merk (APM) sebanyak 2 (dua) kali sebagai dasar penagihan potensi PNBP yang belum terealisasi;
- e. Pendampingan SDM IT dari Pustikom terkait layanan SRUT menggunakan *VTA Online*;
- f. Pengembangan layanan *VTA Online* pada Surat Keputusan Rancang Bangun;
- g. Pengadaan sistem aplikasi (*software* dan *hardware*) untuk membantu penatausahaan, pengelolaan blanko SRUT.

Pada Tahun 2019, terdapat realisasi PNBP dari Jasa Penerbitan SRUT per tanggal 17 April 2019 sebesar Rp416.200.295.128,00 dari target PNBP Tahun 2019 sebesar Rp820.000.000.000,00 dengan upaya yang akan dilakukan dalam peningkatan layanan PNBP Tahun 2019 adalah diberlakukannya *e-SRUT* bekerja sama dengan Korlantas POLRI guna percepatan pelayanan dan meminimalisasi penggunaan Blanko Cetak SRUT.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran B.1. Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BALITBANG	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0	389.237.510.116	0	0	828.745.597.119	0	1.217.983.107.235
2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	0	0	0	8.403.068.075	0	0	104.324.999.439	0	112.728.067.514
3. Pendapatan Dari Alokasi APBN	0	0	0	0	13.614.223.802	0	0	38.299.096.813	0	51.913.320.615
4. Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0	14.982.495.767	0	0	44.173.645.904	0	59.156.141.671
5. Pendapatan Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	2.319.622.151	1.310.800	1.265.887.100	4.145.137.969	15.966.872.329	4.415.837.000	24.500.000	4.353.206.603	0	32.492.373.952
6. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	7.142.650.000	0	57.358.418.436	36.978.941.000	0	0	0	101.480.009.436
7. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	0	0	0	2.576.200	0	0	15.384.180.913	0	15.386.757.113
8. Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika	0	0	952.874.662.352	3.578.609.495.057	877.788.766.827	907.479.818.245	0	0	2.855.200.000	6.319.607.942.481
9. Pendapatan Jasa Lainnya	1.921.163.996	0	0	0	50.950.000	0	0	271.150	0	1.972.385.146
10. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan	0	0	28.707	321.546.350	34.231.314	4.000.000	0	2.561.237	3.014.902	365.382.510
11. Pendapatan Denda	0	0	2.766.951.513	13.283.545.804	4.896.733.025	9.419.712.600	0	6.745.728.519	58.244.256	37.170.915.717
12. Pendapatan Lain-lain	1.999.970.051	1.850.000	40.735.114.878	63.257.555.912	75.813.499.149	59.034.469.104	770.182.393	22.074.833.864	186	263.687.475.537
Jumlah Pendapatan	6.240.756.198	3.160.800	1.004.785.294.550	3.659.617.281.092	1.458.149.345.040	1.017.332.777.949	794.682.393	1.064.104.121.561	2.916.459.344	8.213.943.878.927

Lampiran B.2. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BALITBANG	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	51.895.959.627	17.780.813.199	225.480.347.514	895.423.243.985	404.225.205.084	36.735.322.601	14.575.577.885	181.741.023.967	6.369.740.727	1.834.227.234.589
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Gaji Dokter PTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	138.886.500	0	0	0	0	0	138.886.500
Belanja Honorarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Lembur	904.231.000	0	4.021.182.000	54.152.451.750	11.619.494.350	388.145.350	644.197.000	10.544.727.500	32.502.000	82.306.930.950
Belanja Vakasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tunj Khusus dan Belanja Peg Transito	57.396.521.355	18.696.328.520	202.173.025.706	810.656.563.034	354.398.125.815	40.064.044.009	15.173.037.945	114.228.553.450	7.609.436.858	1.620.395.636.692
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	110.196.711.982	36.477.141.719	431.674.555.220	1.760.371.145.269	770.242.825.249	77.187.511.960	30.392.812.830	306.514.304.917	14.011.679.585	3.537.068.688.731
Pengembalian Belanja Pegawai	(122.366.018)	(407)	(19.849.017)	(498.580.291)	(971.769.693)	(6.901.790)	(107.001.048)	(130.527.721)	(2.872.451)	(1.859.868.436)
Jumlah Belanja Bersih	110.074.345.964	36.477.141.312	431.654.706.203	1.759.872.564.978	769.271.055.556	77.180.610.170	30.285.811.782	306.383.777.196	14.008.807.134	3.535.208.820.295

Lampiran B.3. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BALITBANG	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Barang Operasional	77.732.579.755	3.701.847.815	258.868.716.979	384.170.277.132	523.841.494.128	52.465.612.402	4.122.932.641	219.975.032.305	16.311.820.554	1.541.190.313.711
Belanja Barang Non Operasional	59.369.843.327	3.300.254.400	800.031.834.291	1.548.921.604.640	590.916.461.099	288.484.289.122	40.513.623.533	767.124.887.432	12.741.827.793	4.111.404.625.637
Belanja Barang Persediaan	11.635.511.336	1.138.445.870	62.131.716.265	67.655.555.143	94.071.289.134	13.734.423.778	2.176.594.150	74.786.126.752	3.772.258.529	331.101.920.957
Belanja Jasa	42.802.451.978	8.747.465.001	121.686.841.909	244.103.807.887	144.235.212.021	183.139.155.823	8.915.863.438	103.780.533.300	5.687.108.504	863.098.439.861
Belanja Pemeliharaan	45.344.678.192	1.605.588.696	230.723.971.322	1.466.119.784.646	431.217.426.226	1.492.978.694.606	2.154.956.743	252.854.039.523	10.391.595.883	3.933.390.735.837
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	104.523.506.521	39.568.839.011	237.080.667.403	447.341.823.644	349.919.927.047	133.143.072.081	35.630.419.593	342.030.693.300	25.067.696.456	1.714.306.645.056
Belanja Perjalanan Luar Negeri	12.313.630.670	261.913.468	3.938.457.188	11.452.825.709	29.655.508.974	1.433.914.062	2.506.499.769	1.525.177.302	741.482.000	63.829.409.142
Belanja Barang BLU	0	0	0	0	190.945.241.581	0	0	963.983.433.092	0	1.154.928.674.673
Belanja Barang utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	493.690.654.793	212.747.678.374	0	0	0	0	147.953.405	706.586.286.572
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	45.049.205.942	0	0	0	0	0	0	45.049.205.942
Jumlah Belanja Kotor	353.722.201.779	58.324.354.261	2.253.202.066.092	4.382.513.357.175	2.354.802.560.210	2.165.379.161.874	96.020.889.867	2.726.059.923.006	74.861.743.124	14.464.886.257.388
Pengembalian Belanja	(115.373.462)	-	(1.025.124.042)	(4.196.481.216)	(734.421.125)	(282.679.766)	(7.732.644)	(439.337.158)	(784.000)	(6.801.933.413)
Jumlah Belanja Bersih	353.606.828.317	58.324.354.261	2.252.176.942.050	4.378.316.875.959	2.354.068.139.085	2.165.096.482.108	96.013.157.223	2.725.620.585.848	74.860.959.124	14.458.084.323.975

Lampiran B.4. Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2018

KEGIATAN	DIPA AWAL		SETELAH REVISI		KONTRAK / SPK			NAMA PENYEDIA JASA	JADWAL KONTRAK / SPK TANGGAL		% REAL KUMULATIF KONTRAK / SPK			KETERANGAN
	VOLUME / SATUAN	PAGU PER JENIS KEGIATAN (Rp)	VOLUME / SATUAN	PAGU PER JENIS KEGIATAN (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR / TANGGAL KONTRAK	SISA KONTRAK		MULAI	SELESAI	KEUANGAN (Rp)	%	% FISIK	
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-2	1 Trayek				26.935.307.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	16.229.970.234	60%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-4	1 Trayek				57.323.029.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	33.127.823.366	58%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-6	1 Trayek				28.704.036.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	16.882.708.507	59%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-13	1 Trayek				29.415.762.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	15.430.246.550	52%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-14	1 Trayek				27.489.723.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	17.967.421.856	65%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-15	1 Trayek	261.283.640.000			30.424.970.000	01/kontrak-TL/Pelni/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. PELNI	31 Mei 2018	31 Desember 2018	9.982.477.288	33%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN PT. ASDP T-1	1 Trayek				14.728.587.000	01/kontrak-TL-1/ASDP/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. ASDP	4 Juni 2018	31 Desember 2018	11.780.125.000	80%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN PT. ASDP T-3	1 Trayek				12.921.815.000	01/kontrak-TL-3/ASDP/PPK/VI/Ditlala-2018		PT. ASDP	26/06	31 Desember 2018	9.878.271.000	76%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN PT. Djakarta Lloyd	3 Trayek				29.172.253.559	01/kontrak-TL/DL/PPK/IX/Ditlala-2018		PT. DJAKARTA LLOYD	26 Juni 2018	31 Desember 2018	12.738.996.362	44%	100%	Subsidi Kapal
Bank Garansi Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-2, T-4, T-6, T-13, T-14, T-15 dan Kapal Penghubung T-4											70.000.000.000			
TOTAL BUMN	11 Trayek	261.283.640.000			257.115.482.559						214.018.040.163	83,24	100,00	
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-5)	1 Trayek				35.116.169.626	Kontrak/Tol-Laut/T-5/PPK/IV/Ditlala-2018 Tanggal 10 April 2018		PT. MENTARI	10 Mei 2018	31 Desember 2018	34.700.511.376	99%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-7)	1 Trayek				18.387.692.400	Kontrak/Tol-Laut/T-7/PPK/III/Ditlala-2018 Tanggal 15 Maret 2018		PT. MENTARI	15 Maret 2018	31 Desember 2018	18.387.692.402	100%	100%	
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-8)	1 Trayek				33.651.433.245	Kontrak/Tol-Laut/T-8/PPK/IV/Ditlala-2018 Tanggal 12 April 2018		PT. MENTARI	12 April 2018	31 Desember 2018	21.101.531.027	63%	100%	Subsidi Kapal
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-9)	1 Trayek	186.299.167.000			5.082.000.000	Kontrak/Tol-Laut/T-9/PPK/IV/Ditlala-2018 Tanggal 2 April 2018		PT. TEMAS	6 April 2018	31 Desember 2018	2.405.600.000	47%	100%	Subsidi kontainer
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-10)	1 Trayek				19,76	Kontrak/Tol-Laut/T-10/PPK/IV/Ditlala-2018 Tanggal 10 April 2018		PT. MENTARI	10 April 2018	31 Desember 2018	Tidak dibayarkan		100%	Subsidi kontainer
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-11)	1 Trayek				1.573			PT. TEMAS	7 April 2018	31 Desember 2018	Tidak dibayarkan		100%	Subsidi kontainer
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh PT. Swasta (T-12)	1 Trayek				9.020.000.176	Kontrak/Tol-Laut/T-12/PPK/III/Ditlala-2018 Tanggal 21 Maret 2018		PT. MERATUS	22 Maret 2018	31 Desember 2018	7.323.625.000	81%	100%	Subsidi kontainer
TOTAL NON BUMN (SWASTA)	7 Trayek	186.299.167.000			101.257.297.040						83.918.959.805	82,88	100,00	
TOTAL	NILAI PAGU	447.582.807.000												
	REVISI PAGU	419.894.640.000			358.372.779.599						297.936.999.968	83,14	100,00	

Keterangan :

Bank Garansi Penyelenggaraan Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut oleh BUMN (PT PELNI) T-2, T-4, T-6, T-13, T-14, T-15 dan Kapal Penghubung T-4 sebesar Rp70.000.000.000,00, yang terealisasi adalah sebesar Rp45.068.959.134,00. Terdapat nilai yang harus dikembalikan ke kas negara sebesar Rp24.931.040.866,00.

Lampiran B.5. Realisasi Belanja Barang Subsidi Perintis Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2018

NO.	PELABUHAN PANGKAL	KODE TRAYEK	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KAPAL UTAMA	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KUMULATIF (NILAI KONTRAK)		
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	MEULABOH	R-1	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 35 / 750	6.708.511.581	6.708.511.581	6.708.511.581	100%	100%
2	CALANG	R-2	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 108 / 1200	10.349.137.000	9.898.447.098	9.529.574.222	96%	96%
3	TELUK BAYUR	R-3	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 109 / 1200	11.384.313.000	10.480.330.700	4.579.483.540	44%	44%
4	TELUK BAYUR	R-4	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 37 / 1200	7.487.083.294	7.487.083.294	7.487.083.294	100%	100%
5	BENGKULU	R-5	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 52 / 750	6.472.521.878	6.470.640.238	6.470.640.238	100%	100%
6	TG. PINANG	R-6	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 30 / 1200	7.620.538.036	7.620.538.036	7.620.538.036	100%	100%
7	TG. PINANG	R-7	PT. PELNI	KM. Gunung Bintang / 750	9.259.138.582	9.259.138.582	9.259.138.582	100%	100%
8	KIJANG	R-8	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 39 / 1200	7.614.187.579	7.614.187.579	7.614.187.579	100%	100%
9	SINTETE	R-9	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 59 / 750	10.199.820.000	8.665.647.500	7.948.620.500	92%	100%
10	PONTIANAK	R-10	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 93 / 1200	14.593.835.000	11.880.786.500	8.928.214.000	75%	83.33%
11	SUNDA KELAPA	R-11	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 66 / 200	5.050.974.973	5.050.974.973	5.050.974.973	100%	100%
12	KOTABARU	R-12	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 55 / 750	4.781.823.259	4.781.823.259	4.781.823.259	100%	100%
13	TARAKAN	R-13	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 116 / 750	10.517.944.000	9.871.671.194	8.124.790.416	82%	82%
14	SEMARANG	R-14	PT. SWASTA	KM. Bukit Patung / 350	7.156.039.000	6.171.940.380	6.100.275.700	99%	99%
15	SEMARANG	R-15	PT. SWASTA	KM. Bandanaira / 500	8.223.668.000	5.072.862.960	4.883.562.000	96%	96%
16	SURABAYA	R-16	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 56 / 750	6.537.053.478	6.537.053.478	6.537.053.478	100%	100%
17	SURABAYA	R-17	PT. PELNI	KM. Amukti Palapa / 500	5.790.872.877	5.790.872.877	5.790.872.877	100%	100%
18	SURABAYA	R-18	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 99 / 1200	12.898.934.000	11.944.062.000	11.944.062.000	100%	100%
19	SURABAYA	R-19	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 27 / 500	4.689.530.348	4.689.530.348	4.689.530.348	100%	100%
20	MAKASSAR/BIRIN	R-20	PT. PELNI	KM. Entebe Express / 500	5.803.641.971	5.803.641.971	5.803.641.971	100%	100%
21	BIMA	R-21	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 104 / 1200	14.144.480.000	9.221.456.357	8.519.454.597	92%	92%
22	BIMA	R-22	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 111 / 1200	13.105.332.000	9.138.378.852	8.409.514.197	92%	92%
23	KUPANG	R-23	PT. PELNI	KM. Nemberala / 350	5.090.548.041	5.090.548.041	5.090.548.041	100%	100%
24	KUPANG	R-24	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 49 / 2000	9.533.117.018	9.533.117.018	9.533.117.018	100%	100%
25	KUPANG	R-25	PT. PELNI	KM. Nangalala / 350	4.038.365.925	4.038.365.925	4.038.365.925	100%	100%

NO.	PELABUHAN PANGKAL	KODE TRAYEK	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KAPAL UTAMA	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KUMULATIF (NILAI KONTRAK)		
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
26	KUPANG	R-26	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 103 / 1200	11.901.552.000	11.620.370.000	10.994.769.200	95%	95%
27	MAUMERE	R-27	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 101 / 1200	12.131.353.000	11.988.180.000	11.626.882.200	97%	97%
28	MAUMERE	R-28	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 105 / 1200	11.468.558.000	11.357.119.000	10.983.662.670	97%	97%
29	POSO	R-29	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 106 / 1200	13.316.351.000	11.519.000.000	10.273.702.560	89%	89%
30	WANI	R-30	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 81 / 2000	18.763.332.000	17.987.755.200	17.790.621.500	99%	99%
31	BITUNG	R-31	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 38 / 1200	6.632.446.124	6.632.446.124	6.632.446.124	100%	100%
32	BITUNG	R-32	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 51 / 1200	7.564.954.210	7.564.954.210	7.564.954.210	100%	100%
33	TAHUNA	R-33	PT. PELNI	KM. Meliku Nusa / 500	5.508.678.389	5.508.678.389	5.508.678.389	100%	100%
34	TAHUNA	R-34	PT. PELNI	KM. Berkat Taloda / 750	6.336.197.314	6.336.197.314	6.336.197.314	100%	100%
35	PAGIMANA	R-35	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 94 / 1200	10.942.952.000	10.224.628.776	5.737.143.406	56%	56%
36	KOLONEDALE	R-36	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 95 / 1200	13.379.911.000	12.869.762.400	12.353.612.165	96%	96%
37	KENDARI	R-37	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 107 / 1200	16.826.892.000	8.956.601.053	6.975.428.968	78%	97.26%
38	KENDARI	R-38	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 73 / 2000	16.089.973.000	10.876.805.695	10.398.756.172	96%	97.26%
39	KENDARI	R-39	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 69 / 2000	16.267.688.000	10.409.441.028	10.064.177.250	97%	97%
40	GORONTALO	R-40	PT. SWASTA	KM. Darakinusa / 750	11.089.548.000	9.563.000.000	8.778.659.592	92%	100%
41	TILAMUTA	R-41	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 113 / 750	11.824.319.000	9.430.800.000	9.380.467.396	99%	99%
42	KWANDANG	R-42	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 36 / 500	5.788.752.137	5.788.752.137	5.788.752.137	100%	100%
43	MAKASSAR/BIRIN	R-43	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 50 / 1200	12.284.384.731	12.284.384.731	12.284.384.731	100%	100%
44	AMBON	R-44	PT. PELNI	KM. Papua Dua / 350	4.912.151.989	4.912.151.989	4.912.151.989	100%	100%
45	MAMUJU	R-45	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 70 / 2000	16.948.446.000	16.819.483.175	13.828.595.674	82%	82%
46	AMBON	R-46	PT. PELNI	KM. Maloli / 500	5.043.062.608	5.043.062.608	5.043.062.608	100%	100%
47	AMBON	R-47	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 74 / 2000	16.701.078.000	13.405.228.042	5.013.177.497	37%	37%
48	AMBON	R-48	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 75 / 2000	17.087.659.000	13.629.553.052	1.010.267.767	7%	7%
49	AMBON	R-49	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 31 / 1200	7.784.636.000	7.784.636.000	7.784.636.000	100%	100%
50	AMBON	R-50	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 43 / 2000	10.370.997.978	10.370.997.978	10.370.997.978	100%	100%
51	AMBON	R-51	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 33 / 1200	8.022.493.949	8.022.493.949	8.022.493.949	100%	100%

NO.	PELABUHAN PANGKAL	KODE TRAYEK	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KAPAL UTAMA	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KUMULATIF (NILAI KONTRAK)		
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
52	AMBON	R-52	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 48 / 2000	9.979.634.767	9.979.634.767	9.979.634.767	100%	100%
53	AMBON	R-53	PT. SWASTA	KM. Manusela / 500	8.123.908.000	5.942.714.040	666.118.056	11%	11%
54	TUAL	R-54	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 84 / 2000	15.770.800.000	12.605.822.000	9.968.762.578	79%	79%
55	TUAL	R-55	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 85 / 2000	19.150.453.000	15.846.077.000	8.857.314.184	56%	56%
56	TUAL	R-56	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 86 / 2000	17.631.824.000	15.618.399.800	10.039.478.204	64%	64%
57	TUAL	R-57	PT. SWASTA	KM. Tanjung Tungkor / 750	10.373.526.000	9.442.706.300	4.373.005.679	46%	46%
58	TUAL	R-58	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 87 / 2000	19.349.891.000	16.980.486.400	12.022.623.397	71%	71%
59	SAUMLAKI	R-59	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 71 / 2000	19.273.176.000	17.450.668.800	9.330.160.544	53%	53%
60	SAUMLAKI	R-60	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 41 / 1200	7.171.980.424	7.171.980.424	7.171.980.424	100%	100%
61	SAUMLAKI	R-61	PT. PELNI	Km. Sabuk Nusantara 34 / 1200	7.113.260.636	7.113.260.636	7.113.260.636	100%	100%
62	SAUMLAKI	R-62	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 72 / 2000	17.470.541.000	16.049.690.715	9.454.893.506	59%	59%
63	SAUMLAKI	R-63	PT. PELNI	KM. Wetar / 750	6.390.232.978	6.390.232.978	6.390.232.978	100%	100%
64	TERNATE	R-64	PT. SWASTA	KM. Kie Raha III / 500	8.402.268.000	7.913.751.400	7.334.747.596	93%	100%
65	TERNATE	R-65	PT. SWASTA	KM. Kie Raha II / 500	7.835.473.000	7.638.268.100	5.893.092.760	77%	100%
66	TERNATE	R-66	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 40 / 1200	8.656.414.123	8.656.414.123	8.656.414.123	100%	100%
67	TERNATE	R-67	PT. PELNI	KM. Kie Raha I / 500	4.194.203.156	4.194.203.156	4.194.203.156	100%	100%
68	BABANG	R-68	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 76 / 2000	16.214.801.000	15.182.540.100	15.182.540.100	100%	100%
69	BABANG	R-69	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 96 / 1200	10.631.901.000	10.301.199.400	10.099.779.290	98%	98%
70	KENDARI	R-70	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 53 / 750	5.687.687.474	5.687.687.474	5.687.687.474	100%	100%
71	SANANA	R-71	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 77 / 2000	16.570.887.000	14.829.268.568	14.382.359.082	97%	97%
72	JAYAPURA	R-72	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 44 / 2000	10.857.952.762	10.857.952.762	10.857.952.762	100%	100%
73	JAYAPURA	R-73	PT. SWASTA	Kapal Swasta / 350	6.203.626.000	3.691.314.000	3.265.608.992	88%	88%
74	JAYAPURA	R-74	PT. PELNI	KM. Papua Empat / 200	4.769.266.311	4.769.266.311	4.769.266.311	100%	100%
75	JAYAPURA	R-75	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 78 / 2000	17.105.999.000	8.429.243.704	5.267.464.311	62%	62%
76	JAYAPURA	R-76	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 29 / 500	5.337.373.205	5.337.373.205	5.337.373.205	100%	100%
77	BIAK	R-77	PT. PELNI	KM. Papua Lima / 500	5.153.640.746	5.153.640.746	5.153.640.746	100%	100%
78	BIAK	R-78	PT. PELNI	KM. Papua Satu / 350	4.252.097.658	4.252.097.658	4.252.097.658	100%	100%

NO.	PELABUHAN PANGKAL	KODE TRAYEK	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KAPAL UTAMA	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KUMULATIF (NILAI KONTRAK)		
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
79	BIAK	R-79	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 64 / 500	7.314.748.000	7.169.536.000	7.096.397.218	99%	99%
80	MERAUKE	R-80	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 65 (Utama) dan KM. Sabuk Nusantara 45 (Pengganti) / 200	6.931.237.000	6.838.917.261	3.362.280.590	49%	49%
81	MERAUKE	R-81	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 47 / 200	5.024.452.841	5.024.452.841	5.024.452.841	100%	100%
82	MERAUKE	R-82	PT. PELNI	KM. Papua Enam / 350	5.818.472.116	5.818.472.116	5.818.472.116	100%	100%
83	MERAUKE	R-83	PT. SWASTA	Kapal Swasta / 750	6.310.616.000	6.211.859.791	3.602.362.620	58%	58%
84	MERAUKE	R-84	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 28 / 750	5.483.910.093	5.483.910.093	5.483.910.093	100%	100%
85	MERAUKE	R-85	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 114 / 750	9.532.991.000	9.450.128.831	4.490.180.498	48%	48%
86	MERAUKE	R-86	PT. SWASTA	Kapal Swasta / 350	6.003.723.000	5.571.277.604	3.009.863.960	54%	54%
87	MANOKWARI	R-87	PT. PELNI	KM. Kasuari Pasifik I / 500	6.344.741.374	6.344.741.374	6.344.741.374	100%	100%
88	MANOKWARI	R-88	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 46 / 200	5.069.693.000	5.007.542.400	1.001.508.480	20%	20%
89	MANOKWARI	R-89	PT. PELNI	KM. Kasuari Pasifik III / 500	6.550.630.953	6.550.630.953	6.550.630.953	100%	100%
90	MANOKWARI	R-90	PT. PELNI	KM. Kasuari Pasifik II / 500	4.848.744.399	4.848.744.399	4.848.744.399	100%	100%
91	SORONG	R-91	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 32 / 1200	8.725.044.102	8.725.044.102	8.725.044.102	100%	100%
92	SORONG	R-92	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 115 / 750	9.116.474.000	7.882.833.360	6.477.853.298	82%	82%
93	SORONG	R-93	PT. SWASTA	Kapal Swasta / 200	4.703.806.000	4.390.228.800	4.285.276.723	98%	98%
94	SORONG	R-94	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 112 / 750	9.221.436.000	7.961.637.960	7.639.351.208	96%	96%
95	SORONG	R-95	PT. PELNI	KM. Sabuk Nusantara 42 / 1200	9.334.107.613	9.334.107.613	9.334.107.613	100%	100%
96	SORONG	R-96	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 61 / 750	9.754.875.000	8.560.501.920	8.305.633.524	97%	97%
97	MAUMERE	R-97	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 88 / 2000	12.329.629.000	12.177.962.000	11.725.326.600	96%	96%
98	SANANA	R-98	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 97 / 1200	10.704.207.000	10.587.398.631	8.767.381.115	83%	83%
99	SAUMLAKI	R-99	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 98 / 1200	11.158.000.000	10.240.115.700	3.517.405.750	34%	34%
100	SAUMLAKI	R-100	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 110 / 1200	12.968.558.000	12.174.418.280	6.915.051.500	57%	57%
101	SEMARANG	R-101	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 92 / 1200	14.258.768.000	11.923.366.400	11.377.737.400	95%	95%
102	WANI	R-102	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 100 / 1200	12.076.224.000	11.590.418.000	10.542.328.000	91%	91%

NO.	PELABUHAN PANGKAL	KODE TRAYEK	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KAPAL UTAMA	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI KUMULATIF (NILAI KONTRAK)		
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
103	WAINGAPU	R-103	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 79 / 2000	11.354.810.000	11.193.785.000	7.824.988.000	70%	70%
104	WAINGAPU	R-104	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 80 / 2000	11.956.447.000	11.832.040.000	6.107.305.000	52%	52%
105	BIMA	R-105	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 89 / 2000	13.984.315.000	14.617.473.002	14.617.473.002	100%	100%
106	CILACAP	R-106	PT. SWASTA	Kapal Swasta / 3300	17.880.023.025	13.146.822.499	5.850.726.992	45%	45%
107	BIMA	R-107	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 68 / 2000	13.999.595.000	13.999.595.000	10.646.814.554	76%	76%
108	KUPANG	R-108	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 82 / 2000	15.191.297.000	15.094.818.000	14.373.140.348	95%	95%
109	MAUMERE	R-109	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 83 / 2000	12.329.629.000	12.220.561.000	12.211.539.000	100%	100%
110	POSO	R-110	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 102 / 1200	13.316.351.001	11.775.000.000	11.322.115.375	96%	96%
111	TUAL	R-111	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 67 / 2000	13.586.628.000	12.312.622.800	9.160.391.390	74%	74%
112	SAUMLAKI	R-112	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 90 / 2000	15.977.020.000	14.643.896.900	8.290.449.573	57%	57%
113	SORONG	R-113	PT. SWASTA	KM. Sabuk Nusantara 91 / 2000	16.707.555.000	15.393.051.860	11.019.007.377	72%	88%
JUMLAH		113 Trayek			1.149.581.355.026	1.043.311.900.648	872.273.942.923	83,61	84,50

SUBSIDI OPERASIONAL ANGKUTAN BUS PERINTIS TAHUN 2018

NO	PROVINSI	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	RITASE		PEMBAYARAN	
				KONTRAK	REALISASI	KONTRAK (Rp)	REALISASI (Rp)
1	NUSA TENGGARA TIMUR (ENDE)	01/BPTDNTT-KTR/SOBP-K/NTT/1/2018	4 Januari 2018	5.947	5.965	1.362.582.000	1.362.582.000
2	RIAU	KU.17/KONTRAK/SPD-RIAU/XII/2016	15 Maret 2018	2.376	2.376	1.213.850.000	1.213.850.000
3	BANGKA BELITUNG	KU.003/02/PERINTIS.BABEL/BPTD.VII/II/2018	14 Februari 2018	8.736	8.879	3.488.000.000	3.488.000.000
4	BENGKULU	K.04/BPTDWIL-VI/APBN/III/2018	12 Maret 2018	3.600	3.486	1.891.351.000	1.891.351.000
5	JEMBER	PL./01/01/BPTD/XI-2018	26 Februari 2018	1.236	1.692	644.494.677	644.494.677
6	KEPULAUAN RIAU	04/KONTRAK-DAMRI/KEPRI//III/2018	16 Maret 2018	6.534	6.534		
7	KALIMANTAN TENGAH	KU.003/6/3/BPTDXVI/1/2018	23 Januari 2018			4.593.315.000	4.593.315.000
8	JAMBI	01/SP-PERINTIS/SATKER-BPTD WIL.V-JMB/1/2018	9 Januari 2018	4.998	4.998	2.599.246.000	2.599.246.000
9	SUMATERA SELATAN	KU.003/01/PERINTIS/BPTD.VIII/2018	6 Februari 2018	6.240	6.240	1.754.000.000	1.754.000.000
10	SULAWESI TENGAH	KU.003/5/84/PPK01-BPTD-XX/2018	15 Februari 2018	3.744	3.392	2.799.065.000	2.567.398.072
11	SULAWESI TENGGARA	KU.003/50/1/BPTD-SULTRA/2018	12 Januari 2018	5.000	4.938	3.679.118.728	3.660.862.429
12	KALIMANTAN TIMUR	KU.003/1/12/BPTD-KALTIMRA/2018	15 Februari 2018	3.432	3.432	2.540.265.000	2.540.265.000
13	JAWA BARAT (BANDUNG)	KU.003/41/BPTD-IX/1/2018	18 Januari 2018	6.960	6.960	3.090.732.000	3.090.732.000
14	MALUKU (NAMLEA)	KU.003/01d/PPK.AJ/BPTD-XXIII/1/2018	1 Januari 2018	1.872	1.872	906.037.200	906.037.200
15	KALIMANTAN SELATAN	KU.003/1/9/BPTD-KALSEL/2018	23 Januari 2018	6.600	6.600	2.625.714.000	2.625.714.000
16	PAPUA (BIAK)	KU.003/4/3/BPTD-WIL.XXV/2018 adendum 1 Nomor : KU.003/4/3a/BPTD-WIL.XXV/2018	26 Februari 2018	7.420	7.072	2.548.082.000	2.235.158.000
17	PAPUA (MIMIKA)	KU.003/4/6a/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	8.458	8.298	2.297.622.414	2.258.612.125
18	PAPUA (NABIRE)	KU.003/4/2a/BPTD-WIL.XXV/2018	26 Februari 2018	5.830	4.750	1.125.444.799	995.242.288
19	AMBON	KU.003/02a/PPK.AJ/BPTD-XXIII/III/2018 KU.003/02b/PPK.AJ/BPTD-XXIII/III/2018 KU.003/02c/PPK.AJ/BPTD-XXIII/III/2018	1 Maret 2018	6.169	6.169	5.392.725.200	5.392.725.200
20	KALIMANTAN UTARA	KU.003/1/5/BPTD-KALTIMRA/2018	9 Februari 2018	1.716	1.716	1.231.718.000	1.231.718.000
21	KALIMANTAN BARAT			3.154	3.154	2.540.510.000	2.540.510.000
22	LAMPUNG	K.03/BPTDWIL-IV/APBN/2018	12 Maret 2018	13.680	14.066	4.036.000.000	4.036.000.000
23	SULAWESI UTARA	KU.303/1/3/BPTD - XXII/2018	1 Januari 2018	7.176	8.067	5.502.890.000	5.502.890.000
24	MALUKU UTARA	KU.003/01/II/KONTRAK/SUBSIDI/BPTD-XXIV/2018	21 Februari 2018	4.217	3.554	4.217.008.658	3.554.417.000
25	NUSA TENGGARA TIMUR (KEFAMENANU)	02/BPTDNTT-KTR/SOBP-K/NTT/1/2018	4 Januari 2018	4.382	5.032	1.488.792.000	1.488.792.000
26	NUSA TENGGARA TIMUR (KUPANG)	03/BPTDNTT-KTR/SOBP-K/NTT/1/2018	4 Januari 2018	5.947	6.038	1.871.580.000	1.871.580.000
27	NUSA TENGGARA TIMUR (WAINGAPU)	04/BPTDNTT-KTR/SOBP-K/NTT/1/2018	4 Januari 2018	3.130	3.130	1.350.571.718	1.350.571.718
28	BANTEN	KU.003/05/121/BPTD-BANTEN/2018	30 Mei 2018	7.000	7.000	2.707.497.994	2.707.497.994
29	PAPUA (JAYAPURA)	KU.003/4/1.a/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	3.582	3.582	1.427.371.000	1.428.416.777
30	PAPUA (SERUI)	KU.003/4/4.a/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	6.864	3.973	1.391.750.999	857.807.844
31	PAPUA (MERAUKE)	KU.003/4/5/BPTD-WIL.XXV/2018 & Adendum KU.003/4/5a-BPTD WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	3.130	3.130	1.887.587.358	1.882.379.286
32	PAPUA (SARMI)	KU.003/4/7a/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	4.004	4.004	1.104.524.398	924.639.489
33	PAPUA BARAT (SORONG)	KU.003/01/04/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	6.095	6.147	2.067.674.000	2.053.508.248
34	PAPUA BARAT (SORONG SELATAN)	KU.003/4/9b/BPTD-WIL.XXV/2018	26 Februari 2018	1.590	1.594	742.442.000	732.564.604
35	PAPUA BARAT (MANOKWARI)	KU.003/4/10/BPTD-WIL.XXV/2018	23 Februari 2018	3.975	3.801	2.695.200.999	2.074.431.720
J U M L A H						80.814.764.142	78.057.309.671

**SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL PENYEBERANGAN PERINTIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
1	PAGU SUBSIDI AP PERINTIS DITJEN HUBDAT					482.458.771.000	454.190.082.544	427.523.359.509
2	PAGU DIT. AMM					374.359.441.000	372.315.849.000	358.975.218.929
	- Januari - Oktober 2018					322.981.738.000	322.609.677.000	309.887.468.929
	- November - Desember 2018					51.377.703.000	49.706.172.000	49.087.750.000
3	PAGU 3 BPTD					108.099.330.000	81.874.233.544	68.548.140.580
	- NTT					17.816.125.000	17.616.125.000	17.616.125.000
	- SULUT					39.618.150.000	39.618.150.000	39.525.109.000
	- MALUKU					50.665.055.000	24.639.958.544	11.406.906.580
4	SUBSIDI OLEH DIT. AMM						372.315.849.000	358.975.218.929
	Kontrak Januari - Oktober 2018						322.609.677.000	309.887.468.929
1	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ulee Lheu - Lamteng	KU.003/KONT-ASDP/1/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.567.235.000	3.533.657.000
2	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Singkil - P. Banyak dan Singkil - Gunung Sitoli	KU.003/KONT-ASDP/2/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.028.296.000	5.909.497.000
3	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sinabang - Melabouh	KU.003/KONT-ASDP/3/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.312.404.000	5.694.031.000
4	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Teluk dalam - Pulau Tello	KU.003/KONT-ASDP/4/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sibolga	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.937.119.000	3.937.118.000
5	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Padang - Sikakap	KU.003/KONT-ASDP/5/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		1.483.608.000	1.464.638.000
6	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Padang - Siberut, Siberut - Sikabalu dan Padang - Sikabalu	KU.003/KONT-ASDP/6/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.782.035.000	3.762.839.000
7	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bengkulu - Enggano	KU.003/KONT-ASDP/7/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.349.235.000	3.293.337.000
8	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Dabo - Penarik	KU.003/KONT-ASDP/8/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.361.939.000	2.231.526.000
9	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Telaga punggur - Dabo dan Dabo - Kuala Tungkal	KU.003/KONT-ASDP/9/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.921.266.000	3.729.097.000
10	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang - Dabo	KU.003/KONT-ASDP/10/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.868.007.000	5.472.391.000
11	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Mengkapan - Kampung Balak, Kampung Balak - Pecah Buyung dan Pecah Buyung - Alai Insit	KU.003/KONT-ASDP/11/1/SATKER-DAMM/2018	PT. Pengembangan Investasi Riau	01 Januari 2018	31 Desember 2018		4.911.446.000	4.839.118.000
12	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sadai - Tanjung Ru	KU.003/KONT-ASDP/12/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		1.057.192.000	1.049.564.000
13	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Jakarta - P. Untung Jawa, P. Untung Jawa - P. Pramuka, dan P. Pramuka - P. Kelapa	KU.003/KONT-ASDP/13/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.469.828.000	3.314.109.000
14	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kendal - Kumai	KU.003/KONT-ASDP/14/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Jepara	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		8.123.831.000	8.098.476.000
15	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kalianget - Jangkar	KU.003/KONT-ASDP/15/1/SATKER-DAMM/2018	PT. Dharma Dwipa Utama	01 Januari 2018	31 Desember 2018		3.184.869.000	3.052.558.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
16	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kalinget - P. Sapudi, Pulau Sapudi - Jangkar, Kalinget - Raas dan Raas - Jangkar	KU.003/KONT-ASDP/16/1/SATKER-DAMM/2018	PT. Dharma Dwipa Utama	01 Januari 2018	31 Desember 2018		4.550.095.000	4.416.508.000
17	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Paciran - Bawean dan Bawean Gresik	KU.003/KONT-ASDP/17/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.472.531.000	4.387.383.000
18	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Rasau Jaya - Pinang Luar	KU.003/KONT-ASDP/18/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.618.615.000	2.618.613.000
19	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Parit Sarem - Sungai Nipah	KU.003/KONT-ASDP/19/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		1.127.489.000	1.127.486.000
20	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	KU.003/KONT-ASDP/20/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		1.347.878.000	1.290.524.000
21	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ceremai - Sumpit	KU.003/KONT-ASDP/21/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.441.984.000	2.441.983.000
22	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tarakan- Nunukan, Nunukan - Sebatik dan Nunukan - Seimenggaris	KU.003/KONT-ASDP/22/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.554.940.000	4.522.394.000
23	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Toli Toli - Tarakan	KU.003/KONT-ASDP/23/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.380.678.000	4.885.268.000
24	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Batulicin - Garongkong	KU.003/KONT-ASDP/24/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.922.891.000	5.889.553.000
25	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bitung - Melonguane dan Melonguane - Musi	KU.003/KONT-ASDP/25/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		7.952.705.000	7.117.241.000
26	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Likupang -Pananaru dan Pananru - Melonguane	KU.003/KONT-ASDP/26/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.400.150.000	3.933.607.000
27	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Luwuk - Bangga, Banggai - Bobong dan Banggai - Boniton	KU.003/KONT-ASDP/27/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.308.969.000	4.236.076.000
28	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Gorontalo - Wakai, Wakai - Ampana dan Wakai - Toboli	KU.003/KONT-ASDP/28/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.517.446.000	5.508.242.000
29	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Marissa - Dolong, Dolong - Pasokan dan Pasokan - Ampana	KU.003/KONT-ASDP/29/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.310.719.000	6.287.522.000
30	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis KOLONODALE - Baturube	KU.003/KONT-ASDP/30/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.173.367.000	3.149.528.000
31	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bira - Jampea, Jampea - Labuan Bajo, Jampea - Maropokot	KU.003/KONT-ASDP/31/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.961.598.000	6.943.082.000
32	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bira - Patumbukan, Patumbukan - Kayuadi, Kayuadi - Jampea, Jampea - Bonerate dan Bonerate - Kalaotoa	KU.003/KONT-ASDP/32/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.894.569.000	5.775.486.000
33	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kendari - Langgara	KU.003/KONT-ASDP/33/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.855.391.000	2.751.836.000
34	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Dongkala, Dongkala - Mawasangka dan Dongkala - Kasipute	KU.003/KONT-ASDP/34/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.303.503.000	3.031.944.000
35	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Pulau Siompu	KU.003/KONT-ASDP/35/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.554.787.000	2.484.395.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
36	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kamaru - Wanci	KU.003/KONT-ASDP/36/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.949.569.000	3.709.006.000
37	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Raha - Pure	KU.003/KONT-ASDP/37/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.270.737.000	2.237.641.000
38	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Tolandona	KU.003/KONT-ASDP/38/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.187.859.000	3.102.842.000
39	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sabu - Waingapu dan Waingapu - Ende	KU.003/KONT-ASDP/39/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.245.812.000	5.876.706.000
40	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Larantuka - Solor, Solor - Lewoleba, Adonara (deri) - Baranusa, Baranusa - Kalabahi dan Kalabahi - Bakalang	KU.003/KONT-ASDP/40/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.091.669.000	5.137.663.453
41	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Waingapu - Aimere	KU.003/KONT-ASDP/41/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.509.858.000	3.484.492.000
42	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ende - Sabu dan Sabu - Raijua	KU.003/KONT-ASDP/42/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.564.046.000	4.200.221.000
43	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kupang - Naikliu dan Pantai Baru - Ndau	KU.003/KONT-ASDP/43/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.349.443.000	2.995.883.000
44	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kewapante - Palue, Kewapante - Pamana, Pamana - Pulau Besar dan Adonara (deri) - Kewapante	KU.003/KONT-ASDP/44/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.382.496.000	4.230.599.000
45	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Waai - Kailolo	KU.003/KONT-ASDP/45/1/SATKER-DAMM/2018	PD. Panca Karya	01 Januari 2018	31 Desember 2018		4.318.462.000	4.119.969.000
46	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Umeputih - Wailey	KU.003/KONT-ASDP/46/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.127.851.000	3.127.848.000
47	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Umeputih - Nalahia dan Nalahia - Amahai	KU.003/KONT-ASDP/47/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.237.401.000	3.237.400.000
48	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Namlea - Kaveli	KU.003/KONT-ASDP/48/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.398.137.000	3.398.134.000
49	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Dobo, Dobo - Benjina, Dobo - Tabarfane, Tual - Weduar dan Tual - Elat	KU.003/KONT-ASDP/49/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.724.339.000	6.011.118.000
50	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Tayando, Tayando - Kur, Tayando - Tam, Tual - Kur, Kur - Kesui, Tual - Bandaeli, Bandaeli - Hollat, Tam - Fadol dan Kur - Kaimear	KU.003/KONT-ASDP/50/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.562.920.000	6.551.195.000
51	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Tam, Tam - Mangur, Tual - Larat dan Tual - Kaimana	KU.003/KONT-ASDP/51/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		8.063.256.000	7.736.307.000
52	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Doro (Kao) - Subaim	KU.003/KONT-ASDP/52/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.700.045.000	3.640.096.000
53	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Moti, Moti - Makian Makian - Kayoa, dan Kayoa - Babang	KU.003/KONT-ASDP/53/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.582.259.000	3.127.619.279
54	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Babang - Saketa	KU.003/KONT-ASDP/54/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.900.707.000	3.721.336.000
55	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Dowora - Sofifi	KU.003/KONT-ASDP/55/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		2.300.525.000	2.007.429.000
56	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Babang - Obi, Obi - Sanana, Sanana - Mangole, dan Mangole - Bobong	KU.003/KONT-ASDP/56/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.538.651.000	6.485.159.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
57	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kupal - Kasiruta, Kasiruta - Bosoa, Kupal - Mandioli dan Kupal - Mandapolo	KU.003/KONT-ASDP/57/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.734.484.000	3.310.292.197
58	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Serpele, Sorong - Kalobo dan Sorong - Dulbatan	KU.003/KONT-ASDP/58/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.479.438.000	3.476.804.000
59	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Arefi, Arefi - Pam, Sorong - Linmalas, Linmalas - Waigama, Sorong - Wejim, Wejim - Kofiau dan Sorong - Folley	KU.003/KONT-ASDP/59/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.230.957.000	5.230.955.000
60	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Gag, Gag - Gebe, Gebe - Patani dan Patani - Weda	KU.003/KONT-ASDP/60/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		5.212.949.000	5.204.841.000
61	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Waigeo, Sorong - Babo, Babo - Bentuni	KU.003/KONT-ASDP/61/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		7.891.008.000	7.891.006.000
62	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Wahai - Fak Fak, Fak Fak - Sorong	KU.003/KONT-ASDP/62/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.615.342.000	6.607.948.000
63	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Biak - Serui, Serui - Waren, Waren - Nabire	KU.003/KONT-ASDP/63/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.611.933.000	6.546.042.000
64	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Manokwari - Biak dan Manokwari - Numfor	KU.003/KONT-ASDP/64/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.267.564.000	6.240.623.000
65	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Manokwari - Wasior, Wasior - Nabire dan Wasior - Windesi	KU.003/KONT-ASDP/65/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.142.538.000	6.109.182.000
66	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sarmi - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja	KU.003/KONT-ASDP/66/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		3.867.820.000	3.151.215.000
67	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Merauke - Atsy, Atsy - Agats dan Agats - Sawerma	KU.003/KONT-ASDP/67/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.469.119.000	6.459.629.000
68	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Pomako - Agats dan Agats - Eci	KU.003/KONT-ASDP/68/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		4.034.644.000	4.034.642.000
69	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Merauke - Kimam, Kimam - Moor, Moor - Bade dan Bade - Gatentiri	KU.003/KONT-ASDP/69/1/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 Januari 2018	31 Oktober 2018		6.211.165.000	6.200.800.000
70	Subsidi Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh Lintas Surabaya - Lembar	KU.003/KONT-ASDP/70/2/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya	14 Februari 2018	11 Oktober 2018		5.985.899.000	5.846.458.000
71	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Paciran - Bahaur	KU.003/KONT-ASDP/87/8/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya	08 Agustus 2018	31 Desember 2018		3.840.160.000	3.257.741.000
Kontrak November - Desember 2018							49.706.172.000	49.087.750.000
1	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ulee Lheu - Lamteng	KU.003/KONT-ASDP/88/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh	01 November 2018	31 Desember 2018		500.185.000	491.840.000
2	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Singkil - P. Banyak dan Singkil - Gunung Sitoli	KU.003/KONT-ASDP/89/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil	01 November 2018	31 Desember 2018		899.214.000	877.043.000
3	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sinabang - Melabouh	KU.003/KONT-ASDP/90/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil	01 November 2018	31 Desember 2018		1.026.913.000	1.004.887.000
4	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Teluk dalam - Pulau Tello	KU.003/KONT-ASDP/91/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sibolga	01 November 2018	31 Desember 2018		585.345.000	585.344.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
5	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Padang – Siberut, Siberut - Sikabalu dan Padang - Sikabalu	KU.003/KONT-ASDP/92/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang	01 November 2018	31 Desember 2018		654.359.000	654.358.000
6	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bengkulu - Enggano	KU.003/KONT-ASDP/93/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Padang	01 November 2018	31 Desember 2018		609.232.000	481.024.000
7	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Dabo - Penarik	KU.003/KONT-ASDP/94/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 November 2018	31 Desember 2018		413.605.000	408.503.000
8	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Telaga punggur - Dabo dan Dabo - Kuala Tungkal	KU.003/KONT-ASDP/95/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 November 2018	31 Desember 2018		1.066.486.000	1.058.985.000
9	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tanjung Pinang - Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang - Dabo	KU.003/KONT-ASDP/96/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batam	01 November 2018	31 Desember 2018		1.117.865.000	1.033.648.000
10	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Jakarta - P. Untung Jawa, P. Untung Jawa - P. Pramuka, dan P. Pramuka - P. Kelapa	KU.003/KONT-ASDP/97/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak	01 November 2018	31 Desember 2018		475.780.000	473.562.000
11	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kendal - Kumai	KU.003/KONT-ASDP/98/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Jepara	01 November 2018	31 Desember 2018		1.047.289.000	1.043.947.000
12	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Paciran - Bawean dan Bawean Gresik	KU.003/KONT-ASDP/99/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Surabaya	01 November 2018	31 Desember 2018		751.517.000	751.516.000
13	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Rasau Jaya - Pinang Luar	KU.003/KONT-ASDP/100/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 November 2018	31 Desember 2018		218.650.000	218.649.000
14	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Parit Sarem - Sungai Nipah	KU.003/KONT-ASDP/101/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 November 2018	31 Desember 2018		149.886.000	149.885.000
15	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sungai Mayam - Bintang Harapan Desa	KU.003/KONT-ASDP/102/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 November 2018	31 Desember 2018		195.471.000	195.470.000
16	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ceremai - Sumpit	KU.003/KONT-ASDP/103/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pontianak	01 November 2018	31 Desember 2018		420.616.000	382.948.000
17	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tarakan- Nunukan, dan Nunukan - Sebatik	KU.003/KONT-ASDP/104/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan	01 November 2018	31 Desember 2018		725.752.000	722.585.000
18	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Toli Toli - Tarakan	KU.003/KONT-ASDP/105/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Balikpapan	01 November 2018	31 Desember 2018		963.188.000	958.369.000
19	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Batulicin - Garongkong	KU.003/KONT-ASDP/106/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Batulicin	01 November 2018	31 Desember 2018		1.040.512.000	1.040.512.000
20	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bitung – Melonguane dan Melonguane - Musi	KU.003/KONT-ASDP/107/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 November 2018	31 Desember 2018		1.377.103.000	1.377.102.000
21	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Likupang –Pananaru dan Pananru - Melonguane	KU.003/KONT-ASDP/108/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 November 2018	31 Desember 2018		778.734.000	778.734.000
22	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Luwuk - Bangga,Banggai - Bobong dan Banggai - Boniton	KU.003/KONT-ASDP/109/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 November 2018	31 Desember 2018		719.920.000	706.487.000
23	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Gorontalo - Wakai, Wakai - Ampana dan Wakai - Toboli	KU.003/KONT-ASDP/110/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 November 2018	31 Desember 2018		966.617.000	963.571.000
24	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Marissa – Dolong, Dolong - Pasokan dan Pasokan - Ampana	KU.003/KONT-ASDP/111/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 November 2018	31 Desember 2018		1.043.668.000	1.043.668.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
25	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kolonodale - Baturube	KU.003/KONT-ASDP/112/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk	01 November 2018	31 Desember 2018		451.704.000	451.703.000
26	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bira - Jampea, Jampea - Labuan Bajo, Jampea - Maropokot	KU.003/KONT-ASDP/113/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar	01 November 2018	31 Desember 2018		1.206.068.000	1.193.081.000
27	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bira - Patumbukan, Patumbukan - Kayuadi, Kayuadi - Jampea, Jampea - Bonerate dan Bonerate - Kalaotoa	KU.003/KONT-ASDP/114/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Selayar	01 November 2018	31 Desember 2018		1.016.533.000	1.003.829.000
28	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kendari - Langgara	KU.003/KONT-ASDP/115/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		373.428.000	370.011.000
29	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Dongkala, Dongkala - Mawasangka dan Dongkala - Kasipute	KU.003/KONT-ASDP/116/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		479.454.000	479.453.000
30	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Pulau Siompu	KU.003/KONT-ASDP/117/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		371.753.000	371.752.000
31	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kamaru - Wanci	KU.003/KONT-ASDP/118/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		659.802.000	659.801.000
32	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Raha - Pure	KU.003/KONT-ASDP/119/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		336.936.000	336.935.000
33	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bau Bau - Tolandona	KU.003/KONT-ASDP/120/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bau-bau	01 November 2018	31 Desember 2018		553.382.000	548.637.000
34	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sabu - Waingapu dan Waingapu - Ende	KU.003/KONT-ASDP/121/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		1.076.845.000	1.074.410.000
35	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Larantuka - Solor, Solor - Lewoleba, Adonara (deri) - Baranusa, Baranusa - Kalabahi dan Kalabahi - Bakalang	KU.003/KONT-ASDP/122/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		1.008.454.000	982.702.000
36	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Waingapu - Aimere	KU.003/KONT-ASDP/123/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		388.965.000	388.965.000
37	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Ende - Sabu dan Sabu - Raijua	KU.003/KONT-ASDP/124/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		736.226.000	736.225.000
38	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kupang - Naikliu dan Pantai Baru - Ndau	KU.003/KONT-ASDP/125/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		560.289.000	552.610.000
39	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kewapante - Palue, Kewapante - Pamana, Pamana - Pulau Besar dan Adonara (deri) - Kewapante	KU.003/KONT-ASDP/126/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	01 November 2018	31 Desember 2018		753.904.000	753.903.000
40	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Umeputih - Wailey	KU.003/KONT-ASDP/127/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 November 2018	31 Desember 2018		480.242.000	480.241.000
41	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Umeputih - Nalahia dan Nalahia - Amahai	KU.003/KONT-ASDP/128/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 November 2018	31 Desember 2018		488.837.000	488.836.000
42	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Namlea - Kayeli	KU.003/KONT-ASDP/129/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon	01 November 2018	31 Desember 2018		494.074.000	494.073.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
43	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Dobo, Dobo - Benjina, Dobo - Tabarfane, Tual - Weduar dan Tual - Elat	KU.003/KONT-ASDP/130/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 November 2018	31 Desember 2018		1.367.768.000	1.347.010.000
44	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Tayando, Tayando - Kur, Tayando - Tam, Tual - Kur, Kur - Kesui, Tual - Bandaeli, Bandaeli - Hollat, Tam - Fadol dan Kur - Kaimear	KU.003/KONT-ASDP/131/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 November 2018	31 Desember 2018		1.226.795.000	1.219.422.000
45	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Tual - Tam, Tam - Mangur, Tual - Larat dan Tual - Kaimana	KU.003/KONT-ASDP/132/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Tual	01 November 2018	31 Desember 2018		1.476.541.000	1.471.695.000
46	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Doro (Kao) - Subaim	KU.003/KONT-ASDP/133/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		644.145.000	644.145.000
47	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Moti, Moti - Makian Makian - Kayoa, dan Kayoa - Babang	KU.003/KONT-ASDP/134/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		568.374.000	518.288.000
48	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Babang - Saketa dan Babang - Obi	KU.003/KONT-ASDP/135/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		1.509.007.000	1.493.837.000
49	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Dowora - Sofifi	KU.003/KONT-ASDP/136/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		258.499.000	280.878.000
50	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Obi - Sanana, Sanana - Mangole, dan Mangole - Bobong	KU.003/KONT-ASDP/137/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		856.244.000	841.760.000
51	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Kupal - Kasiruta, Kasiruta - Bosoa, Kupal - Mandioli dan Kupal - Mandapolo	KU.003/KONT-ASDP/138/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate	01 November 2018	31 Desember 2018		234.818.000	151.344.000
52	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Serpele, Sorong - Kalobo dan Sorong - Dulbatan	KU.003/KONT-ASDP/139/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 November 2018	31 Desember 2018		520.717.000	520.717.000
53	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Arefi, Arefi - Pam, Sorong - Linmalas, Linmalas - Waigama, Sorong - Wejim, Wejim - Kofiau dan Sorong - Folley	KU.003/KONT-ASDP/140/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 November 2018	31 Desember 2018		913.550.000	913.549.000
54	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Gag, Gag - Gebe, Gebe - Patani dan Patani - Weda	KU.003/KONT-ASDP/141/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 November 2018	31 Desember 2018		863.966.000	863.965.000
55	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sorong - Waigeo, Sorong - Babo, Babo - Bentuni	KU.003/KONT-ASDP/142/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 November 2018	31 Desember 2018		1.448.243.000	1.448.243.000
56	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Wahai - Fak Fak, Fak Fak - Sorong	KU.003/KONT-ASDP/143/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Sorong	01 November 2018	31 Desember 2018		1.221.316.000	1.221.315.000
57	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Biak - Serui, Serui - Waren, Waren - Nabire	KU.003/KONT-ASDP/144/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 November 2018	31 Desember 2018		1.218.851.000	1.210.279.000
58	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Manokwari - Biak dan Manokwari - Numfor	KU.003/KONT-ASDP/145/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 November 2018	31 Desember 2018		1.159.741.000	1.148.890.000
59	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Manokwari - Wasior, Wasior - Nabire dan Wasior - Windesi	KU.003/KONT-ASDP/146/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 November 2018	31 Desember 2018		1.162.316.000	1.159.780.000
60	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Sarmi - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja	KU.003/KONT-ASDP/147/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak	01 November 2018	31 Desember 2018		740.897.000	738.367.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
61	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Merauke - Atsy, Atsy - Agats dan Agats - Sawerma	KU.003/KONT-ASDP/148/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 November 2018	31 Desember 2018		1.164.949.000	1.164.949.000
62	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Pomako - Agats dan Agats - Eci	KU.003/KONT-ASDP/149/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 November 2018	31 Desember 2018		789.126.000	784.007.000
63	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Merauke - Kimam, Kimam - Moor, Moor - Bade dan Bade - Gatentiri	KU.003/KONT-ASDP/150/11/SATKER-DAMM/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merauke	01 November 2018	31 Desember 2018		1.175.506.000	1.175.506.000
5	SUBSIDI OLEH BPTD MALUKU						24.639.958.544	11.406.906.580
1	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Saumlaki-Adaut dan Adaut-Letwuring	1/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. PANCA KARYA	13 April 2018	31 Desember 2018		3.117.357.104	655.539.553
2	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Namlea - Manipa dan Manipa- Waisala	2/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. PANCA KARYA	13 April 2018	31 Desember 2018		2.323.154.709	542.742.236
3	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Namlea - Teluk Bara dan Teluk Bara- Sanana	3/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. PANCA KARYA	13 April 2018	31 Desember 2018		3.256.600.874	544.242.633
4	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Wahai - Waigama dan Waigama - Sorong	4/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. PANCA KARYA	13 April 2018	31 Desember 2018		3.540.132.613	550.868.014
5	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Ambon-Ambalau, Ambalau-Wamsisi, Wamsisi-Namrole, Namrole-Leksula, Leksula-Tifu dan Tifu-Nanali	5/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PT. BIPOLO GIDIN	13 April 2018	31 Desember 2018		4.200.597.974	3.843.000.000
6	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Saumlaki-Siera, Siera-Wunlah, Wunlah-Larat, Larat-yaru dan Yaru-Momar	6/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. KALWEDO KIDABELA	13 April 2018	31 Desember 2018		3.645.078.269	2.368.618.476
7	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Ambon-Airnanag, Airnanag-geser, geser-gorom, gorom-kesui, dan kesui-teor	7/KONTRAK/PPKASDP/BPTD-XXIII/IV/2018	PD. MITRA KARYA	13 April 2018	31 Desember 2018		4.557.037.001	2.901.895.668
8	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Saumlaki - Dobo dan Dobo - Pomako							
9	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Ambon - Damer, Damer-Kisar-Leti, Leti-Moa, Moa-Lakor, Lakor-Sermatang,Sermatang-Tepa, Tepa-Letwuring, Letruwung-Dawelor, Dawelor dan Dawelor-Marsela							
10	Pekerjaan Subsidi Lintas Penyeberangan Tual - Airnanang							
6	SUBSIDI OLEH BPTD NTT						17.616.125.000	17.616.125.000
1	Subsidi pengoperasian kapal pada Lintas Kalabahi - Teluk Gurita, Teluk Gurita - P. Wetar (Iwaki), P. Wetar (Iwaki) - P. Kisar (Wonreli)	06/BPTDNTT-KTR/SKPP-KGK/NTT/1/2018	PT. Flobamor	04 Januari 2018	31 Desember 2018		10.238.058.000	10.238.058.000
2	Subsidi pengoperasian kapal pada Lintas Kupang -Ende	05/BPTDNTT-KTR/SKPP-KE/NTT/1/2018	PT. Flobamor	04 Januari 2018	31 Desember 2018		7.378.067.000	7.378.067.000
7	SUBSIDI OLEH BPTD SULUT						39.618.150.000	39.525.109.000
1	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Amurang - Pananaru,Pananaru - Marore	AP.204/1/1/BPTD-XXII/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 Januari 2018	31 Desember 2018		8.161.470.833	8.145.964.000
2	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Musi - Mangaran, Mangaran - Bitung	AP.204/1/7/BPTD-XXII/2018	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bitung	01 Januari 2018	31 Desember 2018		7.954.325.835	7.938.819.000
3	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Bitung - Lembeh	AP.204/1/11/BPTD-XXII/2018	PD. Bangun Bitung	01 Januari 2018	31 Desember 2018		2.835.506.833	2.820.000.000
4	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Likupang-Biara, Biara-Minanga, Minanga-Makalehi, Makalehi-Buhias, Buhias-Sawang	AP.204/1/3/BPTD-XXII/2018	PD. Pelayaran Sitaro	01 Januari 2018	31 Desember 2018		6.027.102.833	6.011.596.000

NO	NAMA KEGIATAN	NOMOR KONTRAK	NAMA KONTRAKTOR	TANGGAL MULAI KONTRAK	TANGGAL AKHIR KONTRAK	PAGU (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI REALISASI KEUANGAN (Rp)
5	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Minanga-Sawang, Sawang-Panaranu	AP.204/1/5/BPTD-XXII/2018	PD. Pelayaran Sitaro	01 Januari 2018	31 Desember 2018		4.635.506.833	4.620.000.000
6	Subsidi pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan perintis Likupang-Melonguane, Melonguane-Marampit, Marampit-Miangas	AP.204/1/9/BPTD-XXII/2018	PD. ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAB. TALAUD	01 Januari 2018	31 Desember 2018		10.004.236.833	9.988.730.000

Lampiran B.8. Realisasi Belanja Barang Subsidi Perintis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2018

No	Nama Kereta	Kontrak	Addendum Kontrak	Bank Garansi	Total Realisasi TA 2018 (Rp)		Pengembalian di TA. 2019 (Rp)	Penyerapan
					Biaya	Pendapatan Tiket		
1	Bathara Kresna	10.053.920.528	9.754.924.270	5.708.736.195	8.943.520.819	370.920.000	1.182.323.452	92%
2	Cut Meutia	16.927.039.953	16.537.700.795	7.955.242.523	15.192.798.578	39.569.000	1.384.471.218	92%
3	Jenggala	21.490.183.121	18.933.993.246	8.807.320.681	17.166.585.048	2.047.992.000	3.815.400.197	91%
4	Kertalaya	4.295.441.709	4.326.408.030	2.236.489.531	3.862.712.837	71.526.000	535.221.193	89%
5	Lembah Anai	11.460.797.311	11.261.595.486	5.918.197.510	9.846.396.176	121.335.000	1.536.534.309	87%
6	Siliwangi	15.676.572.923	15.529.515.108	9.996.463.039	13.912.182.537	2.397.720.000	4.015.052.570	90%
7	Minangkabau Ekspress	14.222.109.838	13.205.854.313	10.189.119.476	11.785.905.146	1.324.680.000	2.744.629.167	89%
8	LRT Palembang	99.279.767.490	86.944.337.636	86.031.450.099	49.127.649.576	5.116.878.811	42.933.566.871	57%
	Total	193.405.832.873	176.494.328.884	136.843.019.054	129.837.750.717	11.490.620.811	58.147.198.977	74%

Lampiran B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Tahun Anggaran 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BALITBANG	BPSDM	BPTJ	JUMLAH
Belanja Modal Tanah	-	-	10.518.897.280	20.910.196.508	321.799.670.756	137.166.561.482	-	98.858.000	-	490.494.184.026
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.554.613.632	4.821.131.590	956.208.002.650	1.202.656.242.156	921.309.631.175	233.496.426.433	4.764.306.833	446.591.090.200	84.060.737.057	3.907.462.181.726
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.687.573.436	-	545.603.835.374	2.605.398.515.976	977.153.877.268	14.178.697.500	-	286.165.782.161	7.930.874.000	4.440.119.155.715
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	93.250.000	1.477.740.876.374	2.591.213.566.365	13.134.616.149.548	-	79.831.291.965	-	17.283.495.134.252
Belanja Modal Lainnya	7.454.863.744	3.116.735.220	283.680.724.771	52.560.602.664	180.173.121.060	188.117.839.905	195.750.000	7.149.161.450	16.704.116.000	739.152.914.814
Belanja Modal BLU	-	-	-	-	120.899.777.503	-	-	105.760.016.543	-	226.659.794.046
Jumlah Belanja Modal Bruto	64.697.050.812	7.937.866.810	1.796.104.710.075	5.359.266.433.678	5.112.549.644.127	13.707.575.674.868	4.960.056.833	925.596.200.319	108.695.727.057	27.087.383.364.579
Pengembalian Belanja Modal	-	-	(72.341.757)	(1.081.933.755)	(3.363.234.516)	(407.536.063)	-	(10.108.000)	-	(4.935.154.091)
Jumlah Belanja Modal Netto	64.697.050.812	7.937.866.810	1.796.032.368.318	5.358.184.499.923	5.109.186.409.611	13.707.168.138.805	4.960.056.833	925.586.092.319	108.695.727.057	27.082.448.210.488

Lampiran C.1. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Tanggal Setor ke Kas Negara	Nomor NTPN	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Den Haag	251.129.212	17/01/2019	60E0881944RSDDAP	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				03/01/2019	6E5385G5CKVM98JP	
2	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Tokyo	2.536.927	17/01/2019	C59EC81EVRROAAP	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
3	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Washington	174.284.917	30/01/2019	271781D5JN20TD99	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				08/02/2019	978DA1NS3KGINH09	
4	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Kuala Lumpur	251.798.814	09/01/2019	D93753T8VMFIH66P	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				21/01/2019	C990E2IFIBCP5QCP	
5	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian perhubungan di Singapura	18.756.515	21/01/2019	EEC272ID57CK7PCP	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
6	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Montreal	243.610.823	14/01/2019	2ECF527QCB111S19	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				08/01/2019	B85881LAKPUI8BE9	
7	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di London	382.364.434	14/01/2019	F19E327IT3IF5M19	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
8	Sekretariat Jenderal	Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan di Jeddah	195.645.840	14/01/2019	AB58327RSBNCLP19	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				03/01/2019	F4F335FRHO2ISUJP	
Total			1.520.127.482			
1	Ditjen Perhubungan Darat	Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat	55.789.800	24/01/2019	E0DCE057407F11M0	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
Total			55.789.800			
1	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Jayapura	1.627.177	07/01/2019	21ADE2S9G40CQULG	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
2	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muntok	1.883.941	09/01/2019	11AD52TT20M1RF60	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
				01/08/2019	2F18B7ANTCM8T3E8	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
3	Ditjen Perhubungan Laut	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	5.500.000	10/01/2019	ECAF5765C60326V9	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
4	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Waren	873.000	09/01/2019	75E2D89TS50I2K60	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
5	Ditjen Perhubungan Laut	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	8.460.200	08/01/2019	5485E8QTEKIO9E8	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
6	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kepulauan Seribu	25.900.000	11/02/2019	F9AA08AFCI0UV19G	Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018
Total			44.244.318			
1	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Wasior	1.561.000	08/01/2019	CBFAF1UOKK17DBE9	Pengembalian Sisa UP TA 2018
2	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Muhamad Salahudin	63.186.000	08/01/2019	42C862EBAB2MME9	Pengembalian Sisa UP TA 2018
3	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin	18.061.521	02/01/2019	327CE4B5AC45OOR9	Pengembalian Sisa UP TA 2018
4	Ditjen Perhubungan Udara	UPBU Dumatubun	382.000	14/01/2019	236FD1S0JOSTVS10	Pengembalian Sisa TUP TA 2018
Total			83.190.521			

1	BPSDMP	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	45.000	15/01/2019	OBC35466CFG82KPP	Sisa UP
Total			45.000			
Total			1.703.397.121			

Lampiran C.2. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2018

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Nama Satker	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Keterangan
1	Ditjen Perhubungan Darat	BPTD Wil Xxi Propinsi Gorontalo	7.415.400	cash on hand
2	Ditjen Perhubungan Darat	BPTD Wil Xvii Propinsi Katim Dan Kaltara	8.418.300	cash on hand
TOTAL			15.833.700	
1	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar	6.250	cash on hand
2	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Ternate	2.309.927	cash on hand
3	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan T U A L	8.918.100	cash on hand
4	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan D O B O	144.834.800	cash on hand
5	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan T O B E L O	314.992.367	cash on hand
6	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuha / Babang	18.690.500	cash on hand
7	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan N A M L E A	115.584.431	cash on hand
8	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Siuban	12.169.970	cash on hand
9	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Weda	50.797.406	cash on hand
10	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jenepono	34.353.200	cash on hand
11	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Soa-Siu	24.052.050	cash on hand
12	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Geser	18.550.975	cash on hand
13	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Jailolo	3.549.898	cash on hand
14	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daruba	684.000	cash on hand
15	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Laiwui	36.538.300	cash on hand
16	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Leksula	30.726.800	cash on hand
17	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Buli	62.294.250	cash on hand
Total			879.053.224	
1	Ditjen Perhubungan Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan	106.600.000	Saldo Rekening
2	Ditjen Perhubungan Udara	Upbu Haliwen Atambua	9.872.375	Saldo Rekening
3	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Wamena Di Wamena	312.288.920	Saldo Rekening
4	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Gewayantana Di Larantuka	7.001.750	Saldo Rekening
5	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Torea Di Fak-Fak	51.105.000	Saldo Rekening
Total			486.868.045	
Total			1.381.754.969	

Lampiran C.3. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2018

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Nama Satker	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas	Jenis Kas Lainnya	Penyetoran Ke Kas Negara (apabila disetorkan)		Keterangan
					Tanggal Setor	Nomor NTPN	
1	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran	43.662	Sisa Pembayaran Perjalanan Dinas	21/01/2019	Tarik Tunai (Rek Koran)	sudah disetor
Total			43.662				
1	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Tahuna	171.687.601	Kelebihan uang posko dan perjalanan dinas	07/01/2019	1369758VUATPP3LI	Sudah disetor
2	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa	16.830.000	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	Saldo Kas pada rek koran berupa Honor Pokja yang sudah diserahkan kepada pihak Pokja
3	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sorong	700	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-	Saldo Kas pada rek koran berupa kekurangan Perjalanan Dinas yang sudah diserahkan kepada pihak Pegawai
4	Ditjen Perhubungan Laut	Pengembangan Kenavigasian Pusat	3.314.340.208	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	-	-	Saldo Hibah
5	Ditjen Perhubungan Laut	Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muntok	320.250	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			honor kepala kantor
6	Ditjen Perhubungan Laut	Unit Penyelenggara Pelabuhan Korido	9.325.000	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			Honor Pengelola Anggaran
Total			3.512.503.759				
1	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Moanamani Nabire	3.000	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25/01/2019	Kwitansi	kesalahan penarikan pada belanja uang makan pegawai (kwitansi dan CALK terlampir)
2	Ditjen Perhubungan Udara	Kantor UPBU Tojo Una Una	936.750	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10/04/2019	F41C37AL8VRK8ML8	sisa up yang belum disetor
3	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Sentani	29.587.651	Kas Lainnya di BLU			Uang Jaminan dari Kontrak sewa tenant
Total			30.527.401				
1	BPSDMP	PIP Makassar	6.509.313.939	Kas Lainnya di BLU: Pendapatan Diterima di Muka BLU			Uang Pendaftaran Pendidikan/diklat yang belum ada penetapan untuk menjadi peserta diklat dan Taruna
2	BPSDMP	PIP Semarang	392.563.980	Kas Lainnya di BLU: Utang kepada Pihak Ketiga BLU			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
3	BPSDMP	STPI Curug	968.656.500	Kas Lainnya di BLU: Pendapatan Diterima di Muka BLU			Pendapatan di terima di muka dan dana pihak ketiga lainnya
4	BPSDMP	BP2IP Barombong	10.036.836.161	Kas Lainnya di BLU			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
5	BPSDMP	BP2IP Aceh	129.473.766	Kas Lainnya di BLU: Pendapatan Diterima di Muka BLU			1. Pemakanan Taruna Rp. 14.765.000 2. Diklat Keterampilan Pelaut Rp. 36.800.000 3. Sertifikat Rp. 74.940.000 4. Jasa Giro Perbankan Rp. 2.968.766
6	BPSDMP	BP2IP Tangerang	9.366.443.612	Kas Lainnya di BLU: Dana pihak ketiga lainnya BLU			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
7	BPSDMP	BPPTD Bali	106.191.000	Kas Lainnya di BLU: Dana pihak ketiga lainnya BLU			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
8	BPSDMP	BPPTL Jakarta	369.732.479	Kas Lainnya di BLU: Pendapatan Diterima di Muka BLU			Uang Pendaftaran Diklat
9	BPSDMP	BP3 Banyuwangi	3.480.436.300	Kas Lainnya di BLU: Dana pihak ketiga lainnya BLU			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
10	BPSDMP	ATKP Surabaya	4.138.172	Kas Lainnya di BLU: Dana pihak ketiga lainnya BLU			Pendapatan Sewa GSG Januari 2019
11	BPSDMP	Poltekpel Surabaya	111.869.000	Kas Lainnya di BLU: Dana pihak ketiga lainnya BLU			PNBP Ditkapel
12	BPSDMP	BP2IP Sorong	2.053.991.250	Kas Lainnya di BLU: pendapatan diterima di muka BLU dan utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor			Saldo Kas di rekening dana kelolaan
Total			33.529.646.159				
1	Ditjen Perkeretaapian	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	01/01/2019 S.D 31/01/2019	Tarik Tunai (Rek Koran)	penihan selisih dari bank (kesalahan dari bank) per januari 2019 sudah 0
Total			2				
1	BPTJ	BPTJ	1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22/04/2019	52K0D6DAJ74N5AR9	bunga bank
Total			1				
Total			37.072.720.984				

Rincian Kas dan Bank BLU
Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Nama Satker	Saldo Kas dan Bank BLU	Jenis Kas	Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)		Keterangan
					Tanggal Setor	Nomor NTPN	
1	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan	8.624.909.100	Kas dari pendapatan BLU			Saldo Rekening Operasional Penerimaan
2	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Radin Inten di Lampung	22.248.979.223	Kas dari pendapatan BLU			Saldo Rekening Operasional Penerimaan
3	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Juwata di Tarakan	10.621.718.483	RPL 048 OPRS Penerimaan BLU-1480015142253 dan RPL 048 OPRS Pengeluaran BLU-1480015142287			Saldo Rek Operasional Penerimaan dan Operasional Pengeluaran BLU
4	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Jalaludin di Gorontalo	746.904.644	Kas dari pendapatan BLU			Saldo Rekening Operasional Penerimaan
5	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Mutiara di Palu	17.155.324.069	RPL 051 Rekening Dana Operasional BLU dan RPL 051 BLU Bandara Mutiara			Saldo Rekening Dana Operasional BLU dan RPL 051 BLU Bandara Mutiara
6	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Sentani di Jayapura	11.305.711.262	Kas dari pendapatan BLU			Saldo Rekening Operasional Penerimaan
7	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Fatmawati	10.259.221.481	RPL 016 Operasional BLU Penerimaan, RPL 016 Operasional BLU Dana Kelolaan, dan RPL 016 Operasional BLU Pengeluaran			Saldo Rek Operasional BLU Penerimaan, Operasional BLU Dana Kelolaan, dan Operasional BLU Pengeluaran
8	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Kalimarau di Tanjung Redeb	926.065.778	Rekening Operasional BLU Bendahara			Saldo Rekening Operasional BLU Bendahara
9	Ditjen Perhubungan Udara	Balai Kesehatan Penerbangan	49.139.467.568	Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU			Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU
10	Ditjen Perhubungan Udara	Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	39.806.600.020	Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU			Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU
11	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Radin Inten di Lampung	15.039.617.759	Investasi Jangka Pendek			Saldo Rekening PKD
12	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Jalaludin di Gorontalo	10.000.000.000	Deposito			Saldo Rekening PKD
13	Ditjen Perhubungan Udara	Bandar Udara Fatmawati	6.249.967.577	Investasi Jangka Pendek			Saldo Rekening PKD
14	Ditjen Perhubungan Udara	Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	100.724.638.870	Pencairan Deposito			Saldo Rekening PKD
Total			302.849.125.834				
1	BPSDMP	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta	57.247.620.055	RPL 133 Rek. Operasional BLU STIP; RPL 133: Rek. Operasional BLU STIP; RPL 133 Rek. Dana Kelolaan BLU STIP			Saldo Rek. Operasional BLU STIP; Rek. Operasional BLU STIP; Rek. Dana Kelolaan BLU STIP
2	BPSDMP	Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	30.290.461.716	RPL 171 STTD untuk Dana Kelolaan BLU; operasional penerimaan; dana kelolaan; pengelolaan kas,deposito RPL 171 BLU STTD QQ,UNTUK PKD			Saldo untuk Dana Kelolaan BLU; operasional penerimaan; dana kelolaan; pengelolaan kas,deposito
3	BPSDMP	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug	2.497.955.320	RPL 127 STPI untuk Dana Kelolaan BLU dan operasional penerimaan			Saldo Rek Dana Kelolaan BLU dan operasional penerimaan
4	BPSDMP	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan	20.306.680.634	RPL 123 ATPK MEDAN untuk Rek Dana Kelolaan BLU; operasional penerimaan dan operasional pengeluaran			Saldo Rek Dana Kelolaan BLU; operasional penerimaan dan operasional pengeluaran
5	BPSDMP	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Makassar	22.526.579.357	RPL 054 ATPK Makassar Operasional Penerimaan BLU			Saldo Rek Operasional Penerimaan BLU
6	BPSDMP	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Surabaya	32.777.373.933	RPL 135 ATPK utk Penerimaan PNBP BLU dan pengeluaran PNBP BLU,RPL 135 ATPK utk Deposito Pengelolaan Kas			Saldo Rek Penerimaan PNBP BLU dan pengeluaran PNBP BLU, Deposito Pengelolaan Kas
7	BPSDMP	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	65.979.688.823	RPL 134 PIP Semarang untuk Operasional,deposito RPL 134 PIP Semarang untuk Dana Kelolaan dan Kelolaan Kas			Saldo Rek Operasional,deposito, Dana Kelolaan dan Kelolaan Kas
8	BPSDMP	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	31.378.543.459	RPL 054 PIP Makassar untuk Operasional Penerimaan BLU ,RPL 054 PIP MAKASSAR untuk Pengelolaan Kas BLU			Saldo Rek Operasional Penerimaan BLU ,Pengelolaan Kas BLU
9	BPSDMP	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	27.936.514.248	RPL 118 Operasional Penerimaan BLU PKTJ dan dana kelolaan,deposito RPL 118 BLU Dana Kelola PKTJ			Saldo Operasional Penerimaan BLU PKTJ dan dana kelolaan,deposito RPL 118 BLU Dana Kelola PKTJ
10	BPSDMP	Balai Diklat Transportasi Darat Bali	2.944.910.094	RPL 037 BPPTD untuk Operasional Penerimaan BLU			Saldo Rek Operasional Penerimaan BLU
11	BPSDMP	Balai Diklat Transportasi Darat Palembang	1.110.437.100	RPL 014 BP2TD PLG untuk Penerimaan BLU dan dana kelolaan			Saldo Rek Penerimaan BLU dan dana kelolaan
12	BPSDMP	Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	102.361.955.405	RPL 133 Rekening Operasional BLU BP3IP dan dana kelolaan			Saldo Rekening Operasional BLU BP3IP dan dana kelolaan
13	BPSDMP	Balai Diklat Transportasi Laut Jakarta	3.239.269.502	RPL 133 Rek Operasional BLU dan dana kelolaan			Saldo Rek Operasional BLU dan dana kelolaan

No	Eselon I	Nama Satker	Saldo Kas dan Bank BLU	Jenis Kas	Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)		Keterangan
					Tanggal Setor	Nomor NTPN	
14	BPSDMP	Politeknik Pelayaran Surabaya	62.706.611.838	RPL 135 Poltekpel Surabaya untuk Operasional BLU dan dana kelolaan			Saldo Rek Operasional BLU dan dana kelolaan
15	BPSDMP	Balai Diklat Ilmu Pelayaran Barombong	49.883.588.429	RPL 054 BP2IP Barombong untuk Operasional Penerimaan BLU ,RPL 054 BLU BP2IP Barombong untuk PKD			Saldo Rek Operasional Penerimaan BLU , PKD
16	BPSDMP	Balai Diklat Ilmu Pelayaran Mauk Tangerang	10.462.016.984	RPL 127 BP2IP Operasional BLU			Saldo Rek Operasional BLU
17	BPSDMP	Balai Diklat Penerbangan Palembang	3.125.715.359	RPL 014 BP3 PLG untuk Penerimaan BLU,RPL 014 BP3 untuk PKD BLU Mandiri			Saldo REK Penerimaan BLU,PKD
18	BPSDMP	Balai Diklat Penerbangan Jayapura	3.153.123.457	RPL 063 BP3 JYP untuk Operasional Penerimaan dan dana kelolaan			Saldo Rek Operasional Penerimaan dan dana kelolaan
19	BPSDMP	Balai Diklat Ilmu Pelayaran Sorong	4.965.681.892	RPL 066 BP2IP Sorong untuk Kep. Operasional Pengeluaran BLU; operasional penerimaan; dana kelolaan; dan PKD			Saldo Rek Operasional Pengeluaran BLU; operasional penerimaan; dana kelolaan; dan PKD
20	BPSDMP	Balai Diklat Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar	11.406.845.026	RPL 001 BP2IP MALAHAYATI Operasional Pengeluaran BLU dan penerimaan BLU			Saldo Rek Operasional Pengeluaran BLU dan penerimaan BLU
21	BPSDMP	Balai Diklat Penerbang Banyuwangi	7.820.529.460	RPL 100 BP3 BWI untuk operasional penerimaan			Saldo Rek operasional penerimaan
22	BPSDMP	Akademi Perkeretaapian Madiun	7.985.567.654	RPL 033 API MDN untuk Operasional Penerimaan BLU; pengeluaran BLU; dan dana kelolaan,RPL 033 BLU API Madiun utk PKD			Saldo Rek Operasional Penerimaan BLU; pengeluaran BLU; dan dana kelolaan, PKD
23	BPSDMP	Balai Pendidikan Pelatihan Penerbangan Curug	3.657.098.719	RPL 127 BLU BP3 CURUG UNTUK OPS P			Saldo Rek Operasional Penerimaan
Total			565.764.768.464				
Total			868.613.894.298	868.622.232.185,00			

Lampiran C.5. Rincian Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2018

Rincian Investasi Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018

No	Eselon I	Nama Satker	Nama Rekening	Jenis Investasi Jangka Pendek	Nilai (Rp)		Naik/Turun (%)	Penjelasan Kenaikan/Penurunan
					31-Des-18	Audited 2017		
1	Ditjen Perhubungan Udara	Balai Kesehatan Penerbangan	Bank Bukopin RPL 133 Balkes Penerbangan	Deposito 6 bulan	9.000.000.000	9.000.000.000	-	Merupakan deposito sesuai surat deposito Nomor : 2481600414 senilai Rp9.000.000.000,00 dengan tanggal efektif 28 April 2017 memiliki jatuh tempo 28 Oktober 2017 sesuai kontrak awal, namun saat hendak jatuh tempo dilakukan perpanjangan jatuh tempo dengan rincian: 1. Perpanjangan 1: jatuh tempo tanggal 28 April 2018 2. Perpanjangan 2: jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2018 3. Perpanjangan 3: jatuh tempo tanggal 28 April 2019
Total					9.000.000.000	9.000.000.000	-	
Total					9.000.000.000	9.000.000.000	0%	

Lampiran C.6. Rekap KDP Per 31 Desember 2018

NO	UNIT ESELON I	SALDO KDP PER 31 DESEMBER 2018	DILANJUTKAN	DIHENTIKAN		JUMLAH
				SEMENTARA	PERMANEN	
1	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	387.563.873.627	312.287.600.234	75.276.273.393	-	387.563.873.627
2	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	12.001.915.384.653	9.758.132.692.283	2.243.782.692.370	-	12.001.915.384.653
3	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	837.695.326.666	834.249.021.532	3.446.305.134	-	837.695.326.666
4	DITJEN PERKERETAAPIAN	29.607.612.740.868	29.398.849.245.665	208.763.495.203	-	29.607.612.740.868
5	BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	24.611.209.399	24.036.844.399	574.365.000	-	24.611.209.399
JUMLAH		42.859.398.535.213	40.327.555.404.113	2.531.843.131.100	-	42.859.398.535.213

Lampiran D.1

Rincian Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika Per Jenis Pendapatan Per Eselon I TA. 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Total
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			938.634.625.000							938.634.625.000
Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ Track Access Charge						902.206.837.845				902.206.837.845
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan			4.195.321.400	2.229.698.018.978						2.233.893.340.378
Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran				547.048.454.611						547.048.454.611
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan				238.286.112.764						238.286.112.764
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan					337.680.152.719					337.680.152.719
Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan					604.523.880.862					604.523.880.862
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi				503.513.127.553	4.578.055.960					508.091.183.513
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya			10.031.450.002	58.306.850.293	11.731.097.325	5.272.980.400			2.302.050.000	87.644.428.020
Total	-	-	952.861.396.402	3.576.852.564.199	958.513.186.866	907.479.818.245	-	-	2.302.050.000	6.398.009.015.712

Lampiran D.2

Rincian Beban Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I TA. 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	BPSDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Konsolidasi Kementerian Perhubungan	Jumlah
Beban Pegawai	110.186.650.234	36.458.903.255	435.497.399.326	1.806.858.511.381	802.675.288.884	80.160.324.471	30.264.758.004	619.918.388.263	14.008.807.134		3.936.029.030.952
Beban Persediaan	11.705.221.744	1.098.928.755	41.319.470.717	346.043.862.984	112.753.947.619	20.867.627.122	2.251.204.690	131.083.050.821	3.976.194.380		671.099.508.832
Beban Barang dan Jasa	180.043.092.204	15.010.670.462	1.181.066.927.560	2.168.030.342.908	1.336.247.948.034	469.649.754.715	52.933.319.612	1.633.596.653.063	34.875.028.772	(51.365.697.528)	7.020.088.039.802
Beban Pemeliharaan	45.366.340.432	1.639.050.696	208.935.792.232	1.191.461.926.187	492.768.482.017	1.659.378.668.678	2.085.378.139	264.269.472.806	10.396.930.074		3.876.302.041.261
Beban Perjalanan Dinas	116.726.841.229	39.830.752.479	240.315.617.355	458.555.321.582	395.727.655.584	134.354.760.141	38.129.186.718	382.736.499.289	25.809.178.456	(268.864.600)	1.831.916.948.233
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-		37.538.369.000	24.337.280							37.562.706.280
Beban Penyusutan dan dan Amortisasi	89.230.038.202	4.957.674.243	1.260.135.199.186	3.897.960.456.125	8.357.610.376.880	9.463.772.052.880	7.016.186.417	989.660.081.181	23.293.490.901	(9.969.522.338.743)	14.124.113.217.272
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30.866			1.927.644.609	210.498.620.665			5.843.298.816	(2.765.750)		218.266.829.206
Beban Lain-lain											-
Jumlah	553.258.214.911	98.995.979.890	3.404.808.775.376	9.870.862.403.056	11.708.282.319.683	11.828.183.188.007	132.680.033.580	4.027.107.444.239	112.356.863.967	(10.021.156.900.871)	31.715.378.321.838

Lampiran D.3

Rincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I T.A 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Beban Gaji	Beban Tunjangan	Beban Tunjangan Khusus	Beban Honorarium	Beban Lembur	Beban Gaji dan Tunjangan BLU	Jumlah
Sekretariat Jenderal	35,363,869,834	16,516,014,868	57,402,534,532		904,231,000		110,186,650,234
Inspektorat Jenderal	12,404,688,146	5,357,886,589	18,696,328,520				36,458,903,255
Ditjen Perhubungan Darat	160,238,859,432	65,227,343,881	206,010,014,013		4,021,182,000		435,497,399,326
Ditjen Perhubungan Laut	610,063,997,271	285,294,189,088	857,349,133,072		54,151,191,950		1,806,858,511,381
Ditjen Perhubungan Udara	258,258,192,474	145,651,045,147	354,058,180,310		11,619,494,350	33,088,376,603	802,675,288,884
Ditjen Perkeretaapian	26,023,733,401	10,704,687,410	43,043,758,310		388,145,350		80,160,324,471
Badan Penelitian dan Pengembangan	8,959,191,130	5,578,472,129	15,082,897,745		644,197,000		30,264,758,004
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	121,746,950,839	59,705,451,981	113,983,523,631		10,544,611,800	313,937,850,012	619,918,388,263
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	4,602,585,382	1,764,282,894	7,609,436,858		32,502,000		14,008,807,134
Jumlah	1,237,662,067,909	595,799,373,987	1,673,235,806,991	-	82,305,555,450	347,026,226,615	3,936,029,030,952

Lampiran D.4

Rincian Beban Barang Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I T.A 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Beban Keperluan Perkantoran	Beban Pengadaan Bahan Makanan	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri	Beban Barang Operasional BLU	Beban Barang Operasional Lainnya	Total
Sekretariat Jenderal	54.376.208.636		907.986.500	261.851.075	7.775.866.021			14.409.227.523	77.731.139.755
Inspektorat Jenderal	1.973.955.288			70.500.000	243.600.000			1.413.792.527	3.701.847.815
Ditjen Perhubungan Darat	102.950.087.619	881.021.000	17.957.623.222	300.619.647	11.995.816.750			124.575.968.645	258.661.136.883
Ditjen Perhubungan Laut	205.008.156.947	67.996.295.452	20.306.967.767	4.544.901.957	69.470.397.846			10.656.677.310	377.983.397.279
Ditjen Perhubungan Udara	127.262.454.170		2.315.135.036	1.691.066.510	40.156.001.320		301.163.727	351.376.158.064	523.101.978.827
Ditjen Perkeretaapian	20.103.952.457		893.483.613	7.838.500	14.322.284.200			17.135.910.632	52.463.469.402
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.430.383.941		246.153.500	5.869.000	865.397.500			575.128.700	4.122.932.641
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	80.995.530.423	2.750.226.890	493.186.090	391.476.408	16.655.562.975			118.193.277.461	219.479.260.247
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	9.730.673.204		205.205.000		635.240.000			5.625.573.350	16.196.691.554
Konsolidasi Kementerian Perhubungan							(290.048.000)	(25.672.902.921)	(25.962.950.921)
Jumlah	604.831.402.685	71.627.543.342	43.325.740.728	7.274.123.097	162.120.166.612	-	11.115.727	618.288.811.291	1.507.478.903.482

Lampiran D.5

Rincian Beban Barang Non Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I T.A 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Beban Bahan	Beban Barang Transito	Beban Honor Output Kegiatan	Beban Barang Non Operasional Lainnya	Beban Barang on Operasional kepada BLU dalam satu Kementerian Negara/Lembaga	Total
Sekretariat Jenderal	8.939.393.670		3.975.597.500	46.599.939.069		59.514.930.239
Inspektorat Jenderal	2.373.124.400		927.130.000			3.300.254.400
Ditjen Perhubungan Darat	14.793.865.046		85.372.917.726	698.708.918.979		798.875.701.751
Ditjen Perhubungan Laut	30.725.315.011	1.200.000	8.350.304.424	1.506.104.776.676		1.545.181.596.111
Ditjen Perhubungan Udara	23.115.813.516		31.112.559.034	536.577.469.966		590.805.842.516
Ditjen Perkeretaapian	558.096.958		7.041.273.500	226.938.406.034		234.537.776.492
Badan Penelitian dan Pengembangan	3.671.117.536		5.298.607.875	30.924.798.122		39.894.523.533
BPSDM Perhubungan	218.036.574.396		357.576.621.394	177.702.925.579	13.443.810.250	766.759.931.619
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	172.344.150		1.132.600.000	11.436.883.643		12.741.827.793
Konsolidasi Kementerian Perhubungan	(2.259.202.000)			(9.261.908.127)	(11.156.656.868)	(22.677.766.995)
Jumlah	300.126.442.683	1.200.000	500.787.611.453	3.225.732.209.941	2.287.153.382	4.028.934.617.459

Lampiran D.6

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I T.A 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	BPSDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Konsolidasi Kementerian Perhubungan	Jumlah
Beban Perjalanan Biasa	60,747,875,675	35,281,715,521	182,855,688,354	346,274,012,107	316,572,798,463	111,357,048,597	31,337,578,381	198,531,039,365	15,133,858,407		1,298,091,614,870
Beban Perjalanan Tetap			1,227,231,034	194,542,936				23,544,983,541			24,966,757,511
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,003,302,240	688,109,500	2,663,514,581	9,098,807,235	3,397,410,100	743,516,979	177,322,112	3,782,668,201	51,592,800		21,606,243,748
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,005,121,237	1,978,295,000	13,651,175,037	15,105,444,567	5,231,426,400	2,780,826,593	2,851,509,800	12,245,848,703	1,932,581,200		60,782,228,537
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,671,202,407	1,620,718,990	35,979,551,161	76,436,263,028	24,861,131,771	18,076,426,754	1,260,639,300	103,617,605,494	7,949,664,049	(135,000,000)	307,338,202,954
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	7,503,272,769	261,913,468	3,938,457,188	11,146,422,565	23,707,816,527	1,396,941,218	1,510,463,080	41,745,584	544,462,958		50,051,495,357
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	4,796,066,901			299,829,144	5,947,692,447		991,674,045	1,483,431,718	197,019,042		13,715,713,297
Beban Perjalanan BLU					16,009,379,876			39,489,176,683		(133,864,600)	55,364,691,959
Jumlah	116,726,841,229	39,830,752,479	240,315,617,355	458,555,321,582	395,727,655,584	134,354,760,141	38,129,186,718	382,736,499,289	25,809,178,456	(268,864,600)	1,831,916,948,233

Lampiran D.7

Rincian Beban Penyusutan Per Jenis Beban Per Eselon I T.A 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	BPSDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Konsolidasi Kementerian Perhubungan	Jumlah
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61,827,303,801	4,458,937,438	881,496,590,595	2,475,754,822,098	1,112,706,334,714	430,939,902,386	6,583,791,796	744,816,156,386	18,359,127,389		5,736,942,966,603
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17,620,164,324		49,262,894,102	299,674,012,563	185,793,221,321	27,475,174,251		135,976,345,897	2,676,935,144	(158,170,860,277)	560,307,887,325
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,030,052,918		59,057,199,239	457,331,113,288	6,783,313,294,419	8,738,306,546,858		49,604,567,874	1,714,162,139	(9,428,856,385,497)	6,662,500,551,238
Beban Penyusutan Irigasi	175,543,452		45,844,390,233	624,709,925,512	212,289,920,349	57,362,357,599		28,676,336,494		(381,300,593,234)	587,757,880,405
Beban Penyusutan Jaringan	880,786,161		142,806,249	3,716,742,156	18,617,177,442	208,327,744,174	12,922,572	8,258,673,785	4,989,666		239,961,842,205
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			270,383,848	5,000,000	11,345,659,654			2,752,298,627			14,373,342,129
Beban Amortisasi Hak Cipta								2,608,370			2,608,370
Beban Amortisasi Paten			2,316,700								2,316,700
Beban Amortisasi Software	4,571,817,324	498,736,805	910,399,229	18,208,592,458	20,940,967,858	1,360,327,612	252,594,855	17,365,195,138	538,276,563		64,646,907,842
Beban Amortisasi Lisensi	1,897,826,473				2,750,000		134,516,000	472,819,258			2,507,911,731
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya					17,325,000						17,325,000
Beban Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga				6,096,042,988							6,096,042,988
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	76,540,750						22,550,000	1,490,004			100,580,754
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional - Badan Layanan Umum								-			-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	150,002,999		223,148,218,991	12,464,205,062	12,583,726,123		9,811,194	1,733,589,348		(1,194,499,735)	248,895,053,982
Jumlah	89,230,038,202	4,957,674,243	1,260,135,199,186	3,897,960,456,125	8,357,610,376,880	9,463,772,052,880	7,016,186,417	989,660,081,181	23,293,490,901	(9,969,522,338,743)	14,124,113,217,272

Lampiran D.8

Rincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I TA. 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBPN	30,866			524,023,587	210,122,680,895			(64,931,749)	(2,765,750)	210,579,037,849
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya					336,915,890			6,133,451,612		6,470,367,502
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan								(891,707,419)		(891,707,419)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya					(154,887,851)			664,102,156		509,214,305
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag. Lancar TP/TGR				(747,900)						(747,900)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU					(11,331,460)					(11,331,460)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih Jk. Panjang - TP/TGR				191,749,999						191,749,999
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU					222,199,513			714,189		222,913,702
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU					2,413,308			(265,000)		2,148,308
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU					(642,157)			1,935,027		1,292,870
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya				1,212,618,923	(18,727,473)					1,193,891,450
Jumlah	30,866	-	-	1,927,644,609	210,498,620,665	-	-	5,843,298,816	(2,765,750)	218,266,829,206

Lampiran D.9

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I TA. 2018 (Audited)

(dalam Rupiah)

Uraian	Sekretariat Jenderal	Inspektora Jenderal	Ditjen Perhubungan Darat	Ditjen Perhubungan Laut	Ditjen Perhubungan Udara	Ditjen Perkeretaapian	Badan Penelitian dan Pengembangan	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan				729,732,828	44,963,941			186,000,000	196,020	960,892,789
Pendapatan Lain-Lain										
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	59,067,782	1,850,000	5,253,377	161,233,957	77,920,601	2,951,523	17,424,519	86,741,939	186	412,443,884
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	432,938,722		2,366,706,228	7,624,623,984	19,230,823,093	19,365,372,916	752,757,874	224,133,732		49,997,356,549
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu			21,887,030,231	49,893,542,621	92,506,521,042	2,657,443,002		7,451,655,800		174,396,192,696
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu			948,765,000							948,765,000
Penerimaan Kembali Belanja Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	200,000									200,000
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	1,481,735,048									1,481,735,048
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	1,973,941,552	1,850,000	25,207,754,836	57,679,400,562	111,815,264,736	22,025,767,441	770,182,393	7,762,531,471	186	227,236,693,177
Pendapatan BLU Lainnya					4,212,400			571,457,460		575,669,860
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	506,117,300			4,896,728,442	2,307,740,000			71,500,000		7,782,085,742
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	377,258,015	277,915	1,029,445,599,311	93,960,587,236	45,702,682,137	691,601,756	34,298,190	28,243,699,414	179,973,223	1,198,635,977,197
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	2,857,316,867	2,127,915	1,054,653,354,147	157,266,449,068	159,874,863,214	22,717,369,197	804,480,583	36,835,188,345	180,169,429	1,435,191,318,765

Lampiran E.1. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Gedung dan Bangunan	591.048.755.724,00	33.497.023.902,00	557.551.731.822,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	-	-
Peralatan dan Mesin	197.159.823.084,00	-	197.159.823.084,00
Aset Tetap Renovasi	82.382.417.933,00	-	82.382.417.933,00
Piutang Lainnya	21.351.958.874,00	2.664.542.426,00	18.687.416.448,00
Jalan dan Jembatan	3.952.723.345.886,00	-	3.952.723.345.886,00
Irigasi	460.002.164.913,00	153.036.792.000,00	306.965.372.913,00
Konstruksi Dalam pengerjaan	-	1.066.471.105.188,00	(1.066.471.105.188,00)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	24.301.036.500,00	-	24.301.036.500,00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	4.618.885.500,00	1.658.830.378,00	2.960.055.122,00
Transfer Keluar	-	31.061.568.000,00	(31.061.568.000,00)
Tanah Belum Diregister	-	672.299.863,00	(672.299.863,00)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	3.273.322.051,00	(3.273.322.051,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	99.027.500,00	(99.027.500,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9.365.309.721,00	1.888.958.274,00	7.476.351.447,00
Jaringan	15.352.263.178,00	-	15.352.263.178,00
Tanah	3.834.554.814.493,00	922.561.833.806,00	2.911.992.980.687,00
Hasil Kajian/Penelitian	14.614.739.900,00	-	14.614.739.900,00
Jalan dan Jembatan Belum Diregister	-	173.551.038.795,00	(173.551.038.795,00)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	-	52.011.222.978,00	(52.011.222.978,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.402.872.680,00	(5.402.872.680,00)
Irigasi belum diregister	1.179.406.000,00	69.029.624,00	1.110.376.376,00
Aset Tetap Lainnya	-	1.137.623.400,00	(1.137.623.400,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	318.700.116.702,00	236.560.549.404,00	82.139.567.298,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.914.817.100,00	-	9.914.817.100,00
Persediaan yang belum diregister	-	53.080.000,00	(53.080.000,00)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	11.728.338.644,00	14.345.537.200,00	(2.617.198.556,00)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	73.473.730.648,00	73.473.730.648,00	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.904.838.399,00	57.395.580.285,00	69.509.258.114,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	32.204.616.073,00	195.284.573.070,00	(163.079.956.997,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.359.823.971.623,00	2.741.163.295.828,00	(1.381.339.324.205,00)

Lampiran E.1. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	1.221.182.536.514,00	(1.221.182.536.514,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	677.748.320,00	(677.748.320,00)
Hibah Langsung yang belum disahkan	499.528.000,00	-	499.528.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	57.786.839.514,00	(57.786.839.514,00)
Jaringan Belum Diregister	221.638.830.900,00	-	221.638.830.900,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.270.833,00	-	7.270.833,00
Beban Persediaan Suku Cadang	241.796.405.670,00	-	241.796.405.670,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	-	-
Aset Tak Berwujud Lainnya	10.543.584.350,00	-	10.543.584.350,00
Aset Tak Berwujud yang Tidak Dugunakan dalam Operasional Pemerintahan	13.792.829.500,00	-	13.792.829.500,00
Software	-	50.901.080.324,00	(50.901.080.324,00)
Aset Lainnya yang Belum Diregister	389.411.000,00	5.108.000,00	384.303.000,00
Akumulasi Amortisasi Software	-	3.919.205.150,00	(3.919.205.150,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	8.662.500,00	-	8.662.500,00
Jumlah			4.528.275.918.526,00

Lampiran E.2. Rincian Transfer Masuk

Rincian Transfer Masuk

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	311.655.279.156,00
2	Gedung dan Bangunan	1.826.764.368.193,00
3	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	536.869.334.594,00
4	Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.269.313.466.147,00
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.787.604.486.859,00
6	Barang Konsumsi	23.741.154.132,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	252.402.452.835,00
8	Persediaan Lainnya	6.646.429.800,00
9	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	11.881.200.000,00
10	Bahan untuk Pemeliharaan	247.004,00
11	Peralatan dan Mesin	6.571.657.866.285,00
12	Hasil Kajian/Penelitian	94.777.339.930,00
13	Konstruksi Dalam pengerjaan	448.969.522.090,00
14	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	(45.581.415,00)
15	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	(46.000.000,00)
16	Aset Lain lain untuk diserahkan kepada masyarakat	1.184.887.000,00
17	Aset Tak Berwujud Lainnya	58.179.517.750,00
18	Jalan dan Jembatan	5.074.607.244.657,00
19	Tanah	2.052.655.354.190,00
20	Jaringan	74.392.599.918,00
21	Irigasi	1.075.451.160.583,00
22	Software	6.182.283.015,00
23	Aset Tetap Lainnya	986.897.040,00
24	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB	(706.027,00)
25	Bahan Baku	1.151.278.328,00
26	Pita, Cukai, Materai, dan Leges	1.586.200,00
27	Amunisi	238.150,00
28	Suku Cadang	855.311.283.264,00
29	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(474.907.903.989,00)
30	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(142.183.100.056,00)

Lampiran E.2. Rincian Transfer Masuk

Rincian Transfer Masuk

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
31	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.461.511.284.495,00)
32	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(505.937.067.900,00)
33	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(51.429.803.528,00)
34	Kas di Bendahara Penerimaan	58.225.150,00
35	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(31.061.568.000,00)
36	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.388.275.219,00)
37	Akumulasi Amortisasi Software	(4.617.231.832,00)
38	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	141.205.284,00
Jumlah		19.665.458.385.093,00

Lampiran E3

Rincian Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	(280.270.536.330,00)
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(2.731.236.179.880,00)
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	46.000.000,00
4	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	45.581.415,00
5	Peralatan dan Mesin	(6.243.344.193.293,00)
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	(56.956.066.950,00)
7	Irigasi	(840.407.558.661,00)
8	Jalan dan Jembatan	(3.543.947.800.646,00)
9	Gedung dan Bangunan	(1.820.423.990.067,00)
10	Tanah	(1.061.401.756.326,00)
11	Konstruksi Dalam pengerjaan	(1.086.510.644.852,00)
12	Jaringan	(27.027.858.298,00)
13	Hasil Kajian/Penelitian	(94.777.339.930,00)
14	Aset Tetap Lainnya	(986.897.040,00)
15	Software	(6.182.283.015,00)
16	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB	706.027,00
17	Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	(86.062.034.947,00)
18	Aset Tak Berwujud yang Tidak Dugunakan dalam Operasional Pemerintahan	(1.223.450.800,00)
19	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	472.217.910.704,00
20	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	142.123.266.797,00
21	Akumulasi Penyusutan Irigasi	51.429.803.528,00
22	Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(1.233.905.216.517,00)
23	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	(254.734.500.335,00)
24	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(522.838.261.594,00)
25	Aset Lain lain untuk diserahkan kepada masyarakat	(1.184.887.000,00)
26	Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	(1.797.307.462.859,00)
27	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	(46.627.624.630,00)

Lampiran E3**Rincian Transfer Keluar***(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai
28	Bahan untuk Pemeliharaan	(247.004,00)
29	Barang Konsumsi	(23.768.625.702,00)
30	Persediaan Lainnya	(6.646.429.800,00)
31	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	492.391.512.487,00
32	Kas di Bendahara Penerimaan	(58.225.150,00)
33	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(2.657.874.500,00)
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.511.540.698.033,00
35	Akumulasi Penyusutan Jaringan	3.294.107.587,00
36	Akumulasi Amortisasi Software	4.617.231.832,00
37	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(141.205.284,00)
38	Bahan Baku	(1.125.631.108,00)
39	Suku Cadang	(131.708.125.555,00)
Jumlah		(19.225.756.089.663,00)

Lampiran E.4. Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		KET
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2ZA34AKA	TERMINAL KOTA PEMATANGSIANTAR	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		10.191.629.451,00	MPHL-2018133412735010
2	2BSU3BWA	TERMINAL KABUPATEN SEMARANG	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		9.078.362.116,00	MPHL-2018133412735003
3	2GK28RLA	TERMINAL KABUPATEN PEMALANG	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		24.909.899.625,00	MPHL-2018133412735004
4	2Z213QYA	TERMINAL KOTA SALATIGA	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		2.662.948.348,00	MPHL-2018133412735001
5	2HNQXR2A	TERMINAL KABUPATEN SUMEDANG	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		4.287.003.137,00	MPHL-2018133412735011
6	265B8EXA	TERMINAL KABUPATEN BLORA	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		28.322.353.350,00	MPHL-2018133412735005
7	2L1MAPEA	PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		23.250.000,00	MPHL-2018133412735006
8	2542CLXA	UPPKB PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		6.691.790.600,00	MPHL-2018133412735008
9	21VW2PPA	TERMINAL KOTA BANDAR LAMPUNG	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		33.994.753.416,00	MPHL-2018133412735007
10	2UK53EAA	TERMINAL TERPADU MERAK KOTA CILEGON	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		60.702.769.383,00	MPHL-2018133412735009
11	2EFH4UQA	TERMINAL KABUPATEN CILACAP	022	03	412735	30-Mei-18		IDR		88.121.025,00	MPHL-2018133412735002
12	2ND71H1A	PEMERINTAH KABUPATEN PASER (TANAH UNTUK UPPKB)	022	03	412735	22-Okt-18		IDR		1.618.214.500,00	MPHL-2018133412735017
13	2XHCDFKA	PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN (DANAU BERATAN)	022	03	412735	22-Okt-18		IDR		295.900.000,00	MPHL-2018133412735018
14	25FQLSLA	PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG (DERMAGA, NAIKLIU)	022	03	412735	22-Okt-18		IDR		50.000.000,00	MPHL-2018133412735019
15	2LUQHCSA	TERMINAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT	022	03	412735	22-Okt-18		IDR		1.425.000.000,00	MPHL-2018133412735020
16	2V9T35MA	TERMINAL PEMERINTAH KOTA GORONTALO	022	03	412735	22-Okt-18		IDR		52.543.099.337,00	MPHL-2018133412735021
17	26G7HWJA	UPPKB PROVINSI JAWA TIMUR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		287.004.305.420,00	MPHL-2018133412735074
18	2T3P1S6A	TERMINAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	022	03	412735	31-Des-18		IDR		21.663.042.300,00	MPHL-2018133412735066
19	26HR3ZBA	TERMINAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.331.867.525,00	MPHL-2018133412735027
20	2FF73EQA	TERMINAL KABUPATEN TUBAN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		30.668.271.664,00	MPHL-2018133412735058
21	2EAFX67A	PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.396.406.639,00	MPHL-2018133412735023
22	21HH8RYA	PEMERINTAH KOTA BANJAR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		6.619.636.186,00	MPHL-2018133412735040
23	2H8TCRKA	PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		5.524.620.000,00	MPHL-2018133412735026
24	2KPBU5QA	TERMINAL KABUPATEN BADUNG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		31.160.229.570,00	MPHL-2018133412735060
25	2LGB616A	UPPKB PROVINSI JAWA TENGAH	022	03	412735	31-Des-18		IDR		53.015.478.670,00	MPHL-2018133412735059
26	27HM41KA	UPPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	022	03	412735	31-Des-18		IDR		7.304.224.510,00	MPHL-2018133412735029

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		KET
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2WMAD4GA	UPPKB PROVINSI SUMATERA UTARA	022	03	412735	31-Des-18		IDR		15.504.604.296,00	MPHL-2018133412735077
28	2GWSCMUA	TERMINAL KOTA BUKITTINGGI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		22.822.309.790,00	MPHL-2018133412735071
29	2Q1A3JRA	TERMINAL PEMERINTAH KOTA KUPANG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.133.150.000,00	MPHL-2018133412735065
30	2BNV5L9A	TERMINAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.766.022.082,00	MPHL-2018133412735020
31	2J9UH9EA	UPPKB PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		2.042.331.510,00	MPHL-2018133412735025
32	2E521DCA	UPPKB PEMERINTAH PROVINSI BALI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		2.811.974.801,00	MPHL-2018133412735024
33	22PFWQ7A	UPPKB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.883.460.835,00	MPHL-2018133412735022
34	2ZZWKQRA	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.221.455.395,00	MPHL-2018133412735037
35	2SJVAYRA	PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		8.558.800.760,00	MPHL-2018133412735030
36	2A14FQ5A	PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		46.602.728.880,00	MPHL-2018133412735072
37	273C4A2A	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	022	03	412735	31-Des-18		IDR		19.698.039.013,00	MPHL-2018133412735075
38	2GABHWRA	PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.455.043.000,00	MPHL-2018133412735036
39	2A6K3HGA	PEMERINTAH KOTA BIMA	022	03	412735	31-Des-18		IDR		575.622.000,00	MPHL-2018133412735033
40	2PDSJ5TA	PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.955.066.380,00	MPHL-2018133412735032
41	2713W42A	PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.172.800.000,00	MPHL-2018133412735035
42	2UDFKU3A	PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.013.998.991,00	MPHL-2018133412735034
43	2NFHJLNA	PEMERINTAH KABUPATEN GARUT	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.336.430.073,00	MPHL-2018133412735031
44	2FKZWPEA	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH	022	03	412735	31-Des-18		IDR		6.332.627.769,00	MPHL-2018133412735039
45	26WJS8SA	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		9.466.405.369,00	MPHL-2018133412735038
46	265FPUMA	PEMERINTAH KOTA KEDIRI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		5.600.405.447,00	MPHL-2018133412735042
47	2U4L5UHA	PEMERINTAH KOTA MADIUN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		5.298.084.435,00	MPHL-2018133412735044
48	28GZKBNA	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	022	03	412735	31-Des-18		IDR		7.485.420.168,00	MPHL-2018133412735043
49	28B1K92A	PEMERINTAH KOTA BLITAR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		26.405.325.862,00	MPHL-2018133412735041
50	2ZFX2XDA	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		46.522.324.291,00	MPHL-2018133412735062
51	2TVKCA3A	PEMERINTAH KABUPATEN BARRU	022	03	412735	31-Des-18		IDR		674.596.620,00	MPHL-2018133412735076
52	2DRYJDQA	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	022	03	412735	31-Des-18		IDR		20.441.451.374,00	MPHL-2018133412735047
53	2UE42ADA	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		8.167.084.000,00	MPHL-2018133412735052
54	2Z2GLDUA	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	022	03	412735	31-Des-18		IDR		139.372.500,00	MPHL-2018133412735061
55	2JWJ4P3A	PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		4.913.325.600,00	MPHL-2018133412735048
56	2P9UTNTA	PEMERINTAH KOTA GORONTALO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		191.296.396,00	MPHL-2018133412735046
57	2AKWV79A	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS	022	03	412735	31-Des-18		IDR		6.810.784.500,00	MPHL-2018133412735049

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		KET
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2BKJNPPA	PEMERINTAH KOTA SIBOLGA	022	03	412735	31-Des-18		IDR		7.078.926.125,00	MPHL-2018133412735054
59	2F4RYTRA	PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.142.386.000,00	MPHL-2018133412735056
60	2NGYY5MA	PEERINTAH KABUPATEN KAMPAR	022	03	412735	31-Des-18		IDR		1.791.515.221,00	MPHL-2018133412735057
61	2D8A7HPA	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		11.117.337.863,00	MPHL-2018133412735050
62	27AYW3UA	PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK	022	03	412735	31-Des-18		IDR		2.914.858.096,00	MPHL-2018133412735053
63	2NEH6E5A	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	022	03	412735	31-Des-18		IDR		316.051.000,00	MPHL-2018133412735045
64	221RS6MA	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	022	03	412735	31-Des-18		IDR		2.962.014.290,00	MPHL-2018133412735063
65	2SH8WJ2A	PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN	022	03	412735	31-Des-18		IDR		3.272.371.720,00	MPHL-2018133412735051
66	2NY1S9MA	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		13.546.127.259,00	MPHL-2018133412735073
67	27AC755A	PEMERINTAH KOTA SERANG	022	03	412735	31-Des-18		IDR		6.533.220.621,00	MPHL-2018133412735055
68	22P6U65A	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		10.846.524.474,00	MPHL-2018133412735064
69	28MV9N2A	PEMERINTAH KOTA DUMAI	022	03	412735	31-Des-18		IDR		14.204.732.176,00	MPHL-2018133412735070
70	2PRS9LWA	PEMERINTAH KOTA PALU	022	03	412735	31-Des-18		IDR		498.570.000,00	MPHL-2018133412735069
71	2SNL4BWA	PEMERINTAH KOTA POSO	022	03	412735	31-Des-18		IDR		2.262.146.933,00	MPHL-2018133412735068
72	2A41M9PA	PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MUTONG (TANAH UPPKB PROVINSI SULTENG)	022	03	412735	31-Des-18		IDR		15.000.000,00	MPHL-2018133412735067
73	27BR1T1A	HIBAH TANAH DARI SUDARNINGSIH (PEGAWAI PEMDA BINTAN) PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN TANJUNG UBAN	022	04	413199	23-Mei-18		IDR		64.585.950,00	MPHL-2018009413199001
74	2J372NGA	HIBAH TANAH DARI PEMDA BOALEMA KEPADA UPP TILAMUTA	022	04	521768	12-Nov-18		IDR		2.193.957.370,00	MPHL-201818052176800
75	25VUJ4HA	HIBAH BARANG BERUPA TANAH SELUAS 10.000 M2 KEPADA UPP BADE	022	04	517950	13-Nov-18		IDR		200.000.000,00	MPHL-2018068517950000
76	2NDA9FCA	HIBAH TANAH KEPADA UPP SUNGAI LUMPUR	022	04	521620	14-Nov-18		IDR		20.000.000,00	MPHL-2018014521620001
77	2TFJNAAA	HIBAH BERUPA TANAH DARI PEMDA ROKAN HILIR KEPADA KSOP BAGAN SIAPI-API	022	04	413121	26-Nov-18		IDR		3.161.060.000,00	MPHL-2018120413121002
78	22LNSJSA	HIIBAH KENDARAAN RODA 2 (HONDA BEAT) DARI PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA KEPADA KANTOR KSOP MANOKWARI	022	04	287799	06-Des-18		IDR		17.870.000,00	MPHL-201806528779901
79	2BCEBPLA	HIIBAH KENDARAAN RODA RODA 4 (MOBIL PATROLI) DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA BARAT KEPADA KANTOR KSOP MANOKWARI	022	04	287799	06-Des-18		IDR		232.400.000,00	MPHL-201806528779900
80	236X86LA	HIBAH TANAH KEPADA UPP TG REDEB	022	04	289843	12-Des-17		IDR		540.000.000,00	MPHL-2018153289843001

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		KET
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2MDCGRRA	HIBAH BERUPA TANAH DARI MASYARAKAT SETEMPATKEPADA KSOP PALEMBANG	022	04	413256	28-Des-18		IDR		438.000,00	MPHL-2018014413256001
82	238GH1WA	HIBAH BERUPA TANAH DARI MASYARAKAT SETEMPATKEPADA KSOP PALEMBANG	022	04	413256	28-Des-18		IDR		12.056.000,00	MPHL-2018014413256002
83	2SSBT8ZA	HIBAH BERUPA TANAH DARI MASYARAKAT SETEMPATKEPADA KSOP PALEMBANG	022	04	413256	28-Des-18		IDR		50.000.000,00	MPHL-2018014413256003
84	2KP744FA	HIBAH BERUPA TANAH DARI MASYARAKAT SETEMPATKEPADA KSOP PALEMBANG	022	04	413256	28-Des-18		IDR		443.000,00	MPHL-2018014413256004
85	2R9LG37A	HIBAH TANAH DARI SDR. JEFRISANI KEPADA KANTOR UPP MUNTOK	022	04	413271	31-Des-18		IDR		499.528.000,00	MPHL-2018015413271001
86	24E6H45A	HIBAH TANAH DARI SDR. BAHRANI KEPADA KANTOR UPP SEBUKU	022	04	517878	31-Des-18		IDR		65.000.000,00	MPHL-201808517878001
87	70878801	HIBAH MAINTENANCE AND REPLACEMENT OF AIDS TO NAVIGATION IN THE STRAITS OF MALACCA AND SINGAPORE KEPADA KANTOR SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT	022	04	439460	31-Des-18	6.425.046.215,00	IDR			SPHL-18140000000043
88	23KKQ8YA	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PERORANGAN A.N. M. RUDINI UNTUK KSOP KUALA PEMBUANG	022	04	289801	31-Des-18		IDR		72.000.000,00	MPHL-2018044289801001
89	2H4G2XUA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BANDAR UDARA HALUOLEO KENDARI	022	05	288436	12-Nov-18		IDR		98.950.762.941,00	MPHL-2018060288436000
90	2JUFL9CA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIR BARAT PROVINSI LAMPUNG PADA BANDAR UDARA PEKON SERAI	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		27.596.623.000,00	MPHL- 2018133288042009
91	2CLBFK9A	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA (BANDAR UDARA BOLAANG MONGONDOW)	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		10.301.420.420,00	MPHL-2018133288042008

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA		KET
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2L824F4A	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA BANDAR UDARA ISKANDAR PANGKALAN BUN	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		16.860.959.750,00	MPHL-2018133288042010
93	2US4HRVA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA PADA BANDAR UDARA MOZES KILANGIN	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		178.391.837.000,00	MPHL-2018133288042001
94	2DL1PNRA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BANDAR UDARA SANGIA NIBANDERA	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		19.047.937.200,00	MPHL-2018133288042005
95	2DVKTLXA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA BANDAR UDARA SAMARINDA BARU	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		740.480.037.330,00	MPHL-2018133288042002
96	2KDF6P3A	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA BANDAR UDARA MATAHORA	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		160.929.184.000,00	MPHL-2018133288042007
97	2284GMYA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA BANDAR UDARA HAJI MUHAMMAD SIDIK	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		16.569.279.100,00	MPHL-2018133288042003
98	2PVGZSWA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA BANDAR UDARA TANJUNG API AMPANA	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		91.319.846.486,00	MPHL-2018133288042004
99	2TGQK6UA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA BANDAR UDARA RANAI - NATUNA	022	05	288042	23-Nov-18		IDR		195.576.200.000,00	MPHL-2018133288042006
100	2A5Z56DA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PADA BANDAR UDARA MUKOMUKO	022	05	512769	26-Nov-18		IDR		24.999.612.000,00	MPHL-2018181512769005
101	2W5TYVYA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA UNTUK KANTOR UPBU DEWADARU KARIMUNJAWA	022	05	568615	06-Dec-18		IDR		4.175.730.090,00	MPHL-2018129568615001
102	21BNRJHA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA BANDAR UDARA H. ASAN SAMPIT	022	05	413947	10-Dec-18		IDR		499.349.900,00	MPHL-2018044413947001
										16.285.430.200,00	MPHL-2018044413947002
										5.933.069.100,00	MPHL-2018044413947003

Rincian Hibah Langsung Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO	NO.REGISTER	NAMA PROJECT	SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)					KET	
			BA	ES	KODE SATKER	TANGGAL PENGESAHAN	UANG		BARANG/JASA			
							IDR	MATA UANG	VALAS	IDR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										2.023.264.000,00	MPHL-2018044413947004	
103	2A5922KA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA PADA BANDAR UDARA DOUW ATURURE	022	05	288614	10-Des-18		IDR		58.866.648.820,00	MPHL-2018085288614002	
104	2WYPKW1A	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PADA BANDAR UDARA DOUW ATURURE	022	05	288614	10-Des-18		IDR		91.000.796.400,00	MPHL-2018085288614001	
105	2J7TT4QA	HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI)	022	05	449464	11-Des-18		IDR		4.811.376.600,00	MPHL-2018103449464001	
106	2TRTEFYA	HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG BERUPA TANAH SELUAS 650.000 M2 UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIAU	022	05	413978	12-Des-18		IDR		13.000.000.000,00	MPHL-2018083413978001	
107	2FGW388A	HIBAH LANGSUNG BARANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK BANDAR UDARA REMBELE	022	05	465487	28-Des-18		IDR		158.622.194.000,00	MPHL-2018122465487001	
										47.901.371.621,00	MPHL-2018122465487002	
										5.335.350.940,00	MPHL-2018122465487003	
										188.342.100,00	MPHL-2018122465487004	
108	27GA6D3A	TANAH UNTUK PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN PADA JALUR KERETA API ANTARA STASIUN DUKU - BIM SUMBAR	022	08	467352	16-Nov-18		IDR		26.757.508.783,00	MPHL-2018010467352001	
109	2RNNKYXA	TANAH KAMPUS PADANG PARIAMAN	22	12	419172	08-Okt-18		IDR		18.071.444.330,00	MPHL-2018010419172002	
110	2MP29R5A	P3D TERMINAL PORIS PLAWAD	022	013	015413	26-Jul-18		IDR		32.543.685.393,00	MPHL-2018133015413001	
111	2KQQL4AA	P3D TERMINAL BARANANGSIANG	022	013	015413	26-Jul-18		IDR		57.388.740.507,00	MPHL-2018133015413002	
112	2F6LRTVA	P3D TERMINAL JATIJAJAR	022	013	015413	16-Agu-18		IDR		139.488.373.445,00	MPHL-2018133015413003	
113	24Y3R97A	P3D TERMINAL PONDOK CABE	022	013	015413	12-Des-18		IDR		78.299.105.847,00	MPHL-2018133015413004	
JUMLAH							6.425.046.215,00			3.402.422.120.310,00		
TOTAL PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG DAN BARANG/JASA												3.408.847.166.525,00

**DAFTAR NILAI BPYBDS PER SATKER
PER 31 DESEMBER 2018**

ESELON I	NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1	445510	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	Rp 310.195.437.051
	2	445510	DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT	Rp 4.395.490.000
	3	445526	PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SDP	Rp 96.030.670.102
	4	466570	DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT	Rp 42.751.275.000
	5	466941	DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	Rp 91.860.561.650
	6	467082	PENGEMBANGAN LLASDP JAWA TIMUR	Rp 22.389.677.000
	7	401714	PENGEMBANGAN LLASDP KALTIM	Rp 146.325.674.000
	8	403852	BPTD WILAYAH XII PROVINSI BALI DAN NTB	Rp 19.335.272.000
	9	403866	BPTD WILAYAH XXIV PROVINSI MALUKU UTARA	Rp 11.726.296.000
	JUMLAH			Rp 745.010.352.803
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	1	413049	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN GUNUNG SITOLI	Rp 113.018.361.072
	2	412772	KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	Rp 110.493.472.394
	3	439200	PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN Pengerukan PUSAT	Rp 828.257.491.038
	4	287232	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TARAKAN	Rp 19.999.751.000
	JUMLAH DITJEN PERHUBUNGAN LAUT			Rp 1.071.769.075.504
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1	288042	KANTOR PUSAT	Rp 7.478.143.198.625
	2	288216	BANDARA FL. TOBING	Rp 4.437.438.500
	3	288241	BANDAR UDARA JAPURA RENGAT	Rp 6.590.763.180
	4	288262	BANDARA DABO SINGKEP	Rp 12.844.336.028
	5	288312	BANDARA H.A.S. HANANDJOEDDIN	Rp 22.800.141.100
	6	288326	BANDAR UDARA RADIN INTEN	Rp 14.731.175.128
	7	288347	BANDAR UDARA TJILIK RIWUT	Rp 31.821.231.500
	8	288372	UPBU JUWATA	Rp 135.267.889.200
	9	288393	BANDARA DJALALUDIN GORONTALO	Rp 33.216.431.110
	10	288401	BANDAR UDARA SIS AL JUFRI	Rp 23.481.180.800
	11	288436	BANDAR UDARA HALUOLEO	Rp 26.257.596.586
	12	288457	BANDARA BABULLAH TERNATE	Rp 34.299.364.557
	13	288482	BANDAR UDARA SM KAHARUDDIN	Rp 2.727.947.000
	14	288499	BANDAR UDARA SALAHUDDIN BIMA	Rp 2.862.282.000
	15	288511	BANDAR UDARA UMBU MEHANG KUNDA	Rp 58.139.743.400
	16	288525	BANDARA TAMBOLAKA	Rp 12.498.121.903
	17	288532	BANDARA FRANS SEDA MAUMERE	Rp 561.800.500
	18	288550	BANDAR UDARA SENTANI	Rp 95.687.525.506
	19	288571	BANDARA RENDANI	Rp 10.345.425.100
	20	288588	KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK - SORONG	Rp 31.997.426.200
	21	288592	BANDARA MOPAH	Rp 34.144.649.700
	22	288600	KANTOR UPBU KELAS I WAMENA	Rp 8.028.206.727
	23	288614	BANDARA DOUW	Rp 16.842.619.240
	24	288621	BANDARA FATMAWATI SOEKARNO	Rp 82.580.803.500
	25	288745	BANDAR UDARA TEMINDUNG	Rp 10.113.958.165
	26	413828	BANDARA BUDIARTO	Rp 14.673.703.000
	27	413834	BANDARA FRANS SALES LEGA	Rp 3.144.672.600
	28	413840	BANDARA GUSTI SJAMSIR ALAM	Rp 2.726.086.000
	29	413859	BANDARA KASIGUNCU	Rp 9.002.079.455
	30	413865	BANDARA CUT NYAK DHIEN	Rp 12.737.270.387
	31	413871	BANDARA TOREA	Rp 3.791.834.000
	32	413880	BANDAR UDARA ISKANDAR PANGKALAN BUN	Rp 17.583.961.380
	33	413896	BANDARA HANG NADIM	Rp 23.102.273.000
	34	413900	KANTOR UPBU KELAS III TUNGGUL WULUNG CILACAP	Rp 9.965.191.725
	35	413916	BANDARA BINAKA	Rp 12.207.582.000
	36	413922	BANDAR UDARA RAHADI OESMAN KETAPANG	Rp 14.583.907.653
	37	413931	BANDARA UDARA SUSILO SINTANG	Rp 2.465.442.950
	38	413947	BANDAR UDARA H. ASAN SAMPIT	Rp 10.357.471.400
	39	413953	BANDAR UDARA BERINGIN MUARA TEWEH	Rp 272.099.900
	40	413962	BANDARA KALIMARAU BERAU	Rp 38.673.043.000
	41	413984	BANDARA SYUKURAN AMINUDDIN	Rp 12.981.000.000
	42	413990	BANDARA SULTAN BANTILAN	Rp 3.563.493.767
	43	414004	BANDAR UDARA BETOAMباري	Rp 11.541.744.000
	44	414010	BANDAR UDARA BANDANAIRA	Rp 3.249.443.350
	45	414029	BANDAR UDARA H. AROEBOESMAN ENDE	Rp 9.144.786.000
	46	414035	BANDARA SERUI	Rp 2.226.664.170
	47	414041	UPBU BINTUNI	Rp 370.210.000
	48	414050	BANDARA TANAH MERAH	Rp 3.562.075.000
	49	414066	BANDARA SARMI	Rp 3.278.694.000
	50	414072	BANDARA MINDIPTANA	Rp 2.894.848.000
	51	414081	BANDARA OKSIBIL	Rp 9.863.563.000
	52	414097	BANDARA ENAROTALI	Rp 45.150.000
	53	414101	BANDARA WAGHETE	Rp 218.250.000
	54	414117	BANDARA MULIA	Rp 2.030.783.000
	55	414123	BANDARA KAIMANA	Rp 8.645.527.000

ESELON I	NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
	56	414132	BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI	Rp 185.505.000
	57	414148	BANDARA LASIKIN	Rp 3.125.460.000
	58	414154	BANDAR UDARA ROKOT	Rp 45.907.307.000
	59	414160	BANDARA SEI BATI	Rp 1.031.998.700
	60	414179	BANDAR UDARA DEPATI PARBO	Rp 6.677.373.000
	61	414185	BANDAR UDARA PANGSUMA PUTUSSIBAU	Rp 12.735.779.800
	62	414191	UPBU TAMPA PADANG	Rp 9.721.532.400
	63	414205	BANDARA PONGTIKU	Rp 111.558.000
	64	414211	BANDARA OESMAN SADIK	Rp 3.008.640.000
	65	414220	BANDARA GAMARMALAMO	Rp 109.501.659
	66	414236	BANDARA MALI ALOR	Rp 10.264.804.500
	67	414242	BANDARA GEWAYANTANA	Rp 2.885.528.001
	68	414251	BANDARA LABUAN BAJO-KOMODO	Rp 10.228.306.000
	69	419220	BANDARA SEKO	Rp 4.040.093.500
	70	419221	BANDARA RAMPI	Rp 4.005.963.808
	71	447786	BANDARA TIOM	Rp 392.800.000
	72	447874	BANDAR UDARA PEKON SERAI	Rp 243.690.000
	73	447899	BANDARA BULI MABA	Rp 2.789.647.096
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	74	449462	BANDARA BUA	Rp 3.515.913.500
	75	449463	BANDARA MEDAN BARU	Rp 748.760.734.409
	76	449464	BANDARA MATOHARA	Rp 2.740.750.000
	77	449488	BANDAR UDARA SILAMPARI	Rp 7.098.535.000
	78	449491	UPBU EMALAMO	Rp 145.751.375
	79	449508	BANDARA AROEPALA SELAYAR	Rp 10.017.038.500
	80	449514	BANDARA DOBO	Rp 2.767.618.500
	81	465487	BANDARA REMBELE	Rp 325.490.000
	82	465493	BANDARA LASONDRE	Rp 249.155.700
	83	465544	BANDAR UDARA BANYUWANGI	Rp 5.549.098.380
	84	465590	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Rp 147.361.229.458
	85	465626	DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN	Rp 788.799.418.099
	86	465677	KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI	Rp 9.051.000.000
	87	466250	BANDARA POGUGOL BUOL	Rp 3.420.325.133
	88	466266	BANDARA SAUMLAKI	Rp 502.533.000
	89	466272	BANDARA MOZES KILANGIN	Rp 74.726.361.131
	90	499522	BANDAR UDARA PASIR PANGARAYAN	Rp 177.560.000
	91	499531	BANDAR UDARA TRUNOJOYO	Rp 11.418.688.000
	92	499547	UPBU MALINAU	Rp 989.100.000
	93	499562	BANDAR UDARA MELAK	Rp 3.849.588.500
	94	499578	BANDARA KIMAM	Rp 69.890.000
	95	499590	BANDARA KAMUR	Rp 72.500.000
	96	499641	BANDAR UDARA TUMBANG SAMBA	Rp 139.071.000
	97	512752	BANDARA SOA BAJAWA	Rp 9.091.376.901
	98	512769	BANDARA MUKOMUKO	Rp 3.630.643.970
	99	517658	BANDAR UDARA NANGAPINOH	Rp 720.540.500
	100	517662	BANDARA BOKONDINI	Rp 3.145.285.000
	101	518138	BANDARA KEPI	Rp 463.070.000
	102	518142	BANDARA OKABA	Rp 70.000.000
	103	518159	BANDARA MOANAMANI	Rp 1.447.797.000
	104	518163	KANTOR UPBU WASIOR	Rp 421.264.000
	105	518170	KANTOR UPBU INANWATAN	Rp 80.000.000
	106	518184	BANDARA TEMINABUAN	Rp 334.499.567
	107	518191	KANTOR UPBU MERDEI	Rp 233.600.000
	108	518206	BANDARA KOKONAO	Rp 91.659.000
	109	521992	BANDARA KUABANG KAO	Rp 6.722.900.000
	110	522007	BANDARA MELONGUANE	Rp 9.119.552.955
	111	522011	BANDARA HALIWEN	Rp 10.264.222.576
	112	522028	BANDARA DC SAUDALE	Rp 4.277.453.500
	113	522032	BANDARA TARDAMU SABU	Rp 3.064.764.000
	114	538992	BANDAR UDARA SANGGU BUNTOK	Rp 2.862.248.700
	115	539007	UPBU TANJUNG HARAPAN	Rp 186.297.000
	116	539011	BANDARA ANDIJEMA	Rp 4.775.265.665
	117	539028	BANDARA KAREL SADSUITUBUN	Rp 3.316.548.000
	118	547924	BANDAR UDARA AEK GODANG	Rp 797.317.500
	119	568601	BANDARA CAKRABHUANA	Rp 3.636.835.000
	120	568615	BANDAR UDARA DEWADARU KARIMUNJAWA	Rp 3.415.308.400
	121	568622	BANDAR UDARA WUNOPITO	Rp 205.765.000
	122	568636	BANDAR UDARA KUALA PEMBUANG	Rp 1.211.548.800
	123	568640	BANDAR UDARA KUALA KURUN	Rp 1.355.742.000
	124	568657	BANDARA YUVAI SEMARING	Rp 2.583.328.000
	125	568661	BANDARA NUNUKAN	Rp 10.664.948.500
	126	568678	BANDARA NUMOR	Rp 144.668.000
	127	568681	BANDAR UDARA MUARA BUNGO	Rp 790.900.000
	128	606339	BANDARA KARUBAGA	Rp 80.000.000
	129	606343	BANDARA EWER	Rp 211.981.000
	130	606350	BANDARA ILU	Rp 79.887.000
	131	606364	UPBU BABO	Rp 794.870.000
	132	649821	BANDARA BADE	Rp 149.150.000
	133	649835	BANDARA SENGEH	Rp 77.000.000

ESELON I	NO.	KODE SATKER	NAMA SATKER	NILAI
	134	649842	BANDARA BATOM	Rp 155.000.000
	135	649856	BANDARA BILORAI	Rp 320.232.000
	136	652591	BANDARA ILLAGA	Rp 161.602.000
	137	652606	KANTOR UPBU KEBAR	Rp 152.846.000
	138	652627	BABDARA MAIMUN SALEH	Rp 204.639.000
	139	662841	UPBU LONG APUNG	Rp 4.336.084.500
	140	662855	BANDAR UDARA DATA DAWAI	Rp 3.514.767.500
	141	662862	BANDARA SUGIMANURU MUNA	Rp 2.697.375.000
		JUMLAH DITJEN PERHUBUNGAN UDARA		Rp 10.480.597.726.675
		JUMLAH TOTAL		Rp 12.297.377.154.982